



DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI BANTEN



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2023 - 2026





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B Blok F No. 1 Curug, Kota Serang – Provinsi Banten

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN**

Nomor : 188.4/Kep.063-Diskominfo/2023

TENTANG
**PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI BANTEN**
TAHUN 2023-2026

**KEPALA DINAS KOMUNKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN**

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perlu dibentuk Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencan Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas komunikasi, statistik dan persandian provinsi banten.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5587) sebagaimana telah diubah

- beberpaka terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
 8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang meruapakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas mempedomani hal-hal sebagai berikut :
1. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kerja Tahunan yang disusun;
 2. Mempedomani seluruh dokumen perencanaan terkait, diantaranya : RPJMD, RKPD, Renja dan Dokumen Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten ;
 3. Mempedomani analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats) dan menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
 4. Menganalisis Data/Informasi;
 5. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanaan pada tahun rencana kerja yang disusun. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (output dan outcomes);
 6. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
 7. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
 8. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang menjadi prioritas pada tahun rencana kerja yang disusun;

9. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
10. Melakukan evaluasi rancangan awal (ranwal) RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Ranwal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Ranwal RPJMD mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik, penjabaran visi dan misi kepala daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program dan Kegiatan.

- KETIGA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten bertanggungjawab secara administrasi maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 14 Januari 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten
Nomor : 188.4/Kep.063 - Diskominfo/2023
Tanggal : 14 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023-2026
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN**

Penanggung Jawab	: Didi Hadiyatna, SE, MM,	Plt. Kepala Dinas
Ketua Anggota	: Ai Dewi Suzana, SE, M.Si	Sekretaris
	: 1. Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Kemitraan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten
	2. Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	Plt. Kepala Bidang Ekosistem Spbe Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten
	3. Sofyan Nuryaman, SH	Perencana Ahli Muda
	4. Eva Sulyana Aprilia, SE, MM	
	5. Eni Yuningsih, SH, MM	
	6. Niluh Jinggan Larasati	
	7. Erna Yuliana	





KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 2005 – 2026 Pemerintah Provinsi Banten. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan adanya perubahan SOTK sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor : 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak/ prioritas serta kebijakan pimpinan Pemerintah Provinsi Banten. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi **"Banten Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"**.

Serang, Maret 2023

Plt. Kepala



Didi Hadiyatna, SE, MM
Pembina (IV/a)

NIP. 19770119 200801 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii-iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1-3
1.2. Landasan Hukum.....	3-7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7-8
1.4. Sistematika Penulisan.....	8-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN	
.....	10
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	10
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	10-11
2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	11
2.1.3 Uraian Tugas.....	11-18
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	19
2.2.1 Sumber Daya manusia.....	19-20
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	21-25
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	25-39
2.4 Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2023 – 2026.....	39-42
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	43-45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN.....	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten.....	46-53
3.2 Telaahan Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025.....	54-55
3.3 Telaahan Renstra K/L.....	55-58
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	58

	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	58-60
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	61
	4.1 Tujuan dan Sasaran.....	60-63
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	63-67
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	68-86
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	87-99
BAB VIII	PENUTUP.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.2.1.1	Keadaan Jumlah Pegawai.....	19
2.2.2.1	Jumlah Aset.....	21-25
2.3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	26
2.3.2	Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021.....	27-28
2.4.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	41
2.4.2	Anggaran dan Realisasi Pelayanan.....	42
3.1.1	Identifikasi Permasalahan.....	46-47
3.1.2	Sistem Keamanan Informasi.....	47
3.1.3	Data Sektoral.....	47-50
3.1.4	Data Aspek Pelayanan Umum.....	50-52
3.3.1	Tabel Telaahan Renstra.....	56-57
4.1.1	Tujuan Dinas.....	61
4.1.2	Sasaran Dinas.....	62
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan.....	64-65
5.2	Arah Kebijakan Tahunan.....	65-66
6.1	Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	74-76
6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	77-83
7.1	Indikator Kinerja mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	84
7.2	Indikator Kinerja Program.....	85
7.3	Definisi Operasional, Rumus Perhitungan dan Meta Indikator.....	86-96

DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
2.2.1.1	Keadaan PNS berdasarkan Golongan	20
2.2.2.1	Keadaan PNS berdasarkan Jenis Kelamin.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Struktur Organisasi	11



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan adanya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang termasuk didalamnya dengan akan segera berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2017-2022 di bulan Mei 2022 dan belum akan dilakukan pemilihan kepala daerah sampai dengan tahun 2024 dikarenakan adanya istruksi PILKADA Serentak di Tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Satistik dan Persandian Provinsi Banten yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika, serta Bidang Persandian Statistik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional dan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pemerintah Daerah,

perlunya melakukan Perubahan Renstra Tahun 2023-2026 dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, pada poin 6 (enam) a menyatakan bahwa Gubernur menyusun RKPD Provinsi berpedoman pada RPJPD Provinsi 2005-2025, memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun 2023 serta tahun 2024.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi dapat tercapai. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 s/d 2026.

Ruang Lingkup

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra merupakan bagian dari suatu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan.

Penyusunan Perubahan Rencana Startegis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan visi, misi arah kebijakan dan prioritas pembangunan dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Starategic, dijabarkan rencana kerja tahunan yang selanjutnya menjadi pedooman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD. Dokumen Renstra juga berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881)
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
20. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
 27. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025;
 28. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika;
 30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Banten;
 31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Banten;
 32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten;
34. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
35. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
37. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
38. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 MAKSDUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen perubahan renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian dalam mewujudkan optimalisasi kinerja
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (Empat) tahun kedepan;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

6. Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi internal antar seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian.

Tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2023-2026 adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan yang berada dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 4 (Empat) tahun ke depan, dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), sumber daya yang dimiliki, capaian yang telah dihasilkan dan tantangan yang masih dihadapi serta perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah Provinsi Banten.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan visi, misi dan

program RPJPD, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Banten, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi Banten.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Banten selama 4 tahun.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah. Dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten mengalami perubahan SOTK yang sebelumnya dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten termasuk Dinas Tipe B untuk mewadahi urusannya dengan beban kerja yang sedang dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunya fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- c. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;

- d. Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

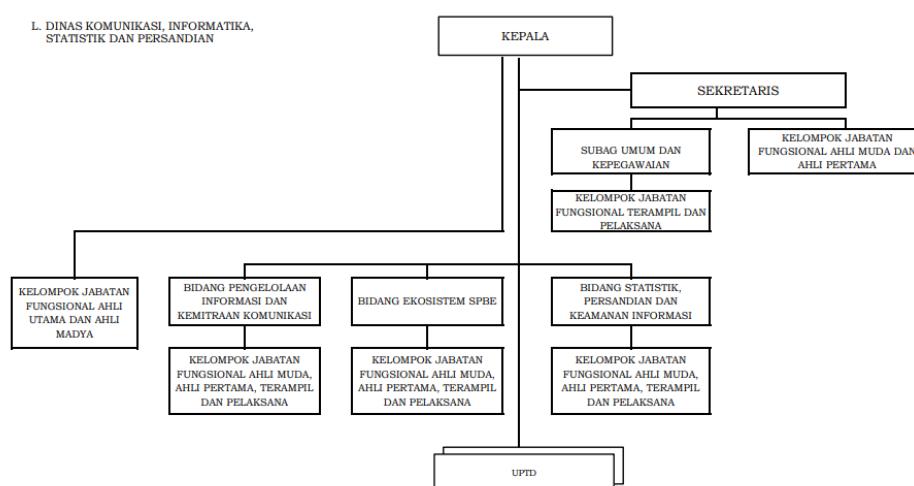
2.1.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah. dijabarkan sebagai berikut :

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi;
- d. Kepala Bidang Ekosistem SPBE;
- e. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi;
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi



2.1.3 Uraian Tugas

Berikut adalah rincian tugas pokok dan fungsi, seluruh komponen dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
- 2) Menetapkan rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan :
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. Pengelolaan Aplikasi Informatika;
 - c. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi; dan
 - d. Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; dan

- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris.
- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian;
 - 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas;
 - 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Dinas;
 - 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
 - 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas;

- 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan dinas;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelengaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 6) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - 7) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Dinas;
 - 8) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Dinas;
 - 9) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas;
 - 10) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
 - 11) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
 - 12) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 13) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 14) Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi
- a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Bidang Ekosistem SPBE

- a. Kepala Bidang Ekosistem SPBE mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Ekosistem SPBE mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a) Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b) Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi.

- a) Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi;
 - c. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN.

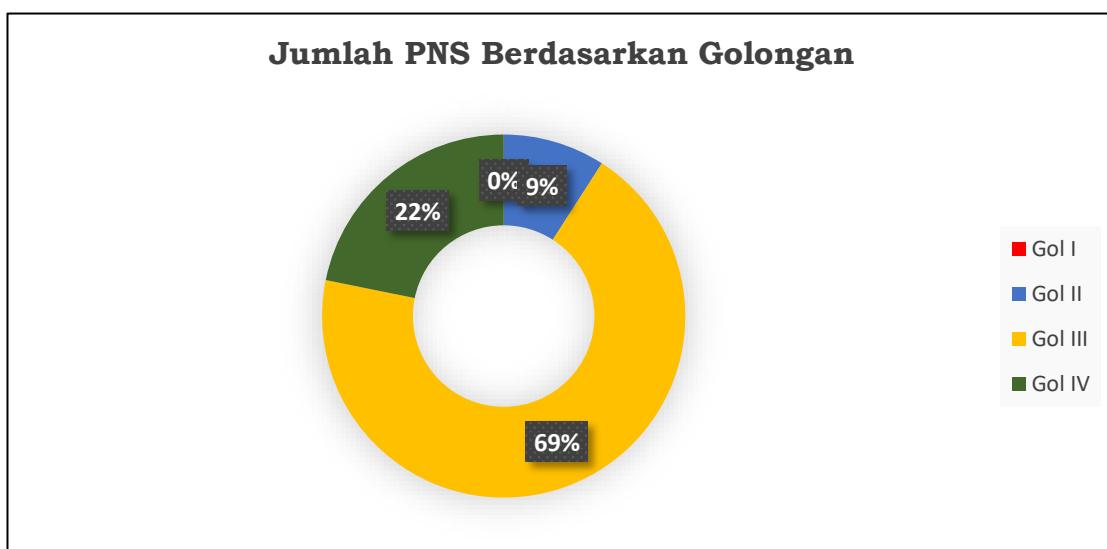
2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didukung oleh 49 Orang ASN, 3 Orang CPNS, 79 Orang Non ASN, 27 Orang Tenaga Pendukung, 21 Orang Tenaga Ahli dan 9 Tenaga Operator.

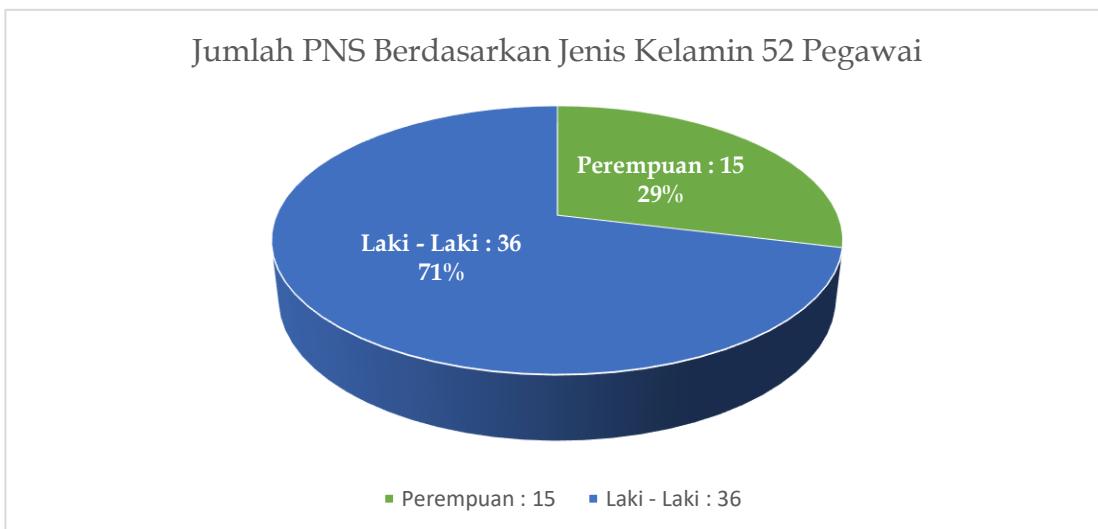
Tabel 2.2.1.1
Keadaan Jumlah Pegawai berdasarkan Status dan Golongan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Periode Februari 2022

No	Status Pegawai	Golongan				Total	%
		I	II	III	IV		
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	5	35	12	49	26,06
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	0	0	3	0	3	1,60
3	Tenaga Honorer	0	0	0	0	79	42,02
4	Tenaga Ahli	0	0	0	0	21	11,17
5	Tenaga Pendukung	0	0	0	0	27	14,36
6	Operator	0	0	0	0	9	4,79
JUMLAH		0	5	38	12	188	100

Grafik 2.2.1.1
Keadaan PNS berdasarkan Golongan Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten



Grafik 2.2.1.2
Keadaan PNS berdasarkan Jenis Kelamin Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung berbentuk asset yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten terdiri dari sarana kantor dan sarana Informasi layanan dengan perincian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2.2.1 Jumlah Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten

No	Nama Barang	Keterangan
1	AC Sentral	14 unit
2	AC Split	68 Unit
3	Acces Point	49 Unit
4	Adaptor	9 Unit
5	Alat Pemadam/Portable	2 Unit
6	Alat Pembantu Kebakaran	5 Unit
7	Alat Penghancur Kertas	8 Unit
8	Amplifier	1 Unit
9	Audio Mixing	1 unit
10	Antena All Band	9 Unit
11	Antena SSB	10 Unit
12	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi (Dinding Partisi Kaca Riben Frame Aluminium)	1 Unit
13	Bangunan Gudung Kantor Permanen (Gedung Diskominfo Prov Banten)	1 Unit
14	Bangunan Gedung Pertemuan Pemanen (Pembangunan Command Center)	1 Unit
15	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen Pembuatan Tiang Baliho)	1 Unit
16	Bangunan Menara Televisi	1 Unit
17	Box Battery	13 Unit
18	Brandkas	3 Unit
19	Cable	51 Unit
20	Camera Electronic (Kamera Digital)	6 Unit
21	Camera Film (Kamera SLR)	5 Unit
22	Camera Vidio (Handycam)	9 Unit
23	Camera View Finder (Camera Indoor dan Outdoor)	16 Unit
24	Camera Photo Micrograph	1 Unit
25	Camera Video (film)	3 Unit
26	Card Reader (Peralatan Mainframe)	6 Unit

27	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	4 Unit
28	CCTV-Camera Control Television System	47 Unit
29	Console Unit (Peralatan Mainframe) Mouse Optical di LPSE)	10 Unit
30	Control Panel	4 Unit
31	Clip on	1 Unit
32	Controller Console PVC	6 Unit
33	CPU (Peralatan Persomal Komputer)	35 Unit
34	Data Patch Panel	8 Unit
35	Digital Camera (Monitoring Transportasi CCTV)	16 Unit
36	Digital Video Effect	1 Unit
37	Dispenser	9 Unit
38	DVD Writer	3 Unit
39	Escape Belt	5 Unit
40	Exhause Fan	2 Unit
41	External	8 Unit
42	External/Portable Hardisk	12 Unit
43	Facsimile	4 Unit
44	Filing Cabinet Besi	51 Unit
45	Filing Cabinet Kayu	1 Unit
46	Finger Printer Time And Attandance Acces Control System	1 Unit
47	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 Unit
48	Frequency Counter	2 Unit
49	Global Positioning System	2 Unit
50	GSM Jammer	2 Unit
51	Handy Cam	6 Unit
52	Handy Talky (HT)	23 Unit
53	Hard Disk	134 Unit
54	Hub	27 Unit
55	Hubbel UTP	22 Unit
56	Ilmu Pengetahuan Umum (Barang Perpustakaan)	284 Unit
57	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA (PJU)	392 Unit
58	jaringan satpas	1 Unit
59	Kabel UTP	27 Unit
60	Keyboard (Peralatan Mainframe)	2 Unit
61	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	10 Unit
62	Kitcen Set	1 Unit
63	Kompor Gas (Alat Dapur)	2 Unit
64	Kontrol Elektronik	10 Unit
65	Kursi Besi/Metal	9 Unit
66	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit
67	Kuri Meja Kerja Pegawai Non Struktural	173 Unit
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 Unit

69	Kursi Kerja Eselon IV	6 Unit
70	Kursi Kerja Eselon iv	10 Unit
71	Kursi Lipat	20 Unit
72	Kursi Rapat	21 Unit
73	Kursi Tamu	2 Unit
74	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon	2 Unit
75	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1 Unit
76	LAN Card	1 Unit
77	Lap Top	35 Unit
78	LCD Projector/Infocus	1 Unit
79	Lemari Besi/ Metal	15 Unit
80	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	26 Unit
81	Lemari Es	9 Unit
82	Lemari Kaca	25 Unit
83	Lemari Kayu	2 Unit
84	Lemari Sorok	1 Unit
85	Lensa Kamera	2 Unit
86	Local Area Network (LAN)	2 Unit
87	Loudspaker	4 Unit
88	Mainframe (Komputer Jaringan)	52 Unit
89	Meja 1/2 Biro	105 Unit
90	Meja Kerja	1 Unit
91	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	40 Unit
92	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 Uniit
93	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14 Unit
94	Meja Komputer	4 Unit
95	Meja Rapat	16 Unit
96	Meja Resepsionis	7 Unit
97	Mesin Bor Batu	1 Unit
98	Mesin Bor Beton	2 Unit
99	Mesin Fotocopy Electronic	2 Unit
100	Mesin Fotocopy Folio	1 Unit
101	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	2 Unit
102	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) (Sarana dan Prasarana Sekretariat KPID Banten)	1 Unit
103	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1 Unit
104	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	3 Unit
105	Mesin Penghitung Uang	1 Unit
106	Microphone Wireless	1 unit
107	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	15 Unit
108	Mobile Modem GSM/CDMA	2 Unit
109	Modem	10 Unit

110	Monitor	27 Unit
111	Multiscan Proyector	7 Unit
112	Note Book	24 Unit
113	Network Cable tester	5 Unit
114	Off Air TV Monitor (TV LED)	4 Unit
115	Overhead Projector	2 Unit
116	Papan Nama Instansi	7 Unit
117	Papan Panel	1 Unit
118	Papan Pengumuman	1 Unit
119	Papan Visual/Papan Nama	10 Unit
120	Partisi (Partisi Ruangan LPSE)	1 Unit
121	PC Unit	126 Unit
122	Peralatan Antena Penerima UHF	24 Unit
123	Personal Computer	17 Unit
124	PesawatbTelephone	1 Unit
125	Poertable Air Conditioner (Alat Pendingin)	22 Unit
126	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film) (DiLPSE)	1 Unit
127	Power Transmitter	6 Unit
128	Printer (Peralatan Personal Komputer)	83 Unit
129	Proteksi Petir Terpadu	13 Unit
130	Rak Besi	4 Unit
131	Rak Peralatan	1 Unit
132	Rak Server	18 Unit
133	Repeater and Transceiver	108 Unit
134	RF Cable	15 Unit
135	Router	276 Unit
136	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit
137	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 Unit
138	Scanner (Universal Tester)	1 Unit
139	Sedan	1 Unit
140	Sepeda Motor	11 Unit
141	Server	114 Unit
142	Storage modul disk (Peralatan Mainframe)	9 Unit
143	Sofa	7 Unit
144	Software	33 Unit
145	Software Conf Off-Line Computer	7 Unit
146	Solar Cell (Tiang Oktagonal)	5 Unit
147	Sound System	1 Unit
148	Stabilisator	1 Unit
149	Stabilizer	10 Unit
150	Station Wagon	2 Unit
151	Switch	12 Unit

152	Switcher Combination	31 Unit
153	Tablet Mechanie (Tablet Apple/Ipad)	2 Unit
154	Tablet PC	9 Unit
155	Tabung Gas	2 Unit
156	Tanah Bangunan Pos Jaga/ Menara Jaga (Tanah Gedung Tower Reapiter Gunung Kencana)	1 Unit
157	Tangga Aluminium	6 Unit
158	Taman Permanen	1 unit
159	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1 Unit
160	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use	72 Unit
161	Tas Laptop Kedap Air Untuk Membawa Laptop	10 Unit
162	Telephone (PABX)	11 Unit
163	Telephone Mobile	3 Unit
164	Televisi	19 Unit
165	Terminal	23 Unit
166	Tool Kit Set	3 Unit
167	Tripod	1 Unit
168	Tripod Camera	3 Unit
169	TV Monitor (Monitoring Transportasi)	4 Unit
170	Uninterruptible Power Supply (UPS)	55 Unit
171	Unit Pemancar UHF Portable	6 Unit
172	Unit Pemancar UHF Transportable	1 Unit
173	Unit Power Supply	1 Unit
174	Video Mixer	1 Unit
175	Video Monitor	5 Unit
176	Video Processor	1 Unit
177	Voice Recorder	3 Unit
178	White Board	6 Unit
179	Wireless	70 Unit
180	Wireless Access Point	305 Unit
181	Wireless Amplifier	1 Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengampu tiga (3) urusan yaitu, Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Bidang Statistik dan Urusan Bidang Persandian. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten pada

periode tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Provinsi Banten

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Nilai)	85	73,35	86,29
2.	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	90	91,70	101,89
		Persentase Sarana dan Prasarana Persandian (Persen)	100	100	100
3.	Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Maturitas Data Base Stratistik Sektoral (Nilai)	100	100	100
4.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nilai)	3,90	3,15	80,77

Tabel 2.3.2
Capaian Indikator Kinerja Program
Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Provinsi Banten

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan : %)	80	100	125
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Penyediaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Satuan: %)	85,08	100	117,54

		Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Satuan: %)	85,08	94,74	111,35
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Database Sektoral (Satuan : %)	75	100	133,33
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi (Satuan : %)	80	80,95	101,19

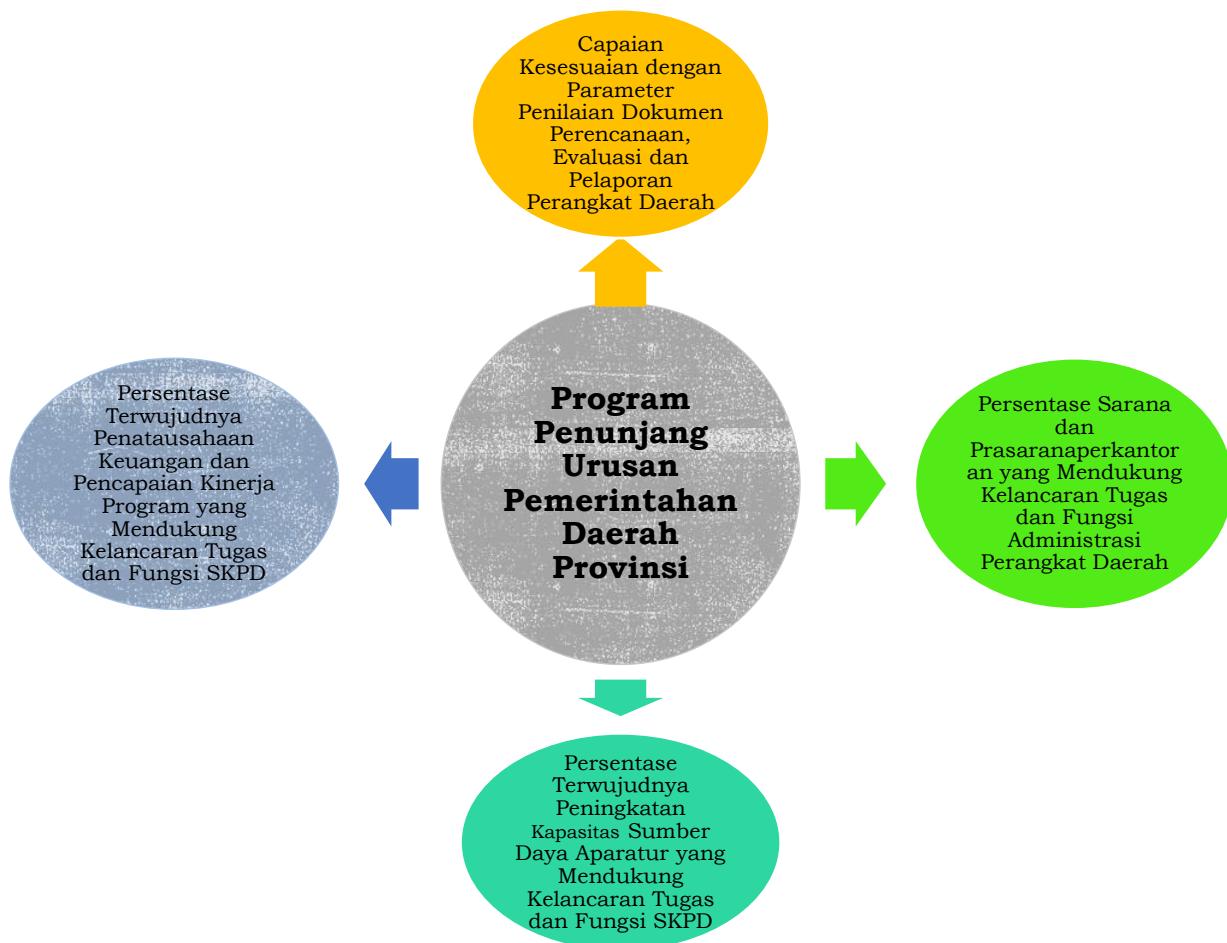
Berikut Penjelasan Capaian Indikator Kinerja

I. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Indikator Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD bertujuan untuk tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien. Untuk mencapai tujuan teraebut maka di tetapkan program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bertujuan untuk tercapainya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat 4 (Empat) Indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini



Penetapan beberapa indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bertujuan agar adanya interpretasi sejauh mana penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan indikator Kinerja Program yang mendukung capaian kinerja yaitu:

1) Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

Indikator Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD bertujuan untuk mengukur capaian pengelolaan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasioanl	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Capaian Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Jumlah Laporan yang Sesuai SAP / Jumlah Dokumen Laporan x 100	100	100	100

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

2) Capaian Kesesuaian Dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Perangkat Daerah

Indikator Capaian Kesesuaian Dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Perangkat bertujuan untuk mengukur Capaian Kesesuaian Dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Perangkat Daerah. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasioanl	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat Daerah yang sesuai parameter/Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat Daerah x 100	100	100	100

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

3) Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah

Indikator Capaian Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah bertujuan untuk mengukur Capaian Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah yang mendukung pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Capaian dukungan Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Jumlah Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran/Jumlah Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran yang tersedia x 100	100	100	100

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

4) Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

Indikator Capaian Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD bertujuan untuk mengukur Capaian Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD dan mendukung pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai:

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Capaian Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mendapat Sertifikat Pada Tahun N/Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan pada Tahun N X 100	100	100	100

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

II. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk Mewujudkan Layanan Informasi Publik yang Transparan dan Partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan program yang mendukung capaian kinerja yaitu:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Program Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik terdapat 1 (Satu) Indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan indikator Kinerja Program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

1) Percentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Capaian Percentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bertujuan untuk mengukur Capaian Percentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dan mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Percentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Percentase capaian pengelolaan komunikasi dan informasi public yang mendukung pencapaian nilai pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik terhadap capaian pengelolaan	Jumlah Pengelolaan Komunikasi dan informasi publik yang mendukung pencapaian nilai pemeringkatan / Capaian Pengelolaan	80	100	125

	komunikasi dan informasi.	Komunikasi dan Informasi x 100			
--	---------------------------	--------------------------------	--	--	--

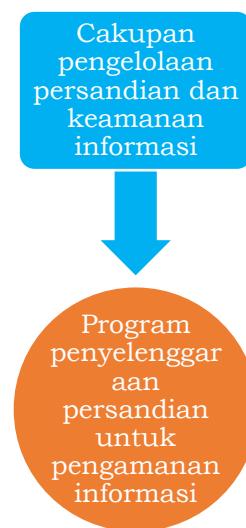
Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 125% melebihi dari target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

III. Persentase Sarana dan Prasarana Persandian

Indikator Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Persandian bertujuan untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di tetapkan program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi terdapat 1 (satu) indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka

ditetapkan indikator Kinerja Program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

1) Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi

Indikator capaian cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi bertujuan untuk mengukur capaian aplikasi di OPD yang memenuhi standar keamanan informasi dan mendukung pencapaian kinerja program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Aplikasi di OPD yang memenuhi standar keamanan Informasi	Jumlah Aplikasi di OPD yang memenuhi Standar Keamanan / Jumlah Aplikasi yang Ada x 100	80	80,95	101,19

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 80,95% dengan capaian 101,19% melebihi dari target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

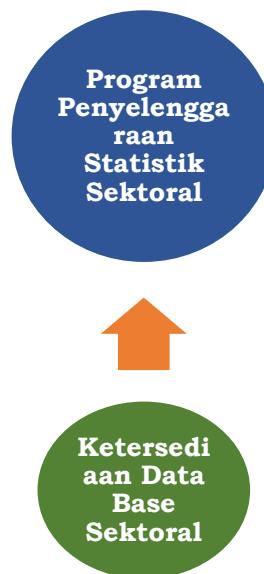
IV. Maturitas Data Base Statistik Sektoral

Indikator Capaian Maturitas Database Statistik Sektoral bertujuan untuk Mewujudkan ketersediaan data statistik sektoral. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di tetapkan program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program penyelenggaraan statistik sektoral bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data satistik sektoral. Program

penyelenggaraan statistik sektoral terdapat 1 (satu) indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan indikator kinerja program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

1) Ketersediaan Database Statistik Sektoral

Indikator capaian ketersediaan database statistik sektoral bertujuan untuk mengukur capaian data dan informasi sektoral yang dipublikasikan, ketersediaan database sektoral dan mendukung pencapaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Ketersediaan database statistik sektoral	Data dan informasi sektoral yang dipublikasikan dan ketersediaan database sektoral	Data dan informasi sektoral yang dipublikasikan / Data statistik sektoral yang ada x 100	75	100	133,33

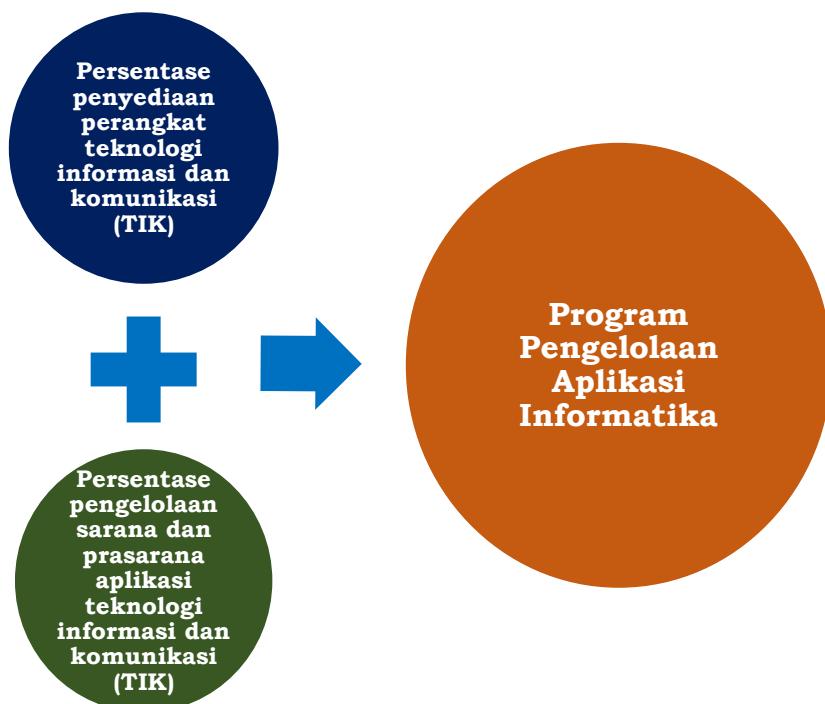
Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 133,33% melebihi dari target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

V. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Indikator Capaian Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di tetapkan program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program pengelolaan aplikasi informatika bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana TIK yang memadai dan berkualitas dan meningkatkan mutu pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program pengelolaan aplikasi informatika terdapat 2 (dua) indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral.

untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan indikator kinerja program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

1) Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Indikator capaian persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bertujuan untuk mengukur persentase jumlah ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mendukung pencapaian pelaksanaan SPBE di provinsi banten terhadap jumlah ketersediaan perangkat TI yang ada dan mendukung pencapaian kinerja program pengelolaan aplikasi informatika. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Persentase jumlah ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mendukung pencapaian pelaksanaan SPBE di provinsi banten terhadap jumlah ketersediaan perangkat TI yang ada	Jumlah perangkat teknologi informasi yang mendukung pencapaian SPBE/ketersediaan perangkat TI yang ada x 100	85,08	100	117,54

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 117,54% melebihi dari target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

2) Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Indikator capaian persentase pengelolaan sarana dan prasarana aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bertujuan untuk mengukur persentase capaian pengelolaan sarana dan prasarana aplikasi TIK yang mendukung pencapaian indeks penilaian SPBE terhadap capaian pengelolaan sarana dan

prasarana aplikasi TIK yang tersedia dan mendukung pencapaian kinerja program pengelolaan aplikasi informatika. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Persentase capaian pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi TIK yang mendukung pencapaian indeks penilaian SPBE terhadap capaian pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi TIK yang tersedia	Jumlah pengelolaan sarpras aplikasi yang mendukung pencapaian indeks SPBE/pengelolaan aplikasi yang ada x 100	85,08	94,74	111,35

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 94,74% dengan capaian 111,35% melebihi dari target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

2.4 PENCAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Pencapaian kinerja dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Provinsi Banten diukur berdasarkan tingkat pencapaian target indikator kinerja Sasaran Perangkat Daerah (IKU) berdasarkan target - target yang telah diamanatkan dalam dokumen Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran perangkat daerah/organisasi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang ditetapkan. Analisis dilakukan melalui

penelaahan terhadap ketercapaian/ketidaktercapaian masing-masing indikator Sasaran (IKU) serta indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) yang terkait atau menjadi instrument pelaksanaan dari indikator Sasaran (IKU) terkait tersebut. Pengukuran capaian kinerja ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan prioritas pembangunan daerah berdasarkan indikator kinerja Sasaran Perangkat daerah (IKU) yang diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten di periode perencanaan tahun 2017- 2022. Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tersebut, dilakukan dengan mengacu pula pada Definisi Operasional (DO) dari masing-masing indikator kinerja yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022.

Tabel berikut ini, menyajikan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program selama periode 2018- 2021 dengan membandingkan target dan capaian kinerja.

Tabel 2.4.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Ratio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)				B	BB	BB			B	BB	BB			100	100	100		
Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten (%)				42,10	61,83	0	0	0	48,61	61,83				115,46	100			
Persentase Sarana dan Prasarana Persandian (%)				0	0	100	100	100	0	0	60,47			0	0	60,47		
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)				88,08	89	89,55	90	90	71,97	80,05	96,01	91,71		81,71	89,94	107,21	101,9	
Maturitas Data Base Statistik Sektoral (Nilai)				0	0	100	100	100	0	0	100	100		0	0	100	100	
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Nilai)				2,60	3,00	3,60	3,90	4,00	2,01	1,83	0	3,15		77,31	61	0	80,77	

Tabel 2.4.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan						
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	49.184.390.000	48.747.710.000	35.552.260.705	35.155.632.736		45.886.136.849	45.359.088.696	34.332.599.127	33.255.915.403	93,29	93,05	96,57	94,60			

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal merupakan hal penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan. Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yaitu dengan menerapkan Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Implementasi metode ini akan membantu organisasi untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Hal yang paling buruk akan terjadi, apabila organisasi mengembangkan kelemahannya karena ketidakmampuannya untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi. Identifikasi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan :

- a) Adanya Komitmen Pimpinan yang tinggi;
- b) Adanya regulasi pendukung bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c) Tersedianya sarana prasarana : Server, Infrastruktur jaringan Pemerintah Provinsi Banten (Jaringan Fiber Optik /kabel bawah tanah, Jaringan wireless) layanan internet 1000 Mbps;
- d) Adanya Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri di luar pemerintah yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik;

- e) Tersedianya aparatur pengelola multimedia, TIK, analis data, jurnalistik;
- f) Tersedianya Sumber Data yang otentik dan valid pada SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota;
- g) Tersedianya website www.bantenprov.go.id;
- h) Tersedianya aplikasi e-Mail Pemerintah Provinsi Banten, aplikasi perkantoran (e-office);
- i) Adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfo Provinsi Banten;
- j) Adanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyebarluasan informasi publik.

2. Kelemahan :

- a) Kurang optimalnya layanan informasi publik (personal, sarana dan konten);
- b) Kurang maksimalnya keamanan jaringan (network security), pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun, Akses jaringan internet hingga ke perdesaan;
- c) Rendahnya pengetahuan publik tentang Keberadaan Komisi Informasi;
- d) Kurangnya jumlah aparatur bidang komunikasi dan informatika

3. Ancaman dan Tantangan

- a. Persaingan global;
- b. SKPD yang menangani komunikasi dan informatika di tingkat Kabupaten/Kota tidak mempunyai nomenklatur yang sama;
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government;
- d. Adanya kesenjangan digital (tidak meratanya) sarana komunikasi dan informatika di daerah perdesaan dan perbatasan;

- e. Kurangnya Komitmen Pimpinan SKPD Prov. Banten, SKPD Kab/Kota terhadap Integrasi Data/Pertukaran Data serta Keterisian Data;
- f. Content digital yang kurang mendidik, sesat dan/atau merusak moral & tatanan sosial masyarakat;
- g. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang penyiaran dan keterbukaan informasi;
- h. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;
- i. Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI;
- j. Keterbatasan anggaran.

4. Peluang

Disamping tantangan tersebut diatas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Adapun beberapa peluang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kemajuan teknologi informasi;
- b. Keinginan masyarakat memperoleh data dan informasi;
- c. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kemkominfo RI);
- d. Adanya partisipasi dan Kemitraan Komunikasi Sosial antar Provinsi, Kab/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat;
- e. Media massa yang sangat berkembang;
- f. Peran strategis KI (Komisi Informasi) dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik;
- g. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain: keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan, sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi melalui pemanfaatan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat untuk meminimalisir kesenjangan tersebut.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 permasalahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Identifikasi Permasalahan Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kinerja pelayanan Publik belum optimal	Belum Optimalnya Capaian Penyelenggaraan SPBE	Rendahnya SDM di Bidang Informatika dan komunikasi Publik
		Belum Optimal Pelayanan informasi publik yang terinformasikan ke masyarakat	Rendahnya Kesadaran OPD atas hak masyarakat dalam mendapatkan informasi
			Belum Optimalnya Penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
			Belum Optimalnya Penerapan Manajemen SPBE
			Belum Optimalnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Belum Optimalnya Tata Kelola SPBE
			Belum Optimal Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas

			Belum Optimal Monitoring dan evaluasi SPBE
2.	Belum Optimalnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Belum Optimalnya Ketersediaan Database Statistik Sektoral	Belum Optimalnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral
3	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Persandian	Belum Optimalnya Cakupan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan informasi belum Optimal

**Tabel 3.1.2 SISTEM KEAMANAN INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN**

No	Keamanan	Produk Keamanan	Keterangan
1	Firewall	Fortigate	Fortigate sebagai perangkat yang menjamin keamanan jaringan secara keseluruhan sekaligus berfungsi sebagai gateway dan router
2	VPN (Virtual Private Network)	Pritunl	VPN adalah sebuah cara aman untuk mengakses local area network yang berada pada jangkauan dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi dengan enkripsi
3	Git Analyzer	Blackfire	Aplikasi untuk mencari celah pada coding di suatu program

**Tabel 3.1.3 DATA SEKTORAL
BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN**

No	Jenis Data/Barang	Jumlah	Lokasi	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jaringan FO	13.000 Meter	Area KP3B	-	-	-	-	13.000 Meter	-
2	Jaringan Wireless	292 Unit	Area KP3B	-	-	-	292 Unit	-	-

3	BTS (Base Transceiver Station) milik Diskominfo	3 Unit	Gunung Karang Kab. Pandeglang, Gunung Kencana Kab. Lebak, Diskominfo (KP3B)	3 Unit	-	-	-	-	-
4	BTS Umum (Base Transceiver Station)	4000 unit		-	-	-	-	-	4000 unit
5	Data Center	3 Unit	Diskominfo, Cyber Data Center International Cyber Building 1 Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. 12710 Indonesia, Batam Techno Park Jl. Tanjung Bemban Citra Lautan Teduh No. 18 Batu Besar	3 Unit	-	-	-	-	-
6	Server	25 Unit	Diskominfo, Cyber Data Center International Cyber Building 1 Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. 12710 Indonesia	-	1 unit	11 unit	-	-	-
7	NOC (Network Operations Center)	1 Ruangan	Diskominfo	-		1 unit	-	-	-
8	Command Center	3 Ruangan	Diskominfo, Ruang Rapat Gubernur (Setda Provinsi Banten), Ruang Rapat Wagub (Setda Provinsi Banten)	-	-	-	-	-	3 ruangan
9	Access Point	372 Unit	Access Point Ruang Rapat untuk di Lingkungan OPD Provinsi Banten	-	45	50	55	150	72
10	Firewall	7 unit	Diskominfo , Cyber Data Center International Cyber Building 1 Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. 12710 Indonesia	-	1 unit	-	3 Unit	1 Unit	2 Unit
11	Wireless Indoor	30 Unit	Area KP3B	-	-	-	20 Unit	-	10 unit
12	Switch	100 Unit	Area KP3B	-	-	-	4 unit	-	4 unit
13	NAS (Network Area Storage)	1 Unit	Data Center	-	-	-	-	-	1 Unit

14	CCTV	18 Unit	Pertigaan Setda, Gerbang 2 (Depan DPRD), Bunderan Depan Kominfo, Bunderan Depan PTSP, Gerbang 1 (Depan Setda), Depan BKKBN, Pakupatan, Gerbang 3 (Kemenag), Perempatan Boru, Patung, Alun-alun Serang, Gedung BPKAD, Gedung PUPR, Gedung PTSP, Gedung DPRD, Gedung DINDIK	-	3	-	1 unit	7	7
15	Bandwith	1.300 MBPS	OPD Luar dan Dalam KP3B, Banten Lama, Musium Banten, RSUD Banten, Komisi Informasi dan CCTV	-	-	-	-	-	1.300 MBPS
16	Nama Domain Resmi Pemerintah Prov. Banten	1 Domain 63 Sub Domain	Diskominfo	-	-	-	-	1 Domain 63 Sub Domain	-
17	Email	4.884 Email	Diskominfo		-	-	-	4.884 Email	-
18	Personal Komputer Lainnya	12 Unit	Diskominfo						12 Unit
19	PC Unit	23 Unit	Diskominfo						23 unit
20	Rooter	2 Unit	Diskominfo			2 unit	1 unit		2 unit
21	Peralatan computer Lainnya Dimencion	263 unit	Diskominfo		-	-	-	-	263 unit
22	Peralatan jaringan Lainnya Ubiquiti	91 unit	Diskominfo	-		-	-	-	91 unit
23	Peralatan jaringan Lainnya Ubiquiti 16 port rg	91 unit	Diskominfo	-		-	-	-	91 unit
24	Peralatan jaringan	5 unit	Diskominfo	-		-	-	-	5 unit

	Lainnya Tiang oktagonal								
25	Peralatan jaringan Lainnya ciscosuitch	4 Unit	Diskominfo	-	-	-	-	-	4 Unit
26	Peralatan jaringan Lainnya enclosure	4 Unit	Diskominfo	-	-	-	-	-	4 Unit
27	Penyimpanan Website	43 Hosting	Diskominfo	-	-	-	-	43 Hosting	-

Tabel 3.1.4 DATA ASPEK PELAYANAN UMUM

No	Kompomen data	Satuan	Time series						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Layanan telepon seluler*								
A.	Jumlah desa terlayani**								
-	Kab Pandeglang	Desa	-	-	-	-	338	336	-
-	Kab Lebak	Desa	-	-	-	-	341	341	-
-	Kab Tangerang	Desa	-	-	-	-	274	274	-
-	Kab Serang	Desa	-	-	-	-	325	326	-
-	Kota Tangerang	Desa	-	-	-	-	104	104	-
-	Kota Cilegon	Desa	-	-	-	-	43	43	-
-	Kota Serang	Desa	-	-	-	-	67	67	-
-	Kota Tangerang Selatan	Desa	-	-	-	-	54	54	-
B	Jumlah desa belum terlayani**								
-	Kab Pandeglang	Desa	-	-	-	-	1	2	-
-	Kab Lebak	Desa	-	-	-	-	-	2	-
-	Kab Tangerang	Desa	-	-	-	-	-	-	-
-	Kab Serang	Desa	-	-	-	-	1	-	-
-	Kota Tangerang	Desa	-	-	-	-	-	-	-
-	Kota Cilegon	Desa	-	-	-	-	-	-	-
-	Kota Serang	Desa	-	-	-	-	-	-	-
-	Kota Tangerang Selatan	Desa	-	-	-	-	-	-	-
C	Jumlah BTS**								
-	Kab Pandeglang	Unit	15	68	68	63	63	63	99
-	Kab Lebak	Unit	298	298	308	346	361	358	369
-	Kab Tangerang	Unit	401	401	769	770	1371	1371	1371
-	Kab Serang	Unit	12	2	11	25	26	15	158
-	Kota Tangerang	Unit	0	171	216	125	133	59	60
-	Kota Cilegon	Unit	1	11	6	8	24	16	21
-	Kota Serang	Unit	3	6	1	34	15	17	4
-	Kota Tangerang Selatan	Unit	117	41	7	0	18	42	121
2	Layanan telepon kabel*								
A	Jumlah desa terlayani**								
-	Kab Pandeglang	Desa	48	51	55	63	74	197	199
-	Kab Lebak	Desa	146	159	162	171	178	192	183
-	Kab Tangerang	Desa	84	90	95	106	115	223	97
-	Kab Serang	Desa	46	49	50	53	55	226	252
-	Kota Tangerang	Desa	-	-	-	-	-	99	-

-	Kota Cilegon	Desa	55	56	56	57	58	42	43
-	Kota Serang	Desa	18	19	20	20	22	60	65
-	Kota Tangerang Selatan	Desa						54	
B	Jumlah jaringan terpasang**								
-	Jumlah sambungan rumah tangga**	Sambungan	38.38	36.57	41.72	46.58	51.449	67.453	122.30
		an	7	6	1	4			4
-	Jumlah sambungan perkantoran**	Sambungan	6.440	6.170	6.141	5.982	5.489	5.161	4.461
-	Jumlah sambungan swasta/dunia usaha**	Sambungan	6.855	6.915	6.907	6.821	7.462	7.510	13.809
3	Layanan internet*								
A	Jumlah desa terlayani								
-	Kab Pandeglang	Desa	48	51	55	63	74	197	199
-	Kab Lebak	Desa	146	159	162	171	178	192	183
-	Kab Tangerang	Desa	84	90	95	106	115	223	97
-	Kab Serang	Desa	46	49	50	53	55	226	252
-	Kota Tangerang	Desa	-	-	-	-	-	99	-
-	Kota Cilegon	Desa	55	56	56	57	58	42	43
-	Kota Serang	Desa	18	19	20	20	22	60	65
-	Kota Tangerang Selatan	Desa	-	-	-	-	-	54	-
B	Jumlah desa belum terlayani								
-	Kab Pandeglang	Desa	297	294	290	282	271	142	140
-	Kab Lebak	Desa	193	180	177	168	161	153	160
-	Kab Tangerang	Desa	241	235	230	219	210	51	9
-	Kab Serang	Desa	60	57	56	53	51	99	73
-	Kota Tangerang	Desa	-	-	-	-	-	5	-
-	Kota Cilegon	Desa	11	10	10	9	8	1	0
-	Kota Serang	Desa	25	24	23	23	21	6	1
-	Kota Tangerang Selatan	Desa	-	-	-	-	-	0	-
4	Pos*								
A	Jumlah kantor pos**								
-	Kab Pandeglang	Unit	1	1	1	1	1	1	1
-	Kab Lebak	Unit	1	1	1	1	1	1	1
-	Kab Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0	1
-	Kab Serang	Unit	0	0	0	0	0	0	0
-	Kota Tangerang	Unit	1	1	1	1	1	1	1
-	Kota Cilegon	Unit	1	1	1	1	1	1	1
-	Kota Serang	Unit	1	1	1	1	1	1	1
-	Kota Tangerang Selatan	Unit	1	1	1	1	1	1	1
B	Jumlah kantor pos pembantu**								
-	Kab Pandeglang	Unit	9	9	9	9	9	9	9
-	Kab Lebak	Unit	9	9	9	9	10	10	10
-	Kab Tangerang	Unit	24	25	25	23	22	22	14
-	Kab Serang	Unit	14	14	14	15	15	15	15
-	Kota Tangerang	Unit	23	23	21	19	17	17	14
-	Kota Cilegon	Unit	5	5	5	5	5	5	5
-	Kota Serang	Unit	3	3	3	3	3	2	2
-	Kota Tangerang Selatan	Unit	11	11	11	11	11	11	14
C	Jumlah desa terlayani pos keliling**								
-	Kab Pandeglang	Desa	339	339	339	339	339	339	766
-	Kab Lebak	Desa	345	345	345	345	345	345	741

-	Kab Tangerang	Desa	204	204	204	204	199	199	603
-	Kab Serang	Desa	268	268	268	268	268	268	537
-	Kota Tangerang	Desa	104	104	104	104	104	104	104
-	Kota Cilegon	Desa	43	43	43	43	43	43	201
-	Kota Serang	Desa	67	67	67	67	67	67	134
-	Kota Tangerang Selatan	Desa	54	54	54	54	54	54	107
5	Radio*								
A	Jumlah stasiun radio**								
-	Jumlah stasiun radio pemerintah	Stasiun	-	-	-	-	-	5	6
-	Jumlah stasiun radio swasta	Stasiun		-	-	-	-	47	48
B	Cakupan layanan*								
-	Jumlah kecamatan terlayani	Kecamatan	-	-	-	-	-	137	137
-	Jumlah kecamatan belum terlayani	Kecamatan	-	-	-	-	-	18	18
6	Televisi*								
A	Jumlah stasiun televisi**								
-	Jumlah stasiun televisi pemerintah	Stasiun	-	-	-	-	-	0	0
-	Jumlah stasiun televisi swasta	Stasiun	-	-	-	-	-	13	16
B	Cakupan layanan*								
-	Jumlah kecamatan terlayani	Kecamatan	-	-	-	-	-	150	150
-	Jumlah kecamatan belum terlayani	Kecamatan	-	-	-	-	-	5	5
7	Media cetak*								
A	Surat kabar nasional*								
-	Jumlah kecamatan terlayani	Kecamatan	-	-	0	126	126	126	-
-	Jumlah kecamatan belum terlayani	Kecamatan	-	-	0	0	0	0	-
B	Surat kabar lokal*								
-	Jumlah kecamatan terlayani	Kecamatan	-	-	0	126	126	126	-
-	Jumlah kecamatan belum terlayani	Kecamatan	-	-	0	0	0	0	-
8	Jumlah data statistik yang tersedia	Jenis data	-	-	183	183	183	183	-
9	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	Jenis data	-	-	183	183	183	183	-
10	Jumlah data statistik sektoral yang di publikasikan	Jenis data	-	-	183	183	183	183	-
11	Jumlah aplikasi provinsi yang dalam kategori aman	Applikasi	-	-	-	-	-	63	-
12	Jumlah aplikasi provinsi yang dalam kategori tidak aman	Applikasi	-	-	-	-	-	12	-

3.2 Telahaan Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program startegis tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2023-2026. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 adalah:

**“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA,
BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA”**

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi, dan misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi adalah Misi Ke-Empat Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa, dengan tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan sasarnya adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya Layanan informasi Publik yang Transparan dan Partisipatif;
3. Meningkatnya Penerapan SPBE;
4. Meningkatnya kualitas ketersediaan data statistik sektoral;
5. Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi.

Mengacu pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten melaksanakan :

1. Urusan Pemerintahan dengan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - a) Urusan Komunikasi dan Informatika dengan program :
 1. **Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.**
 2. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.**
 - b) Urusan Statistik dengan Program **Penyelenggaraan Statistik Sektoral.**
 - c) Urusan Persandian dengan **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.**

3.3 Telahaan RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika empat tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020-2024 akan berfokus

membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan Pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi digital;
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan diatas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatkan cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatkan konektivitas layanan POS;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang POS, telekomunikasi dan Informatika;
6. Meningkatkannya pemanfaatan TIK disektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;

9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kemenkominfo, yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, berikut ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat, tantangan ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 Telahaan Renstra

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten /Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional - Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database OPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo - Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan - Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan muatan SPBE - Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK 	
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimal Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada aturan baku yang mengatur urusan bidang Komunikasi, 	

			<p>Informatika, Statistik dan Persandian seperti website, hosting dan colocation dll</p> <p>- Belum optimalnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi</p>	
--	--	--	---	--

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Banten telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pearaturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Banten.

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Rencana implementasi program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Banten selama 4 tahun yang akan datang (2023 - 2026) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Banten.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2023-2026 antara lain :

1. Implementasi SPBE

Implementasi SPBE yang mulai berkembang di Provinsi Banten dalam lima tahun terakhir dinilai oleh pihak pusat sebagai provinsi yang berhasil dengan baik. Namun secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi SPBE semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia

2. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (source), saluran (channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang top-down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi

yang bottom-up adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Paradigma baru komunikasi sosial ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi sosial yang tersebar di masyarakat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten pada tahun 2023-2026 sebagai perumusan fokus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja tiap tahunnya. Adapun tujuan daerah dari RPD 2023-2026 yaitu :

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Untuk mewujudkan tujuan daerah pada RPD 2023-2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023 – 2026 melalui pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan yang akan dicapai.

Adapun tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023-2026 yaitu:

1. Mewujudkan Layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif serta Mewujudkan Peningkatan dan Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan;
2. Mewujudkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Perangkat Daerah;

Adapun keterkaitan antara tujuan daerah dengan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1.1 Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Misi : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

TUJUAN DAERAH / TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		
		(1)	(2)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi		
Mewujudkan Layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif serta Mewujudkan Peningkatan dan Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan;			
Mewujudkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral;			
Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi;			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Perangkat Daerah.			

4.2 SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah sebagai berikut

⊕ Meningkatnya Penyelenggaraan reformasi birokrasi

Sedangkan sasaran RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

2. Meningkatnya layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif.
3. Meningkatnya penerapan SPBE.
4. Meningkatnya kualitas ketersediaan data statistik sektoral.
5. Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi.

Adapun sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1.2 berikut :

Tabel 4.1.2 Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Misi : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

NO.	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP perangkat daerah (Nilai)	74	76	78	80
		Meningkatnya layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif	Indeks keterbukaan informasi publik (Nilai)	91.80	91.90	92.10	92.15
		Meningkatnya penerapan SPBE	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (Nilai)	3.25	3.35	3.45	3.55
		Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Maturitas data base statistik sektoral (%)	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi	Indeks keamanan informasi (KAMI) (Score)	273	450	456	583



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Strategi pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

■ Meningkatkan Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan misi ke 4 (Empat) RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa” maka dilakukan berlandaskan 4 (Empat) Strategi pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Optimalisasi keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TIK Guna Mendukung Layanan SPBE
3. Meningkatkan Koordinasi Penyediaan data statistik sektoral
4. Optimalisasi Manajemen Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi
5. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dari satu strategi pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 dan ke empat strategi Renstra Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 di atas menjadi rumusan untuk mencapai

keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan.

Arah Kebijakan pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengelola Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
2. Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana TIK Untuk Mendukung Pencapaian SPBE;
3. Melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan Mempedomani Prinsip SDI;
4. Melaksanakan Peningkatan Manajemen Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi;
5. Melaksanakan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar OPD;
6. Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Visi : Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa				
Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Bersih dan Berwibawa				
Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif serta Peningkatan dan Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan	Meningkatnya Layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif	Indeks keterbukaan informasi publik	Optimalisasi keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Mengelola Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Penerapan SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TIK Guna Mendukung Layanan SPBE	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana TIK Untuk Mendukung Pencapaian SPBE
Mewujudkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data base statistik sektoral	Meningkatkan Koordinasi Penyediaan data statistik sektoral	Melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan

				Mempedomani Prinsip SDI
Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Optimalisasi Manajemen Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi	Melaksanakan Peningkatan Manajemen Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi
				Melaksanakan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar OPD
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 5.2 Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Provinsi Banten 2023 – 2026

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	Tahun 2024	2025	2026
Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi SPBE.	Peningkatan kualitas layanan SPBE.	Optimalisasi Penerapan SPBE	
Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi	Melaksanakan peningkatan pelayanan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik	Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
Melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan serta Penyebarluasan	Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya	Melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan serta Penyebarluasan data statistik sektoral	Penyediaan data dan informasi berkualitas.

data statistik sektoral			
Melaksanakan Peningkatkan Manajemen Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi	Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Banten	Melaksanakan Peningkatkan Manajemen Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi	Melaksanakan Peningkatkan Manajemen Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN DAN INDIKATIF

Rencana program kegiatan dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian provinsi banten mengacu pada Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta keputusan menteri dalam negeri 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemukhtarihan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Rencana program tersebut adalah :

- 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.**
- 2. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.**
- 3. Program pengelolaan aplikasi informatika.**
- 4. Program penyelenggaraan statistik sektoral.**
- 5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.**

dari 5 program tersebut di atas mencakup 14 kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut :

➤ **Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi bidang urusan pemerintah fungsi penunjang;**

Indikator Kinerja :

1. Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi memiliki 8 kegiatan sebagai berikut :

I. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd;

3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd;
4. Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd;
5. Koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd;
6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd;
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah.

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
3. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd;
4. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd;
5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd;
6. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
7. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd;
8. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

III. Administrasi Barang Milik Daerah

1. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah skpd;
2. Pengamanan barang milik daerah skpd;
3. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd;

IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
2. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
3. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
4. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;

5. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;

V. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Penyediaan peralatan rumah tangga;
4. Penyediaan bahan logistik kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan bahan/material;
7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
8. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD;
9. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.

VI. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

1. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
2. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
3. Pengadaan mebel;
4. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

VII. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

VIII. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
3. Pemeliharaan mebel
4. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
5. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
6. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

➤ **Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**

Indikator Kinerja :

1. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah;
2. Persentase opd yg mencapai katagori informatif.

Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik memiliki 1 kegiatan sebagai berikut :

I. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi

1. Monitoring opini dan aspirasi publik;
2. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
3. Pengelolaan media komunikasi publik;
4. Pelayanan informasi publik;
5. Kemitraan dengan pemangku kepentingan;
6. Manajemen komunikasi krisis;
7. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

8. Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah;
9. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
10. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi.

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**

Indikator Kinerja :

1. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika memiliki 2 Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

1. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi;
2. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi;
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;

7. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas;
9. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
10. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

A. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Indikator Program :

1. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Program penyelenggaraan statistik sektoral memiliki 1 Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral;
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
5. Pengembangan Infrastruktur;
6. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

A. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Indikator Program :

1. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi memiliki 2 Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi.

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi.

1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel 6.1
Program Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

No	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan (output)
1	2	3	4	5
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
			Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100

			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
			Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

				Pemerintahan Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
2	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub Kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
		Persentase opd yg mencapai katagori informatif		

3	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub Kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub Kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
4	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah OPD selama kurun waktu yang sama dikali 100

5	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
			Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100

Tabel 6.2
**Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026**

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI		
			2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RESTRA PERANGKAT DAERAH					
			TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARG ET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	Persen	100		100		100		100		100,00					
	Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF	Persen	39,39		48,48		57,58		66,67		66,67					
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100%	7.800.000.000	100%	7.500.000.000	100%	7.500.000.000	100%	7.600.000.000		7.600.000.000				
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	384.325.000	12	384.325.000	12	384.325.000	12	384.325.000	12	384.325.000				
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000				
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	14	1.000.000.000	14	800.000.000	14	800.000.000	14	900.000.000	14	900.000.000				
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	400.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000				
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	5	2.100.000.000	5	2.100.000.000	5	2.100.000.000	5	2.100.000.000	5	2.100.000.000				
Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	10	130.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000				
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Dokumen	150	100.000.000	200	100.000.000	250	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000				
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	12	3.000.200.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000				
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasiin Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	15	85.475.000	15	65.675.000	15	65.675.000	15	65.675.000	15	65.675.000				

Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Percentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Person	90,91	17.253.415.281	93,94	15.743.485.281	96,97	21.077.371.000	100	14.800.178.000	100	14.800.178.000
	Percentase Layanan Publik yang Disediakan Secara Online dan Terintegrasi	Person	100	5.197.137.719	100	4.547.137.719	100	5.200.000.000	100	5.100.000.000	100	5.100.000.000
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Person	100%	17.253.415.281	100%	15.743.485.281	100%	21.077.371.000	100%	14.800.178.000	100%	14.800.178.000
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Domain	1	14.200.000	1	14.000.000	1	20.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	2	110.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	2	Rp85.000.000	2	Rp85.000.000
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	Unit (33 OPD)	17.129.215.281	Unit (33 OPD)	15.629.485.281	Unit (33 OPD)	20.907.371.000	Unit (33 OPD)	14.701.178.000	Unit (33 OPD)	14.701.178.000
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		100%	5.197.137.719	100%	4.547.137.719	100%	5.200.000.000	100%	5.100.000.000		5.100.000.000
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	8	180.000.000	5	170.000.000	5	180.000.000	5	180.000.000	5	180.000.000
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	25.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	2	1.000.000.000	3	900.000.000	3	1.000.000.000	3	937.840.500	3	937.840.500
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1 (Dokumen Penyelenggaraan di Kota Serang + SMA&SMK)	913.690.219	2 (Dokumen Penyelenggaraan di Kota Serang & Kab. Serang)	702.137.719	5 (Dokumen Penyelenggaraan di Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang)	916.552.500	8 (Dokumen Penyelenggaraan di Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang)	900.000.000	8 (Dokumen Penyelenggaraan di Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang)	900.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	PD	39	983.159.500	39	900.000.000	39	983.159.500	39	983.159.500	39	983.159.500	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	8	920.428.000	8	900.000.000	8	920.428.000	8	900.000.000	8	900.000.000	
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	200.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	15	350.000.000	15	250.000.000	15	350.000.000	15	350.000.000	15	350.000.000	
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	1	150.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	449.860.000	1	400.000.000	1	449.860.000	1	449.000.000	1	449.000.000	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Percentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Per센	100%	1.400.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Percentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Per센	100%	1.400.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	12	850.000.000	12	730.000.000	12	635.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	50	150.000.000	100	150.000.000	100	120.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	100.000.000	1	80.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	50	150.000.000	50	150.000.000	50	120.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	5	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Per센	54,60	3.500.000.000	64,6	2.200.000.000	74,60	2.800.000.000	84,60	2.900.000.000	84,60	2.900.000.000	

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Percentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100%	3.500.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.700.000.000	100%	2.800.000.000	100%	2.800.000.000
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	7	100.000.000	2	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	0	-	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	4	3.300.000.000	4	1.990.000.000	4	2.470.000.000	4	2.570.000.000	4	2.570.000.000
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	PD	33	100.000.000	35	80.000.000	37	100.000.000	39	100.000.000	39	100.000.000
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Percentase ketercapaian Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persen	0	-	0	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	PD	0	-	0		13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000
Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Percentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (%)	Persen	100	22.669.874.000	100	21.816.268.000	100	22.606.831.000	100	23.531.923.000	100	23.531.923.000
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Percentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000
Penyusunan Ketercapaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	293.508.000	2	293.508.000	2	293.508.000	2	293.508.000	2	293.508.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	15.800.000	2	15.800.000	2	15.800.000	2	15.800.000	2	15.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	15.800.000	2	15.800.000	2	15.800.000	2	15.800.000	2	15.800.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	10.800.000	2	10.800.000	2	10.800.000	2	10.800.000	2	10.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	10.800.000	2	10.800.000	2	10.800.000	2	10.800.000	2	10.800.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	104.153.000	12	104.153.000	12	104.153.000	12	104.153.000	12	104153000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	49.139.000	5	49.139.000	5	49.139.000	5	49.139.000	5	49.139.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	PerSEN	100	13.980.301.000	100	14.676.316.000	100	15.407.132.000	100	16.179.489.000	100	16.179.489.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	52	13.521.811.000	52	14.189.316.000	53	14.915.132.000	54	15.687.489.000	54	15.687.489.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	362.490.000	1	370.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	43.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	10.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	8.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18	15.000.000	18	30.000.000	18	35.000.000	18	35.000.000	18	35.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PerSEN	100	45.000.000									
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	PerSEN	100	100.000.000									
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	54.000.000	3	54.000.000	3	54.000.000	3	54.000.000	3	54.000.000	

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100	884.673.000	100	984.673.000	100	1.094.420.000	100	1.297.155.000	100	1.297.155.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	220.000.000	1	240.000.000	1	250.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	250.000.000	12	250.000.000	12	260.000.000	12	260.000.000	12	260.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	100.000.000	12	120.000.000	12	150.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	174.583.000	12	234.673.000	12	279.420.000	12	402.155.000	12	402.155.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	25.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	2.597.000.000	100	800.000.000	100	700.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	1	350.000.000	0	-	0	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Paket	0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	77	925.953.300	15	370.000.000	10	250.000.000	30	390.000.000	25	390.000.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	19	1.611.046.700	4	100.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Per센	100	3.662.900.000	100	3.710.279.000	100	3.760.279.000	100	3.860.279.000	100	3.860.279.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	846.839.480	12	894.218.480	12	944.218.480	12	1.044.218.480	12	1.044.218.480		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.816.060.520	12	2.816.060.520	12	2.816.060.520	12	2.816.060.520	12	2.816.060.520		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Per센	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	41.000.000	1	41.000.000	1	41.000.000	1	41.000.000	1	41.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	480.000.000	21	480.000.000	21	480.000.000	21	480.000.000	21	480.000.000		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	17	10.000.000	17	10.000.000	17	10.000.000	17	10.000.000	17	10.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	266	219.000.000	266	319.000.000	266	319.000.000	266	369.000.000	266	369.000.000		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
				57.820.427.000		53.016.891.000		60.234.202.000		55.232.101.000		55.232.101.000		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai corong semua informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah Provinsi Banten dalam 4 tahun ke depan memiliki posisi yang strategis. Indikator kinerja Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023-2026.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	91,70	91,75	91,80	91,90	92,10	93,05	93,05	
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,15	3,20	3,25	3,35	3,45	3,55	3,55	
3.	Persentase ketersediaan data base statistik sektoral	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Score	0	0	273	450	456	583	583	

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
1.1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	NA	0	100	100	100	100	100	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
2.1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100
2.2	Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF	%	0	0	39,39	48,48	57,58	66,67	66,67	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									
3.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	%	0	0	90,91	93,94	96,97	100	100	100
3.2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	0	0	100	100	100	100	100	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
4.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
4.1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	0	0	54,60	64,60	74,60	84,60	84,60	

7.3 DEFINISI OPERASIONAL, RUMUS PERHITUNGAN DAN META INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	META DATA INDIKATOR (DO)	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Percentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	Jumlah masyarakat yang memahami pesan informasi publik yang disebarluaskan dibagi dengan jumlah masyarakat yang menjadi target sasaran penyebarluasan informasi publik selama kurun waktu yang sama dikali 100	jumlah masyarakat yang memahami pesan informasi publik yang disebarluaskan/jumlah masyarakat yang menjadi target sasaran penyebarluasan informasi publik x 100
	Percentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF	Jumlah OPD yg mencapai katagori INFORMATIF berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Banten dibagi dengan Jumlah OPD selama kurun waktu yang sama dikali 100	Jumlah OPD yg mencapai katagori INFORMATIF berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Banten / Jumlah OPD x 100
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub Kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= $(\sum \% \text{ Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi} / \sum \text{ Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pemantauan Isu Publik di media masa dan media sosial, pengumpulan pendapat umum, pemantauan aduan masyarakat serta menevaluasi dan pemilihan isu publik.	$\sum \text{ Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik}$
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Banyaknya Materi atau Konten Komunikasi Publik untuk dipublis pada Media Komunikasi Publik seperti media cetak, media penyiaran, media daring, media sosial, media luar ruang dan komunikasi tatap muka	$\sum \text{ Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik}$
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Banyaknya Dokumen diseminasi informasi publik pada media komunikasi publik	$\sum \text{ Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik}$

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Banyaknya Dokumen pelaksanaan fungsi PPID dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Σ Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Banyaknya Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud adalah : kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional, komunitas pembuat konten positif dan Kelompok strategis lainnya yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi Informasi Publik.	Σ Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Banyaknya Dokumen penanganan isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah	Σ Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Komunikasi Publik dan penyediaan dan pemberian konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik. SDM Komunikasi Publik Yaitu : PPID, pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat dan jabatan komunikasi publik lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah	Σ SDM Komunikasi Publik yang mengikuti Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada Komisi Informasi	Σ Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasiakan Informasi Program atau Kebijakan	Banyaknya Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasiakan Informasi Program atau Kebijakan	Σ Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasiakan Informasi Program atau Kebijakan
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Banyaknya Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Σ Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi yang disediakan
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Percentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dibagi dengan jumlah seluruh OPD selama kurun waktu yang sama dikali 100	$\Sigma (OPD \ yang \ terhubung \ dengan \ akses \ internet \ yang \ disediakan \ oleh \ Dinas \ Komunikasi, \ Informatika, \ Statistik \ dan \ Persandian \ dibagi \ Jumlah \ OPD) \times 100$
	Percentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi dengan jumlah layanan publik yang harus ada selama kurun waktu yang sama dikali 100	$(\Sigma (Layanan \ Publik \ yang \ diselenggarakan \ secara \ online \ dan \ terintegrasi) \ dibagi \ \Sigma (Layanan \ Publik \ yang \ harus \ ada)) \times 100$

Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub Kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	$= \sum \% \text{ Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi} / \sum \text{Subkegiatan yang diampu} \times 100$
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Nama Domain yang di daftarkan dan sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\sum \text{Nama Domain yang di daftarkan}$
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Banyaknya Dokumen Penatalaksanaan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	$\sum \text{Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi}$
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Banyaknya OPD yang terhubung oleh akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	$\sum \text{OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo}$
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub Kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	$= \sum \% \text{ Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi} / \sum \text{Subkegiatan yang diampu} \times 100$
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Banyaknya Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	$\sum \text{Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi}$
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Banyaknya Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	$\sum \text{Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik}$
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Banyaknya Pusat Data yang dikelola Daerah	$\sum \text{Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola}$
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Banyaknya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	$\sum \text{Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah}$
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Banyaknya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	$\sum \text{Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi}$
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Banyaknya Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	$\sum \text{Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik}$

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Banyaknya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan. Aplikasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah terdiri atas : Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus	\sum Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Banyaknya Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	\sum Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Banyaknya Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	\sum Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	\sum Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Banyaknya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	\sum Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibagi dengan Jumlah OPD selama kurun waktu yang sama dikali 100	$\frac{\sum \text{OPD yg menggunakan Data Statistik Sektoral}}{\sum \text{OPD}} \times 100$
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah OPD selama kurun waktu yang sama dikali 100	$= \frac{\sum \% \text{ Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi}}{\sum \text{Subkegiatan yang diampu}} \times 100$
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Banyaknya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	\sum Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Banyaknya SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah	\sum SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Banyaknya Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	\sum Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Banyaknya Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	\sum Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Banyaknya Infrastruktur Statistik yang disediakan	\sum Infrastruktur Statistik yang disediakan
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Banyaknya data Statistik Sektoral yang Dihimpun	\sum data Statistik Sektoral yang Dihimpun

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah nilai per area informasi dibagi dengan Jumlah area penilaian selama kurun waktu yang sama dikali 100	$\sum \text{Nilai per area informasi} / \text{jumlah area penilaian} \times 100$
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	$= \sum \% \text{ Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu} \times 100$
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Banyaknya Dokumen Hasil Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	$\sum \text{Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan}$
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Banyaknya Laporan Hasil Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	$\sum \text{Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi}$
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Banyaknya Laporan Hasil Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	$\sum \text{Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik}$
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Banyaknya Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	$\sum \text{Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi}$
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	$= \sum \% \text{ Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu} \times 100$
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Banyaknya Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	$\sum \text{Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi}$
Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (%)	Jumlah Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	$= (\sum \text{Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi} / \sum \text{Kegiatan yang diampu}) \times 100$
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	$= (\sum \text{Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$

Penyusunan Ketercapaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banyaknya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Banyaknya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD + Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Banyaknya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dalam Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD + Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Banyaknya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD + Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Banyaknya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD + Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banyaknya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyaknya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan pada tahun berkenaan pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= $(\sum \text{Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Banyaknya Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dalam Penyediaan Gaji dan Tunjangan pada tahun berkenaan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banyaknya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Banyaknya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dalam Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Banyaknya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dalam Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banyaknya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dalam Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Banyaknya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dalam Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Banyaknya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dalam Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan + Triwulan + Semesteran SKPD dalam Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Banyaknya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dalam Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= $(\sum \text{Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Banyaknya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dalam Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Banyaknya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dalam Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Banyaknya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dalam Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	$= (\sum \text{Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Banyaknya Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dalam Pengadaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Banyaknya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Banyaknya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Banyaknya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Banyaknya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	$= (\sum \text{Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Banyaknya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dalam Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Banyaknya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dalam Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Banyaknya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dalam Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Banyaknya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dalam Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Banyaknya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dalam Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banyaknya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Banyaknya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dalam Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Banyaknya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dalam Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= $(\sum \text{Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Banyaknya Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dalam Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Banyaknya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dalam Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Banyaknya Paket Mebel yang Disediakan dalam Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Banyaknya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dalam Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Banyaknya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dalam Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Percentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= $(\sum \text{Percentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Banyaknya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banyaknya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Percentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= $(\sum \text{Percentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Banyaknya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Banyaknya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Banyaknya Mebel yang Dipelihara dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Mebel yang Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Banyaknya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banyaknya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banyaknya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023-2026 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu empat tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebagus apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten menjadi OPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya good governance guna menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan beretika.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

PERHITUNGAN RUMUS DEFINISI OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM/KEGIATAN AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI		
			2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RESTRA PERANGKAT DAERAH					
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	Persen	100		100		100		100		100,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN	PROVINSI BANTEN		
	Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF	Persen	39,39		48,48		57,58		66,67		66,67					
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100%	7.800.000.000	100%	7.500.000.000	100%	7.500.000.000	100%	7.600.000.000		7.600.000.000				
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	384.325.000	12	384.325.000	12	384.325.000	12	384.325.000	12	384.325.000				
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000				
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	14	1.000.000.000	14	800.000.000	14	800.000.000	14	900.000.000	14	900.000.000				
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	400.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000				
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	5	2.100.000.000	5	2.100.000.000	5	2.100.000.000	5	2.100.000.000	5	2.100.000.000				
Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	10	130.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000				
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Dokumen	150	100.000.000	200	100.000.000	250	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000				
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	12	3.000.200.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000				
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendistribusikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	15	85.475.000	15	65.675.000	15	65.675.000	15	65.675.000	15	65.675.000				
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Persandian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persen	90,91	17.253.415.281	93,94	15.743.485.281	96,97	21.077.371.000	100	14.800.178.000	100	14.800.178.000				
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	100	5.197.137.719	100	4.547.137.719	100	5.200.000.000	100	5.100.000.000	100	5.100.000.000				
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100%	17.253.415.281	100%	15.743.485.281	100%	21.077.371.000	100%	14.800.178.000	100%	14.800.178.000				
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Domain	1	14.200.000	1	14.000.000	1	20.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000				
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	2	110.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	2	Rp85.000.000	2	Rp85.000.000				

PROGRAM/KEGIATAN AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI		
			2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RESTRA PERANGKAT DAERAH					
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	Unit (33 OPD)	17.129.215.281	Unit (33 OPD)	15.629.485.281	Unit (33 OPD)	20.907.371.000	Unit (33 OPD)	14.701.178.000	Unit (33 OPD)	14.701.178.000				
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		100%	5.197.137.719	100%	4.547.137.719	100%	5.200.000.000	100%	5.100.000.000		5.100.000.000				
Prenatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Prenatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	8	180.000.000	5	170.000.000	5	180.000.000	5	180.000.000	5	180.000.000				
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	25.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000				
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	2	1.000.000.000	3	900.000.000	3	1.000.000.000	3	937.840.500	3	937.840.500				
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1 (Dokumen Penyelenggaraan di Kota Serang + SMA&SMK)	913.690.219	2 (Dokumen Penyelenggaraan di Kota Serang & Kab. Serang)	702.137.719	5 (Dokumen Penyelenggaraan di Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)	916.552.500	8 (Dokumen Penyelenggaraan di Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang)	900.000.000	8 (Dokumen Penyelenggaraan di Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang)	900.000.000				
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000				
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	PD	39	983.159.500	39	900.000.000	39	983.159.500	39	983.159.500	39	983.159.500				
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	8	920.428.000	8	900.000.000	8	920.428.000	8	900.000.000	8	900.000.000				
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	200.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000				
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	15	350.000.000	15	250.000.000	15	350.000.000	15	350.000.000	15	350.000.000				
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	1	150.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000				
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	449.860.000	1	400.000.000	1	449.860.000	1	449.000.000	1	449.000.000				
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Per센	100%	1.400.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000				
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Per센	100%	1.400.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	12	850.000.000	12	730.000.000	12	635.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000				
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	50	150.000.000	100	150.000.000	100	120.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000				
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	100.000.000	1	80.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000				
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	50	150.000.000	50	150.000.000	50	120.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000				

PROGRAM/KEGIATAN AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI		
			2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RESTRA PERANGKAT DAERAH					
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Per센	100	13,980,301.000	100	14,676,316.000	100	15,407,132.000	100	16,179,489.000	100	16,179,489.000				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	52	13,521,811.000	52	14,189,316.000	53	14,915,132.000	54	15,687,489.000	54	15,687,489.000				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	362,490.000	1	370,000.000	1	370,000.000	1	370,000.000	1	370,000.000				
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	43,000.000	12	45,000.000	12	45,000.000	12	45,000.000	12	45,000.000				
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	10,000.000	1	12,000.000	1	12,000.000	1	12,000.000	1	12,000.000				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10,000.000	1	10,000.000	1	10,000.000	1	10,000.000	1	10,000.000				
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	8,000.000	1	10,000.000	1	10,000.000	1	10,000.000	1	10,000.000				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18	15,000.000	18	30,000.000	18	35,000.000	18	35,000.000	18	35,000.000				
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	10,000.000	1	10,000.000	1	10,000.000	1	10,000.000	1	10,000.000				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Per센	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000				
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	20,000.000	3	20,000.000	3	20,000.000	3	20,000.000	3	20,000.000				
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	10,000.000	2	10,000.000	2	10,000.000	2	10,000.000	2	10,000.000				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	15,000.000	3	15,000.000	3	15,000.000	3	15,000.000	3	15,000.000				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Per센	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000				
Pengadaan Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	54,000.000	3	54,000.000	3	54,000.000	3	54,000.000	3	54,000.000				
Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	6,000.000	1	6,000.000	1	6,000.000	1	6,000.000	1	6,000.000				
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	4,000.000	1	4,000.000	1	4,000.000	1	4,000.000	1	4,000.000				
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	6,000.000	2	6,000.000	2	6,000.000	2	6,000.000	2	6,000.000				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	30,000.000	3	30,000.000	3	30,000.000	3	30,000.000	3	30,000.000				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Per센	100	884,673,000	100	984,673,000	100	1,094,420,000	100	1,297,155,000	100	1,297,155,000				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	40,000.000	1	40,000.000	1	40,000.000	1	50,000.000	1	50,000.000				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	220,000.000	1	240,000.000	1	250,000.000	1	270,000.000	1	270,000.000				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	60,000.000	1	60,000.000	1	70,000.000	1	80,000.000	1	80,000.000				

PROGRAM/KEGIATAN AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI		
			2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RESTRA PERANGKAT DAERAH					
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	250.000.000	12	250.000.000	12	260.000.000	12	260.000.000	12	260.000.000				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	100.000.000	12	120.000.000	12	150.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	174.583.000	12	234.673.000	12	279.420.000	12	402.155.000	12	402.155.000				
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000				
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	25.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Per센	100	2.597.000.000	100	800.000.000	100	700.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	1	350.000.000	0	-	0	-				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Paket	0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-				
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	77	925.953.300	15	370.000.000	10	250.000.000	30	390.000.000	25	390.000.000				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	19	1.611.046.700	4	100.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Per센	100	3.662.900.000	100	3.710.279.000	100	3.760.279.000	100	3.860.279.000	100	3.860.279.000				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	846.839.480	12	894.218.480	12	944.218.480	12	1.044.218.480	12	1.044.218.480				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.816.060.520	12	2.816.060.520	12	2.816.060.520	12	2.816.060.520	12	2.816.060.520				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Per센	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	41.000.000	1	41.000.000	1	41.000.000	1	41.000.000	1	41.000.000				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	480.000.000	21	480.000.000	21	480.000.000	21	480.000.000	21	480.000.000				
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	17	10.000.000	17	10.000.000	17	10.000.000	17	10.000.000	17	10.000.000				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	266	219.000.000	266	319.000.000	266	319.000.000	266	369.000.000	266	369.000.000				
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000				
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000				
			57.820.427.000		53.016.891.000		60.234.202.000		55.232.101.000		55.232.101.000					

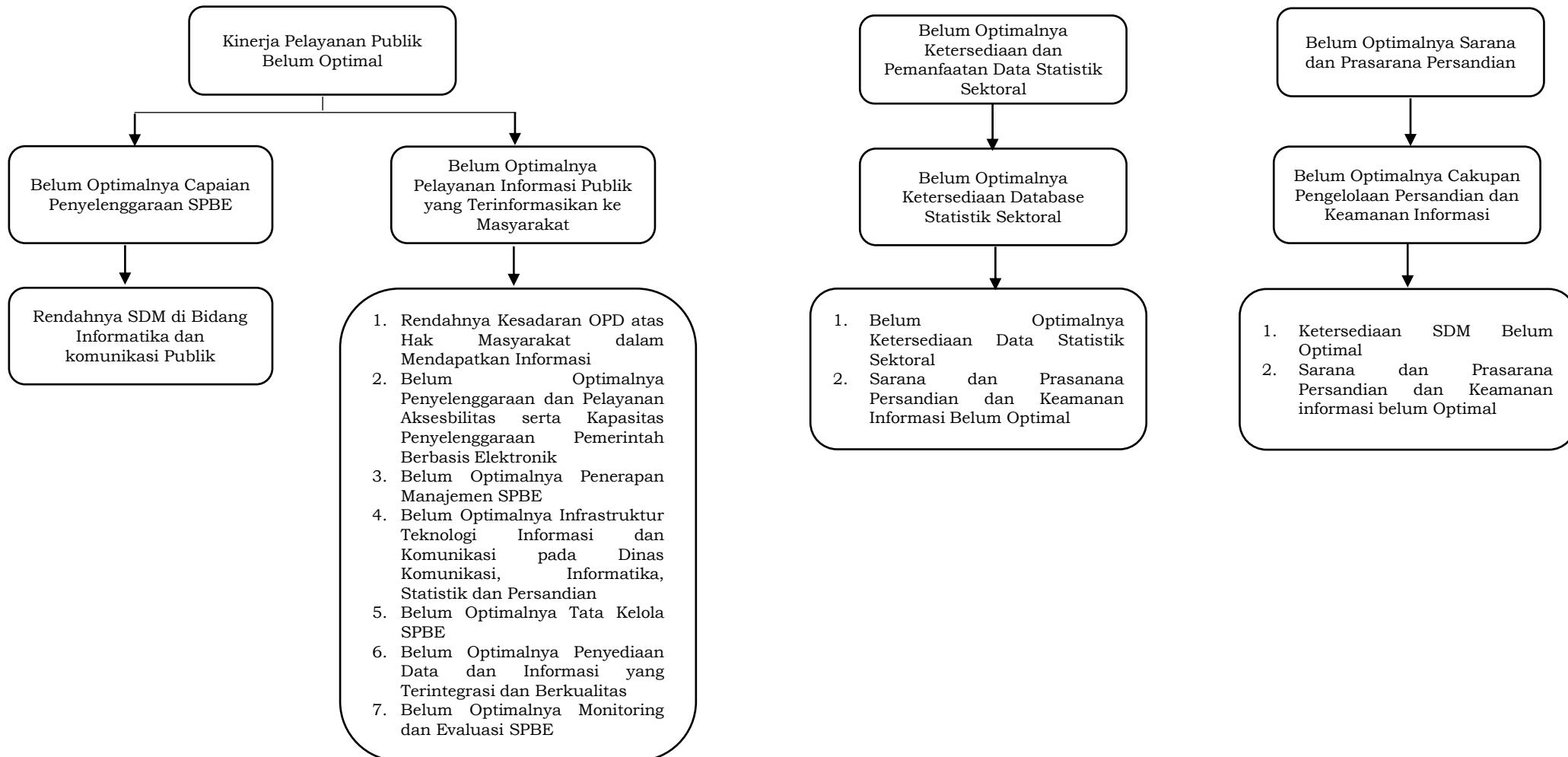


POHON MASALAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

2023-2026

1. POHON MASALAH





CASCADING KINERJA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

2023-2026



3. CASCADING KINERJA



VISI
Banten Yang Maju, Mandiri, Sejahtera berdasarkan Iman dan Taqwa
MISI
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa
TUJUAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa
INDIKATOR KINERJA
Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN STRATEGIS DAERAH
Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
INDIKATOR KINERJA
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik
SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya Layanan Informasi Publik yang Transparan dan Partisipatif
Meningkatnya Penerapan SPBE
Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Data Statistik Sektoral
Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi
INDIKATOR KINERJA
Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Persentase Ketersediaan Database Statistik Sektoral
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

KEPALA BIDANG

Program	Program	Program	Program
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (BNT 03.2.16.02)	Pengelolaan Aplikasi Informatika (BNT 03.2.16.03)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral (BNT 03.2.20.02)	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (BNT 03.2.21.02)
Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program
Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektoral	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program
<ol style="list-style-type: none"> Persentase tingkat kepuasan terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah Persentase OPD yang mencapai Kategori informatif 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Persentase layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi 	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah
Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Terkelolanya Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkelolanya Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 2. Terkelolanya E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2. Terselenggaranya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan
Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 2. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2. Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

KEPALA SEKSI

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pelayanan Informasi Publik	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Infrastruktur	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berkembangnya Infrastruktur	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Infrastruktur Statistik	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Manajemen Komunikasi Krisis	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
Output	Output	Output
Terlaksananya Manajemen Komunikasi Krisis	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	
Output	Output	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	
Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	
Output	Output	
Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Output	Output
Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Output	Output
Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
	Output
	Terlaksananya program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City

Sub Kegiatan
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
Output
Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
Sub Kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
Output
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan / data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Opini dan Aspirasi Publik 3. Jumlah bahan / data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi / penginputan terkait Opini dan Aspirasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait pendaftaran nama domain pemerintah provinsi 2. Jumlah bahan/data hasil Pengelolaan data terkait pendaftaran nama domain pemerintah provinsi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi/penginputan terkait Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 2. Jumlah bahan/data hasil Pengelolaan data terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi/penginputan terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 2. Jumlah bahan/data hasil Pengelolaan data terkait Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi/penginputan terkait Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi terkait Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data Jumlah bahan/data penyusunan penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi terkait Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi terkait Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi terkait Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Jumlah bahan/data penelaahan data terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Metadata Statistik Sektoral 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Metadata Statistik Sektoral 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Metadata Statistik Sektoral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pelayanan Informasi Publik	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Tersedianya bahan/data dalam rangka Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi
Indikator Kinerja Individu		Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Pelayanan Informasi Publik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Pelayanan Informasi Publik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Pelayanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 3. Jumlah pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Infrastruktur	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya data /bahan dalam rangka pengembangan infrastruktur	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 3. Jumlah pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait pengembangan infrastruktur STATISTIK 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait pengembangan infrastruktur STATISTIK 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait pengembangan infrastruktur STATISTIK	1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Manajemen Komunikasi Krisis	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Manajemen Komunikasi Krisis
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Manajemen Komunikasi Krisis	Tersedianya bahan/data dalam rangka Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Manajemen Komunikasi Krisis
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Manajemen Komunikasi Krisis 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Manajemen Komunikasi Krisis 3. Jumlah pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Manajemen Komunikasi Krisis	1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Pusat Data Pemerintahan Daerah 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Pusat Data Pemerintahan Daerah 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Pusat Data Pemerintahan Daerah	1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Manajemen Komunikasi Krisis 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Manajemen Komunikasi Krisis 3. Jumlah pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Manajemen Komunikasi Krisis

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Output	Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi/penginputan terkait Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi/penginputan terkait Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
Output	Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi/penginputan terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi/penginputan terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Output	Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian dan analisis terkait Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian dan analisis terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Output	Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian dan analisis terkait Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian dan analisis terkait Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sub Kegiatan
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
Sub Kegiatan
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah



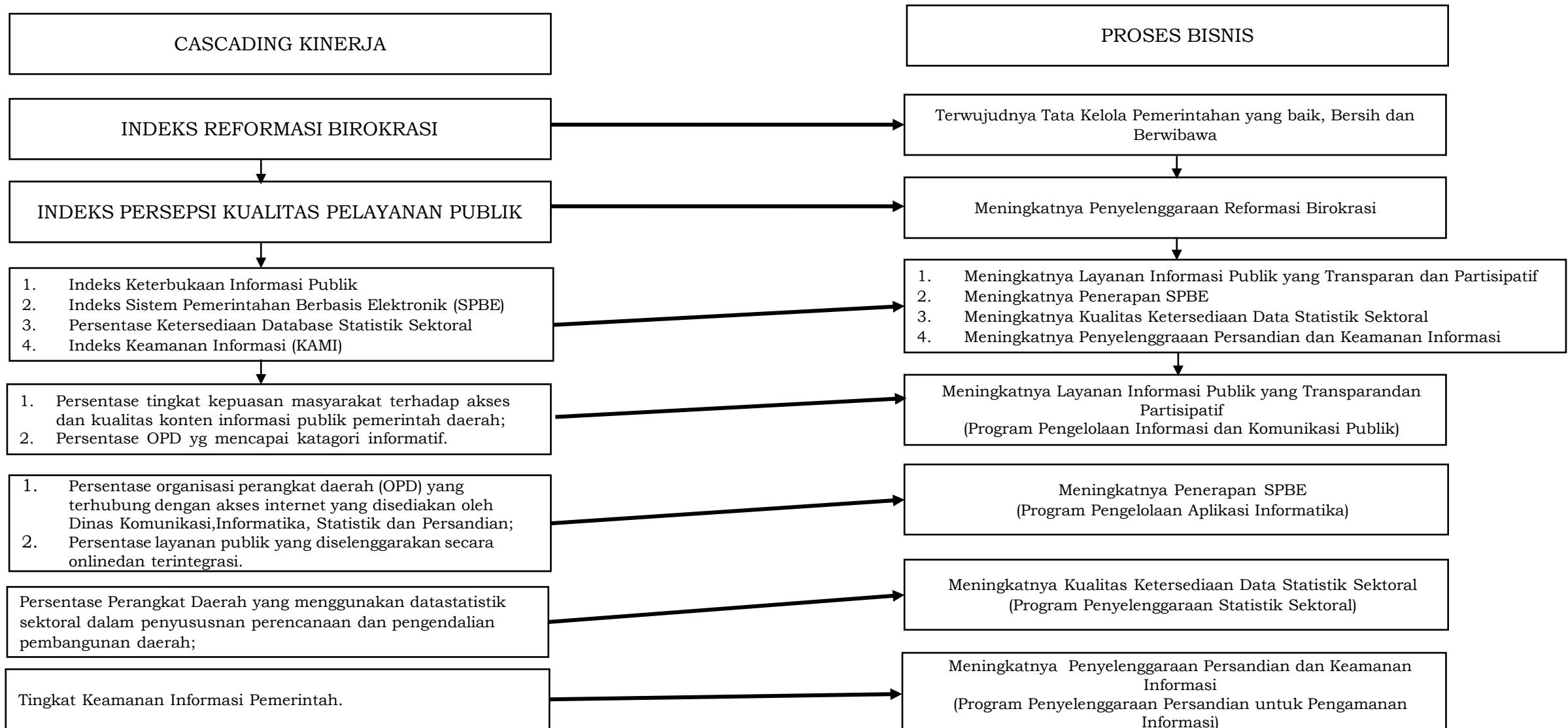
PROSES BISNIS

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

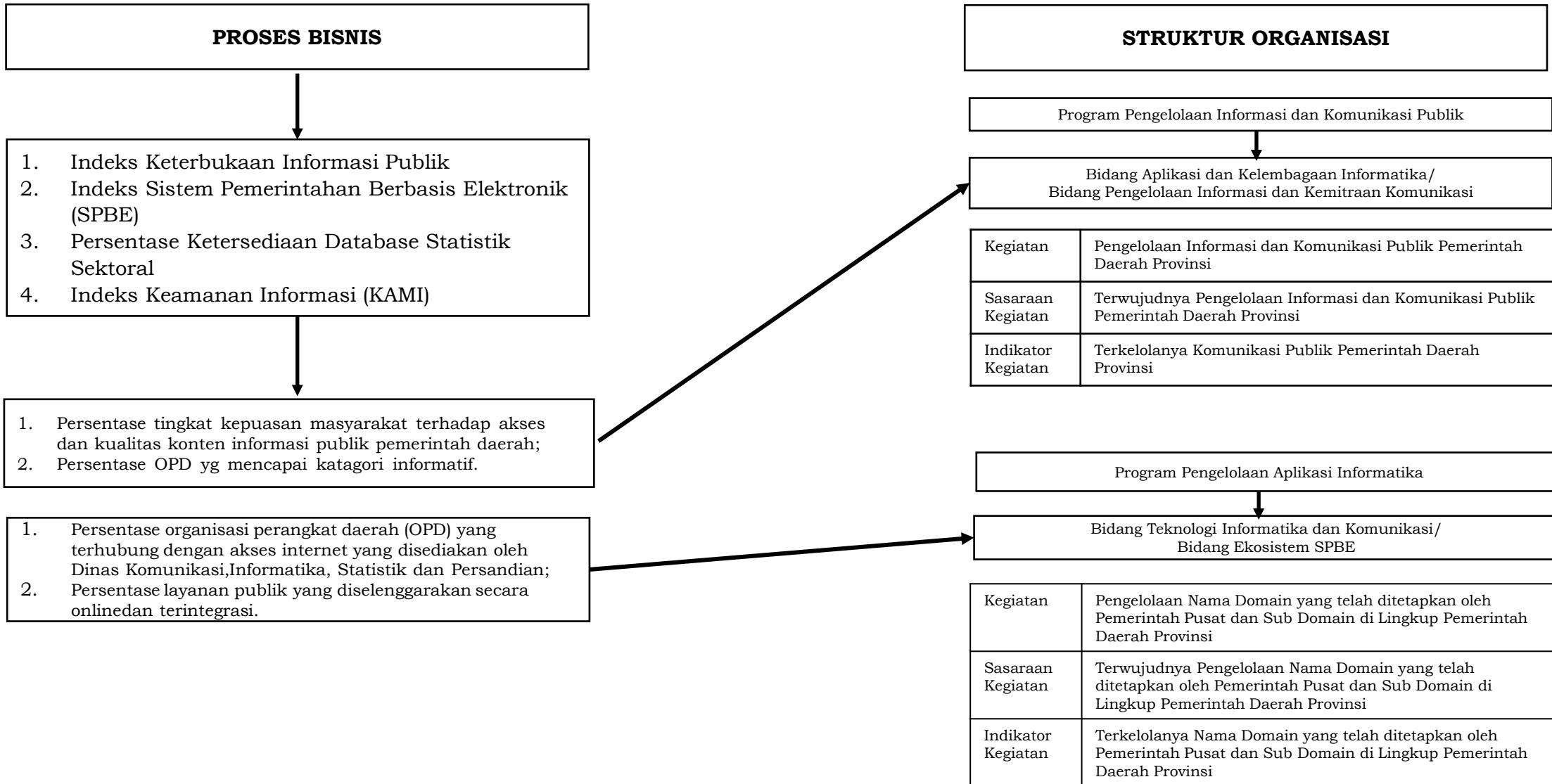
2023-2026

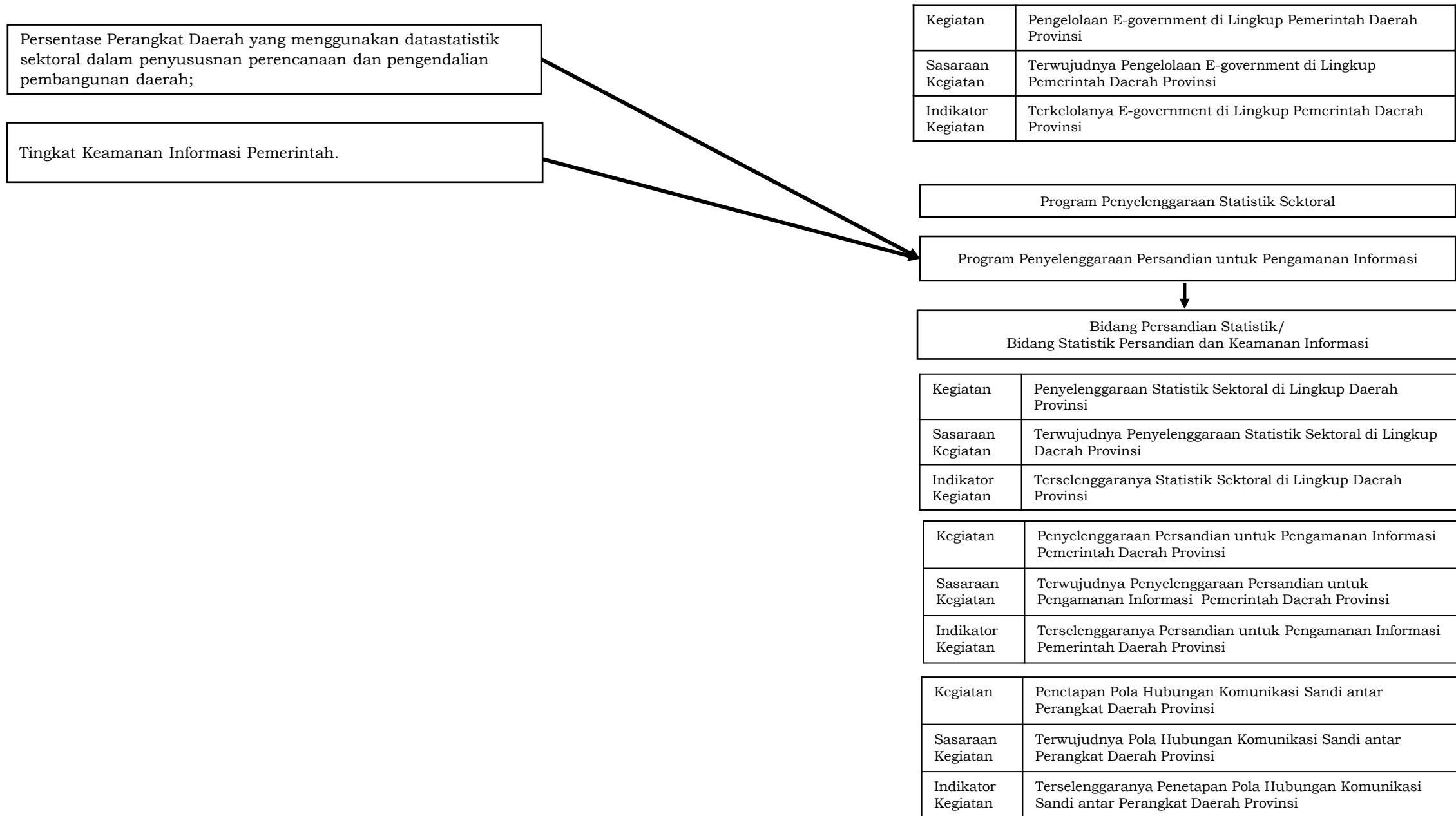


4. KETERIKATAN PROSES BISNIS DENGAN CASCADING



5. PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI





TABEL PENJABARAN PETA PROSES BISNIS PEMPROV BANTEN

1	Misi	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, Bersih dan Berwibawa	Proses Manajemen	BNT 03	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	BNT 03.2.16.02	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
					BNT 03.2.16.03	Pengelolaan Aplikasi Informatika
					BNT 03.2.20.02	Penyelenggaraan Statistik Sektoral
					BNT 03.2.21.02	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi

6. TABEL IDENTIFIKASI PROSES, SUB PROSES DAN LINTAS FUNGSI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

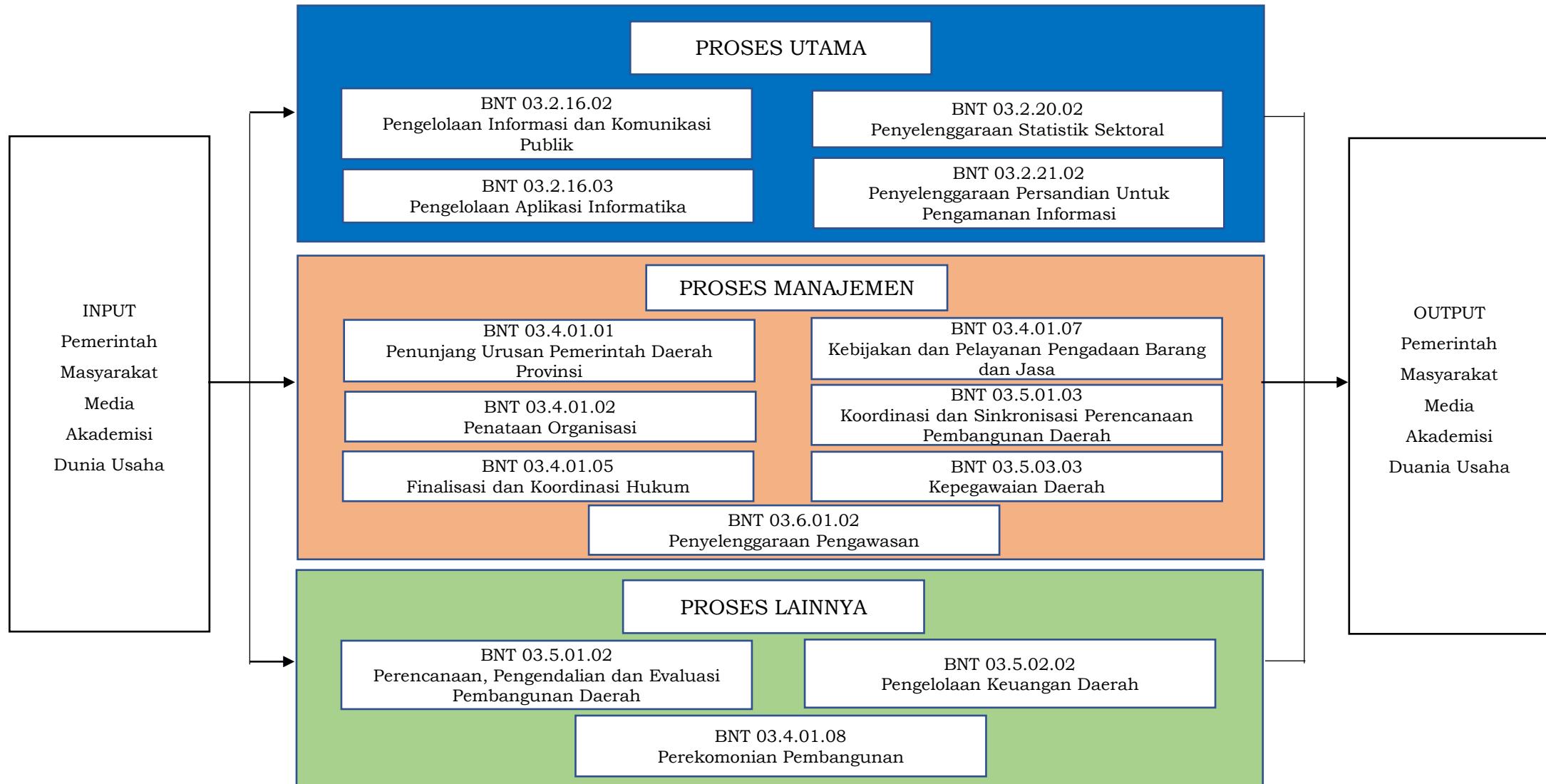
No	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses (Nama Program)	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses (Nama Kegiatan)	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas Fungsi (Nama Sub Kegiatan)
1	Proses Utama	BNT 03.2.16.02	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	BNT 03.2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	BNT 03.2.16.02.1.01.02.CFM.01	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
						BNT 03.2.16.02.1.01.04.CFM.02	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
						BNT 03.2.16.02.1.01.05.CFM.03	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
						BNT 03.2.16.02.1.01.06.CFM.04	Pelayanan Informasi Publik
						BNT 03.2.16.02.1.01.08.CFM.05	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
						BNT 03.2.16.02.1.01.09.CFM.06	Manajemen Komunikasi Krisis
						BNT 03.2.16.02.1.01.10.CFM.07	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

No	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses (Nama Program)	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses (Nama Kegiatan)	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas Fungsi (Nama Sub Kegiatan)
						BNT 03.2.16.02.1.01.11.CFM.08	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
						BNT 03.2.16.02.1.01.12.CFM.09	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
						BNT 03.2.16.02.1.01.13.CFM.10	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
		BNT 03.2.16.03	Pengelolaan Aplikasi Informatika	BNT 03.2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	BNT 03.2.16.03.1.01.01.CFM.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
						BNT 03.2.16.03.1.01.02.CFM.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
						BNT 03.2.16.03.1.01.03.CFM.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
				BNT 03.2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	BNT 03.2.16.03.1.02.01.CFM.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
						BNT 03.2.16.03.1.02.02.CFM.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
						BNT 03.2.16.03.1.02.03.CFM.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
						BNT 03.2.16.03.1.02.04.CFM.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
						BNT 03.2.16.03.1.02.05.CFM.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
						BNT 03.2.16.03.1.02.06.CFM.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
						BNT 03.2.16.03.1.02.07.CFM.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
						BNT 03.2.16.03.1.02.09.CFM.08	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas

No	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses (Nama Program)	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses (Nama Kegiatan)	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas Fungsi (Nama Sub Kegiatan)
						BNT 03.2.16.03.1.02.10.CFM.09	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
						BNT 03.2.16.03.1.02.11.CFM.10	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
						BNT 03.2.16.03.1.02.12.CFM.11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
	BNT 03.2.20.02	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	BNT 03.2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	BNT 03.2.20.02.1.01.01.CFM.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	
						BNT 03.2.20.02.1.01.02.CFM.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
						BNT 03.2.20.02.1.01.03.CFM.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral
						BNT 03.2.20.02.1.01.04.CFM.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
						BNT 03.2.20.02.1.01.05.CFM.05	Pengembangan Infrastruktur
						BNT 03.2.20.02.1.01.06.CFM.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
	BNT 03.2.21.02	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	BNT 03.2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	BNT 03.2.21.02.1.01.01.CFM.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	
						BNT 03.2.21.02.1.01.02.CFM.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
						BNT 03.2.21.02.1.01.03.CFM.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
						BNT 03.2.21.02.1.01.04.CFM.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
				BNT 03.2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	BNT 03.2.21.02.1.02.01.CFM.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

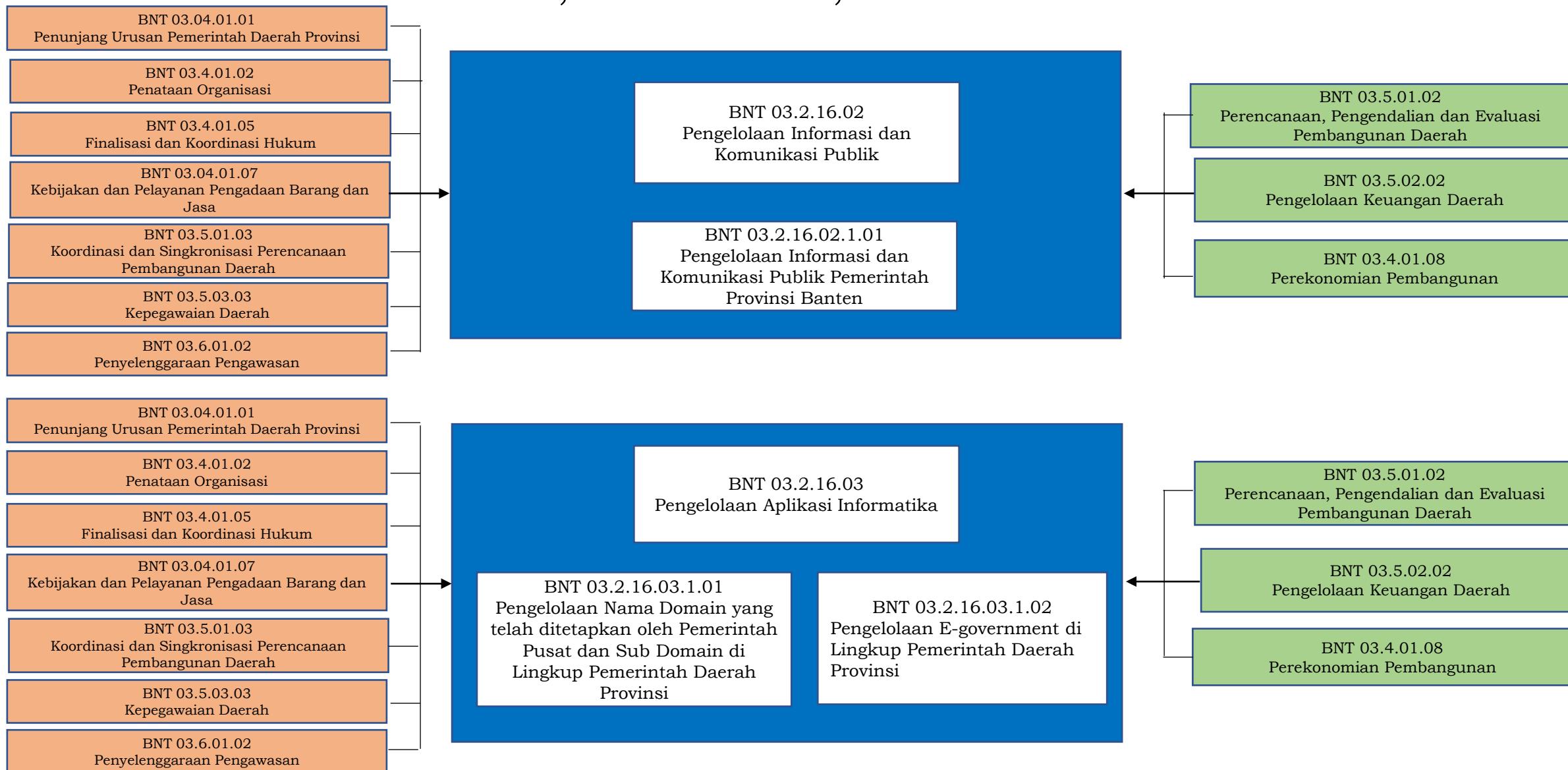
PETA PROSES BISNIS

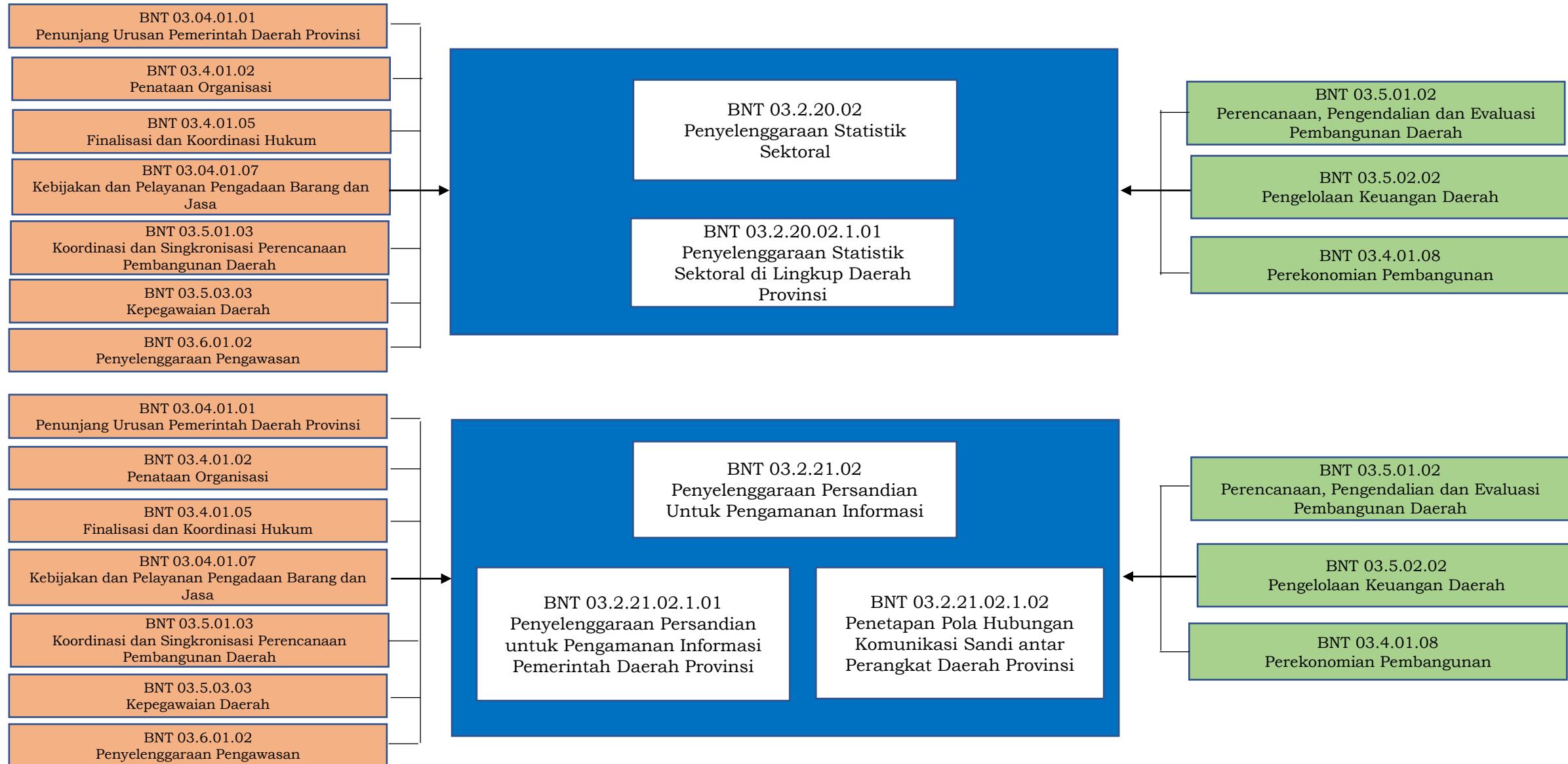
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



8. PETA SUB PROSES BISNIS

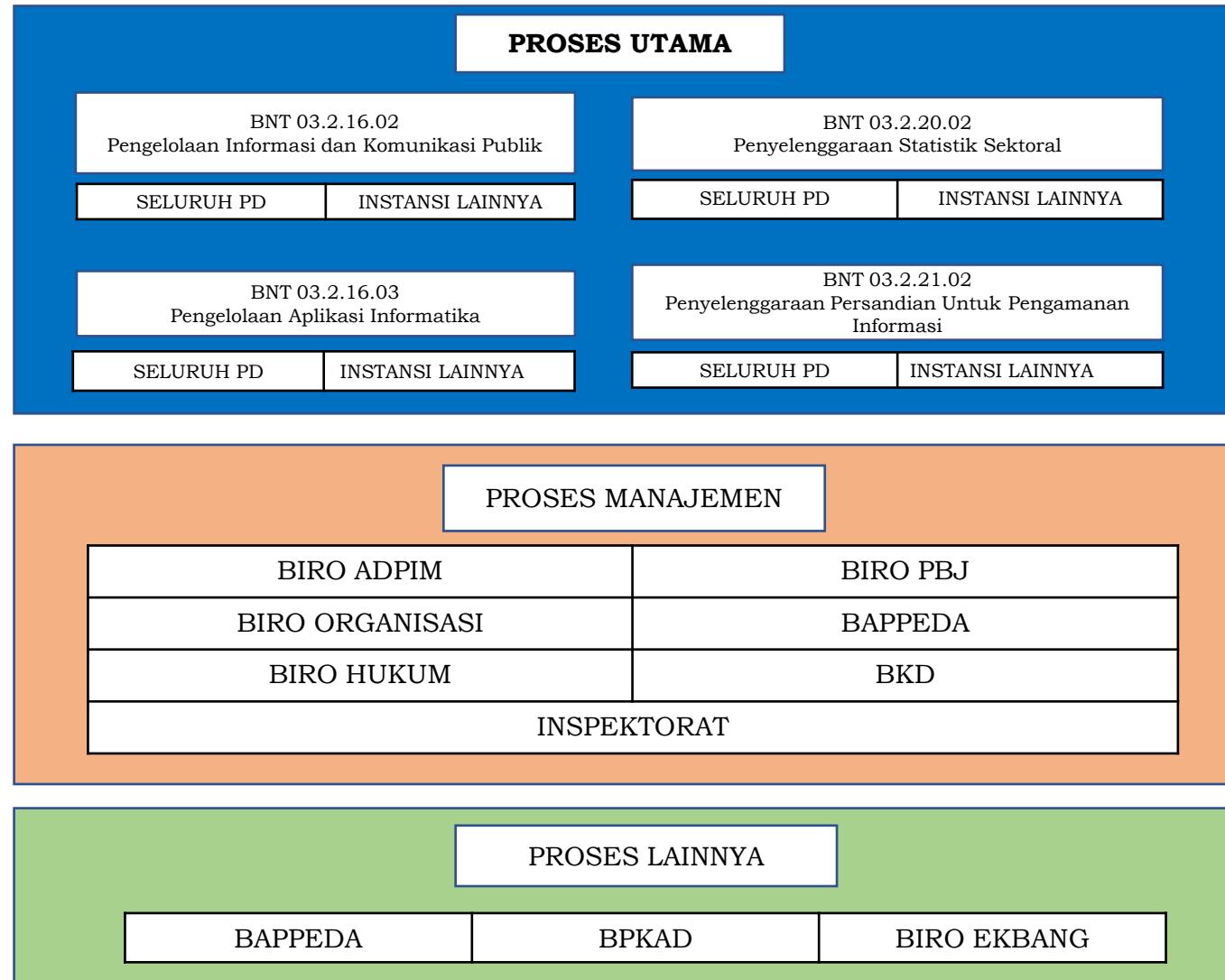
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN





PETA RELASI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



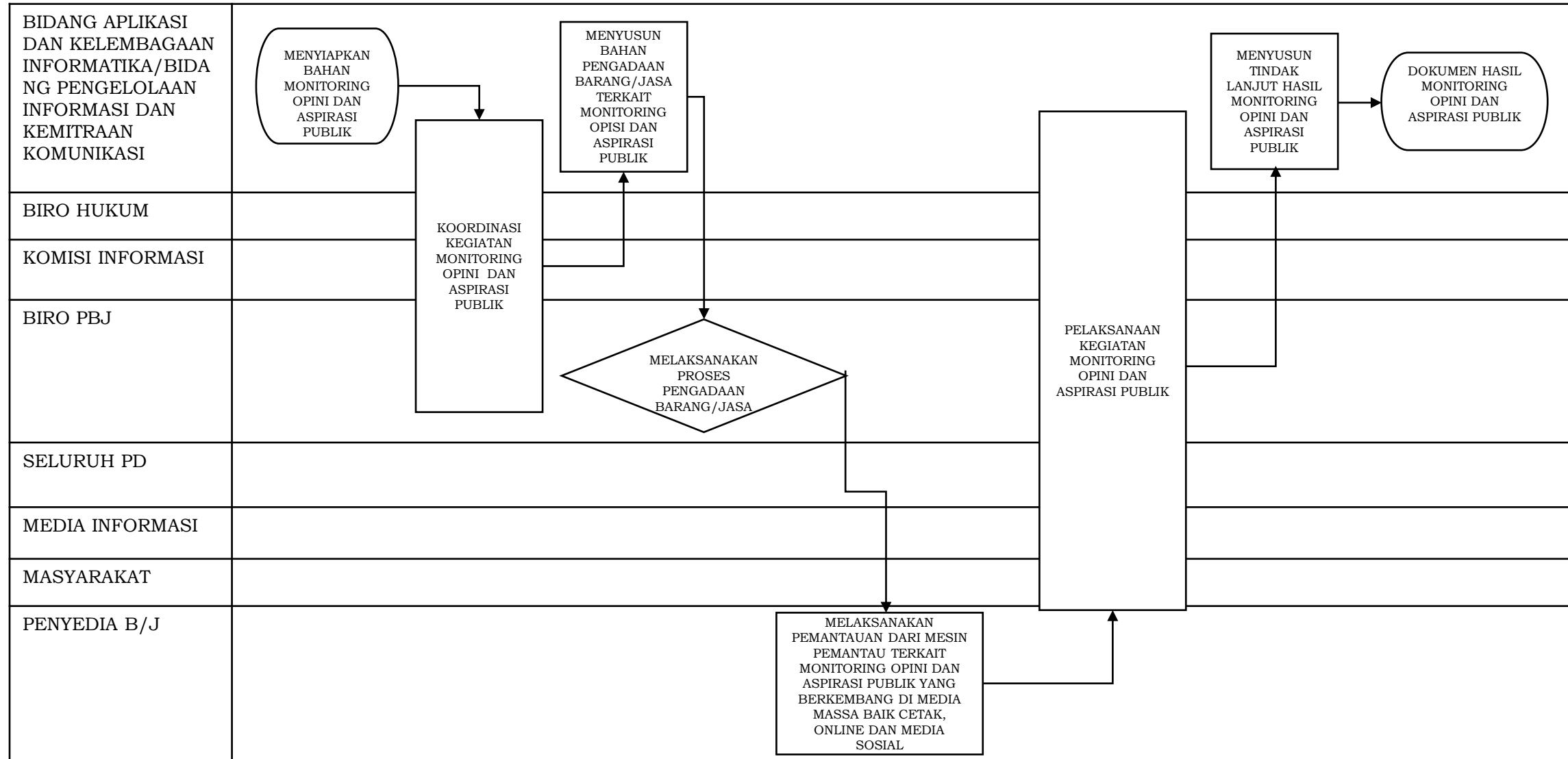
TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.02.CFM.01

**PROSES
SUB PROSES
LINTAS FUNSI**

**: BNT 03.2.16.02 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
: BNT 03.2.16.02.1.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
: BNT 03.2.16.02.1.01.02.CFM.01**

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	1. BIRO HUKUM 2. KOMISI INFORMASI 3. BIRO PBJ 4. SELURUH PD 5. MEDIA INFORMASI 6. MASYARAKAT 7. PENYEDIA B/J	Terlaksananya Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Bidang Aplikasi Dan Kelembagaan Informatika/Bidang Pengelolaan Informasi Dan Kemitraan Komunikasi

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.02.CFM.01 Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik

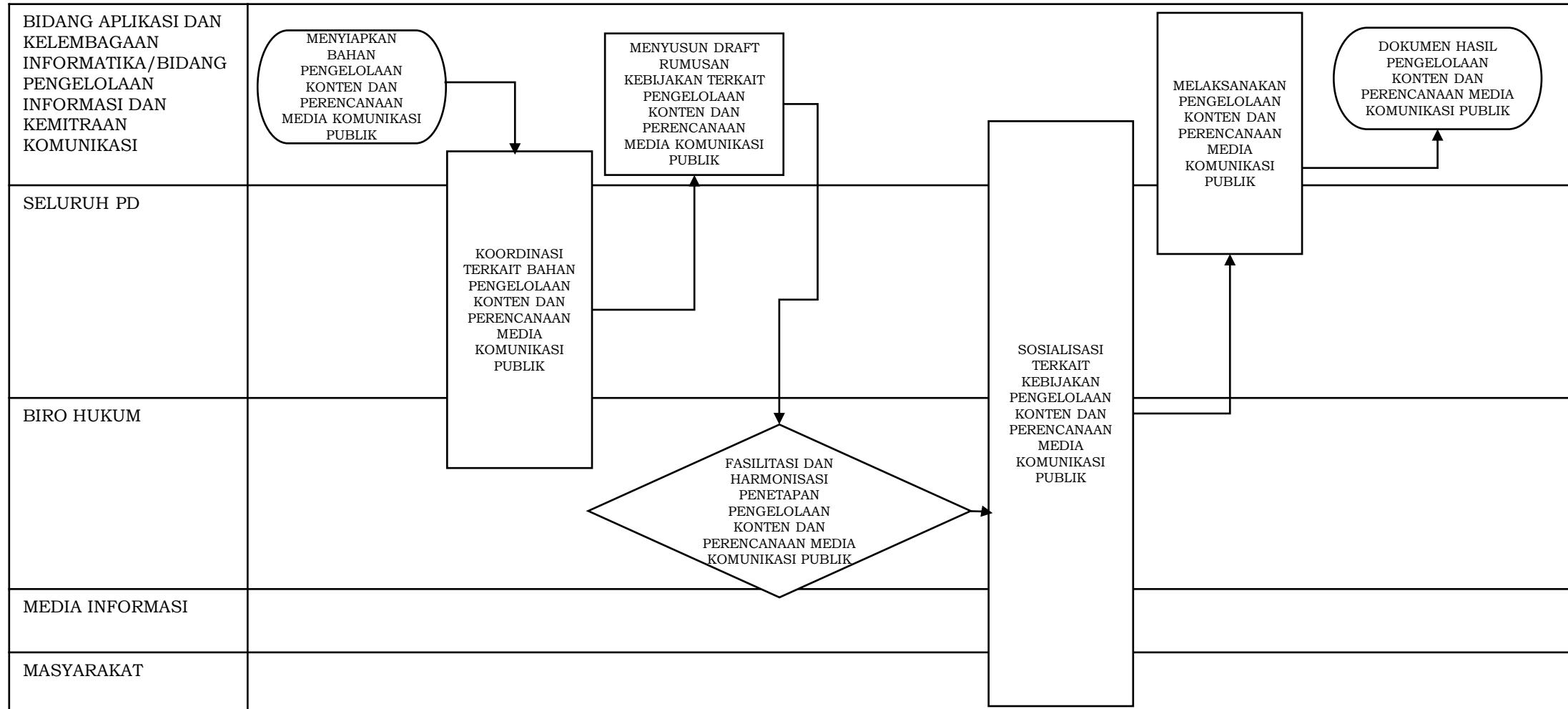


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.04.CFM.02

PROSES : BNT 03.2.16.02 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SUB PROSES : BNT 03.2.16.02.1.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.02.1.01.04.CFM.02

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1. SELURUH OPD 2. BIRO HUKUM 3. MEDIA INFORMASI 4. MASYARAKAT	Terlaksananya Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Bidang Aplikasi Dan Kelembagaan Informatika/Bidang Pengelolaan Informasi Dan Kemitraan Komunikasi

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.04.CFM.02 Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

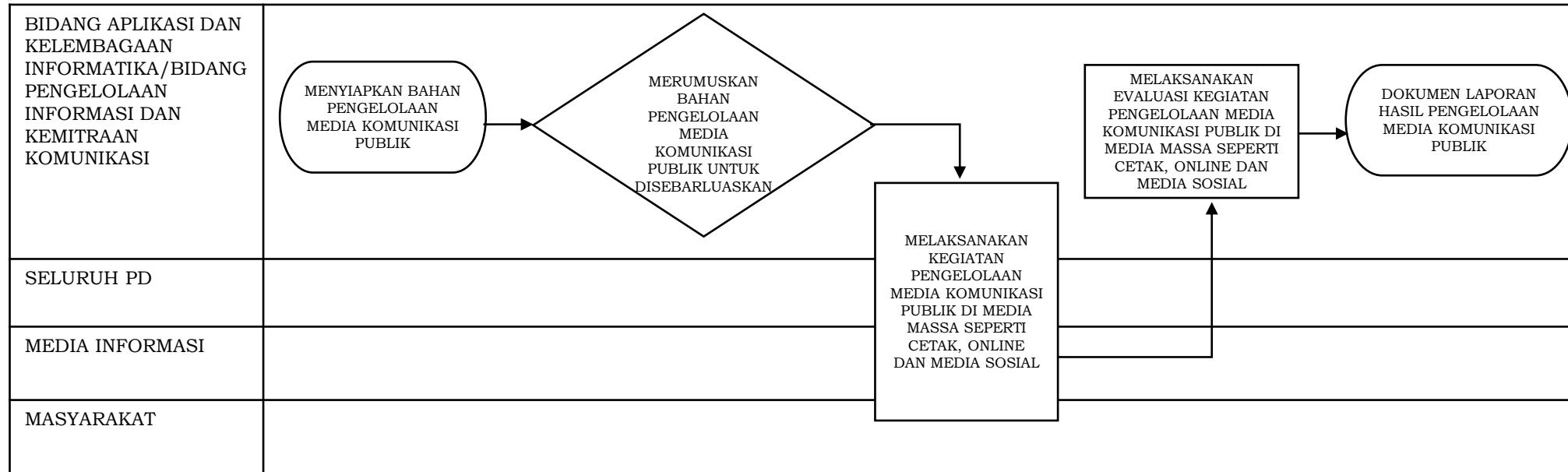


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.05.CFM.03

PROSES : BNT 03.2.16.02 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SUB PROSES : BNT 03.2.16.02.1.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT 03.2.16.02.1.01.05.CFM.03

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1. SELURUH PD 2. MEDIA INFORMASI 3. MASYARAKAT	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Bidang Aplikasi Dan Kelembagaan Informatika/Bidang Pengelolaan Informasi Dan Kemitraan Komunikasi

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.05.CFM.03 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

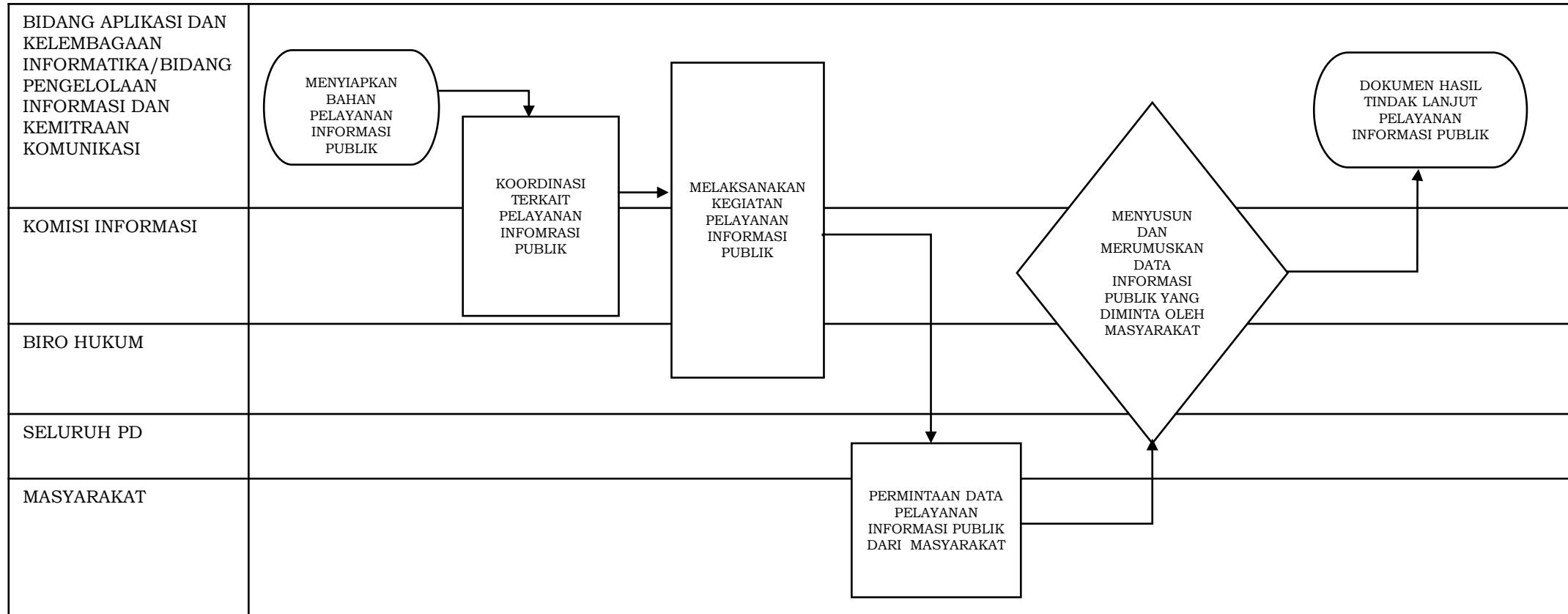


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.06.CFM.04

PROSES : BNT 03.2.16.02 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SUB PROSES : BNT 03.2.16.02.1.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.02.1.01.06.CFM.04

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pelayanan Informasi Publik	1. KOMISI INFORMASI 2. BIRO HUKUM 3. SELURUH PD 4. MASYARAKAT	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Bidang Aplikasi Dan Kelembagaan Informatika/Bidang Pengelolaan Informasi Dan Kemitraan Komunikasi

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.06.CFM.04 Pelayanan Informasi Publik

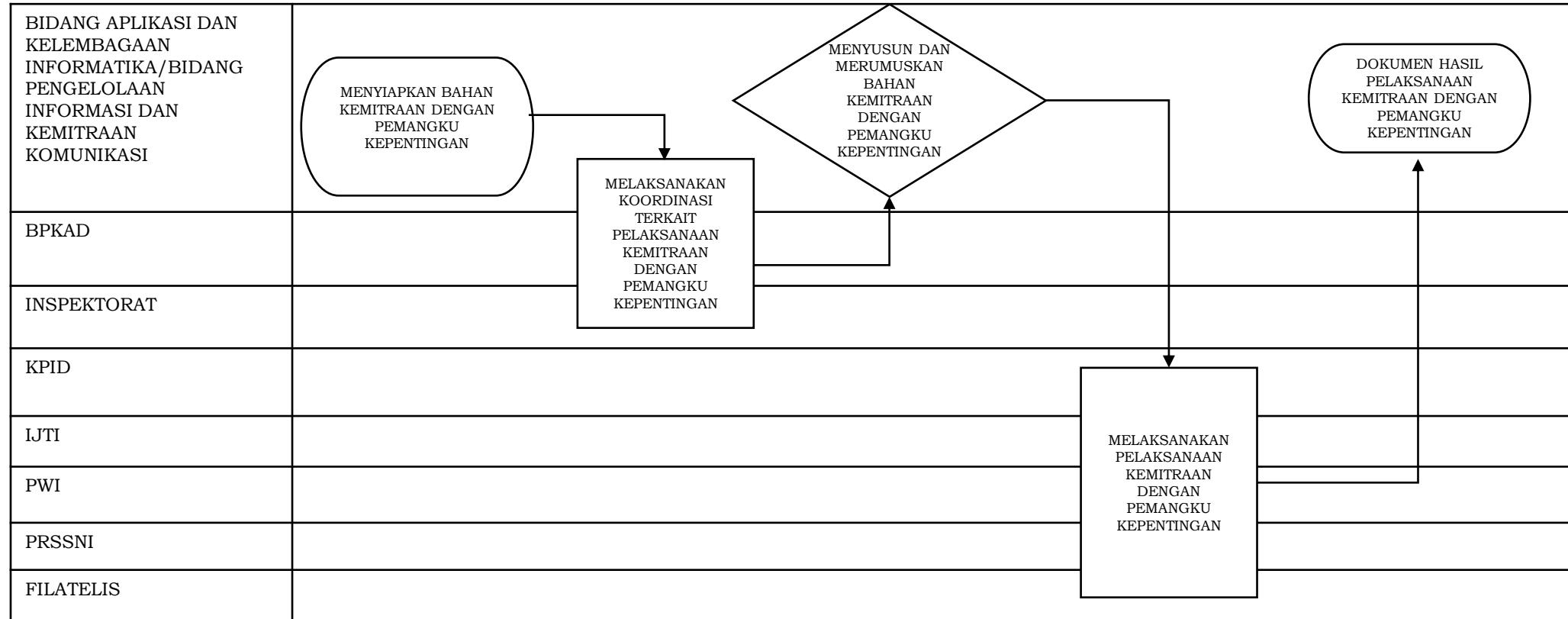


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.08.CFM.05

PROSES : BNT 03.2.16.02 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SUB PROSES : BNT 03.2.16.02.1.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.02.1.01.08.CFM.05

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	1. BPKAD 2. INSPEKTORAT 3. KPID 4. IJTI 5. PWI 6. PRSSNI 7. FILATELIS	Terlaksananya Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Bidang Aplikasi Dan Kelembagaan Informatika/Bidang Pengelolaan Informasi Dan Kemitraan Komunikasi

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.08.CFM.05 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan

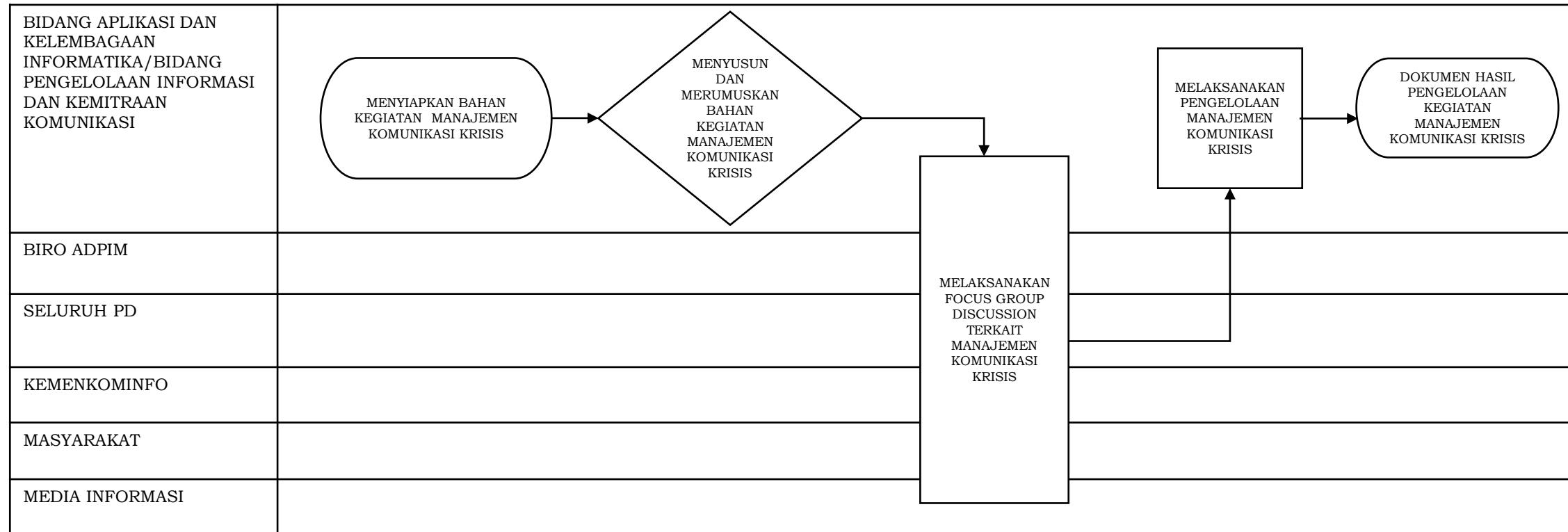


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.09.CFM.06

PROSES : BNT 03.2.16.02 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SUB PROSES : BNT 03.2.16.02.1.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.02.1.01.09.CFM.06

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Manajemen Komunikasi Krisis	1. BIRO ADPIM 2. SELURUH PD 3. KEMENKOMINFO 4. MASYARAKAT 5. MEDIA INFORMASI	Terlaksananya Manajemen Komunikasi Krisis	Bidang Aplikasi Dan Kelembagaan Informatika/Bidang Pengelolaan Informasi Dan Kemitraan Komunikasi

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.09.CFM.06 Manajemen Komunikasi Krisis

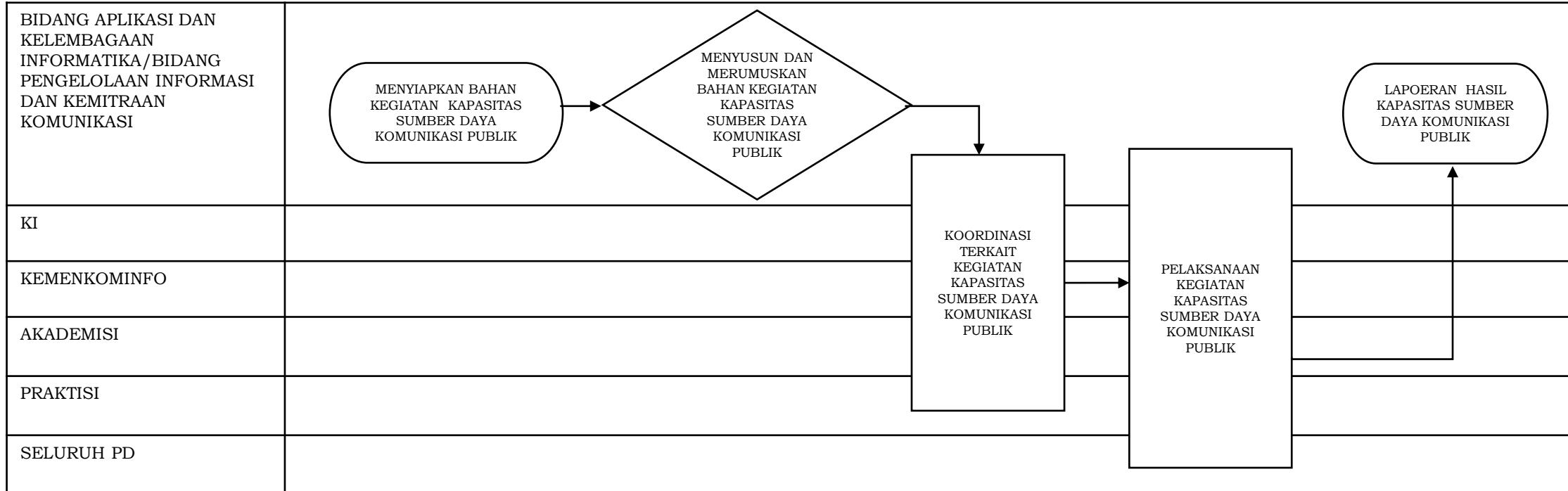


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.10.CFM.07

PROSES : BNT 03.2.16.02 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SUB PROSES : BNT 03.2.16.02.1.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.02.1.01.10.CFM.07

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1. KI 2. KEMENKOMINFO 3. AKADEMISI 4. PRAKTISI 5. SELURUH PD	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Bidang Aplikasi Dan Kelembagaan Informatika/Bidang Pengelolaan Informasi Dan Kemitraan Komunikasi

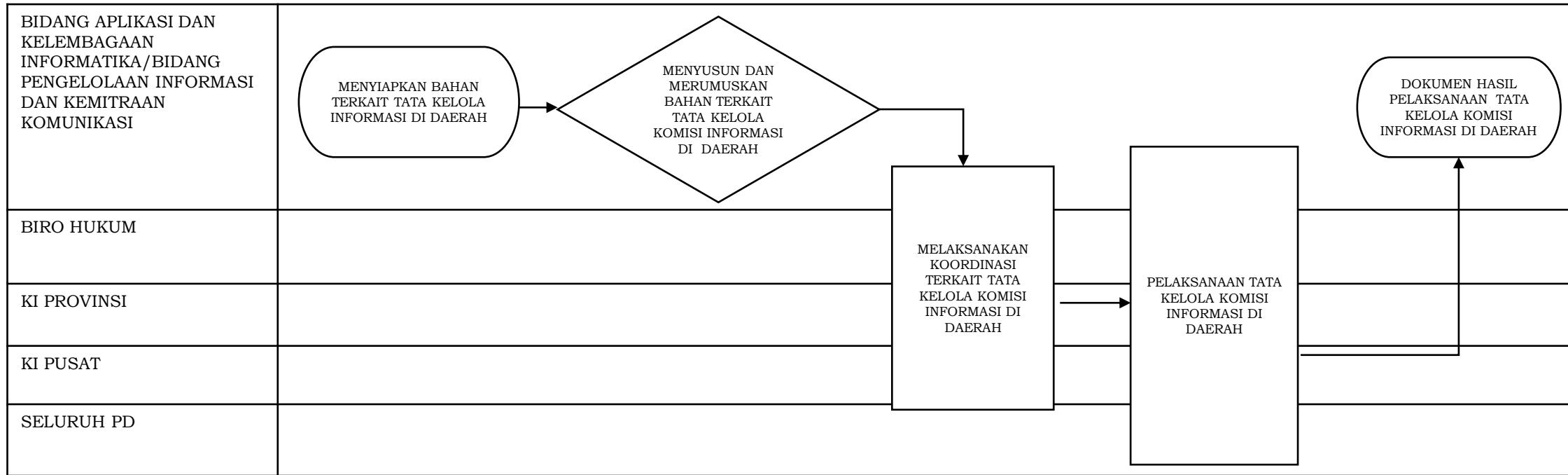
PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.10.CFM.07 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.11.CFM.08

PROSES : BNT 03.2.16.02 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SUB PROSES : BNT 03.2.16.02.1.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.02.1.01.11.CFM.08

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	1. BIRO HUKUM 2. KI PROVINSI 3. KI PUSAT 4. SELURUH PD	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	Bidang Aplikasi Dan Kelembagaan Informatika/Bidang Pengelolaan Informasi Dan Kemitraan Komunikasi

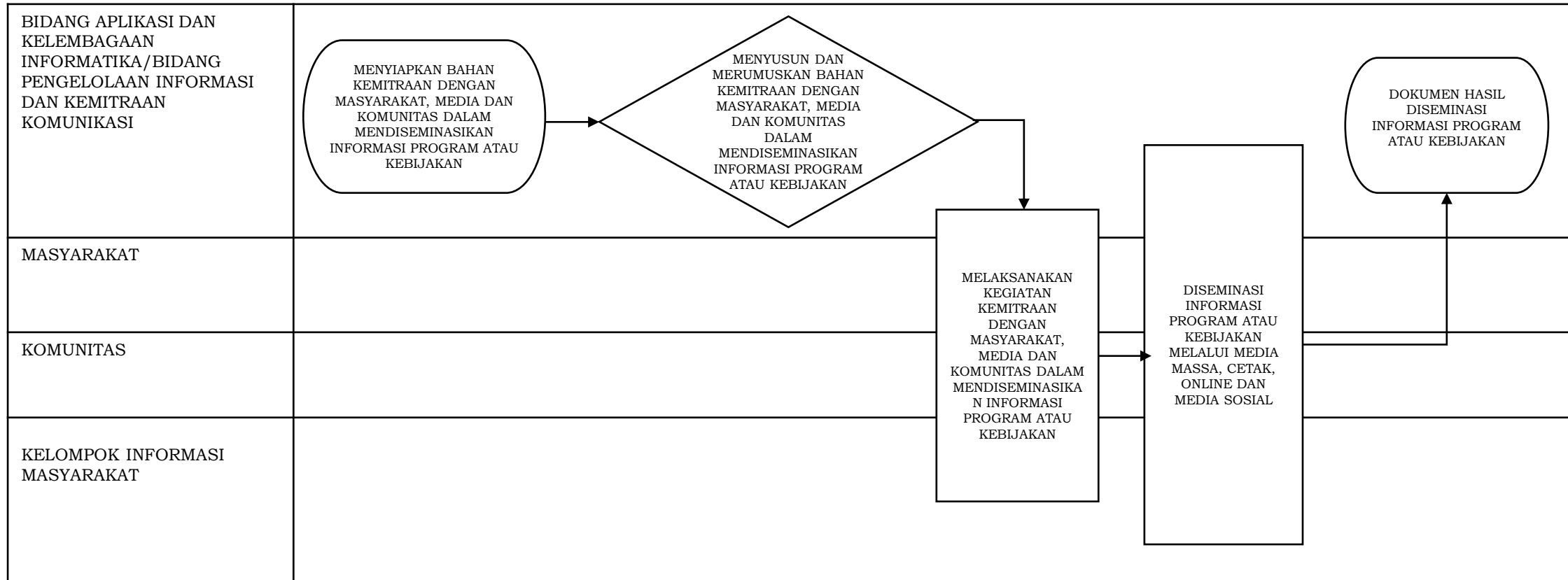


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.12.CFM.09

PROSES : BNT 03.2.16.02 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SUB PROSES : BNT 03.2.16.02.1.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.02.1.01.12.CFM.09

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1. MASYARAKAT 2. KOMUNITAS 3. KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika/Bidang Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi

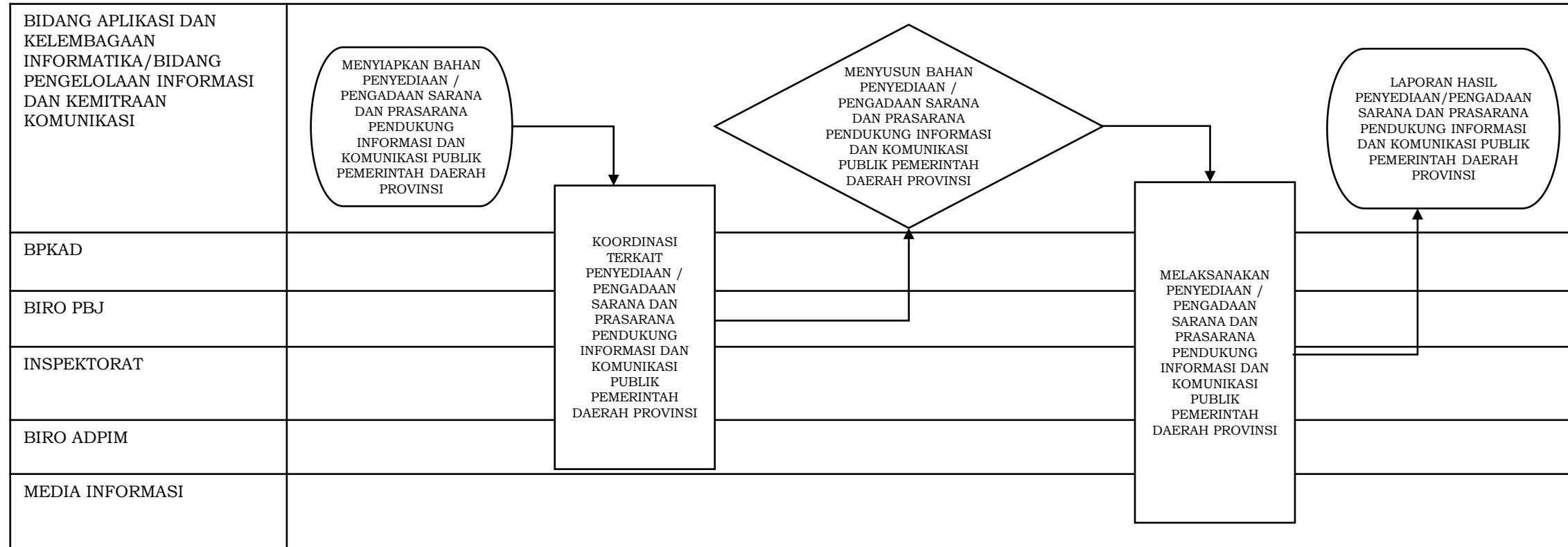
PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.12.CFM.09 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.02.1.01.13.CFM.10

PROSES : BNT 03.2.16.02 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SUB PROSES : BNT 03.2.16.02.1.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.02.1.01.13.CFM.10

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyediaan/Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1. BPKAD 2. BIRO PBJ 3. INSPEKTORAT 4. BIRO ADPIM 5. MEDIA INFORMASI	Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Bidang Aplikasi Dan Kelembagaan Informatika/Bidang Pengelolaan Informasi Dan Kemitraan Komunikasi

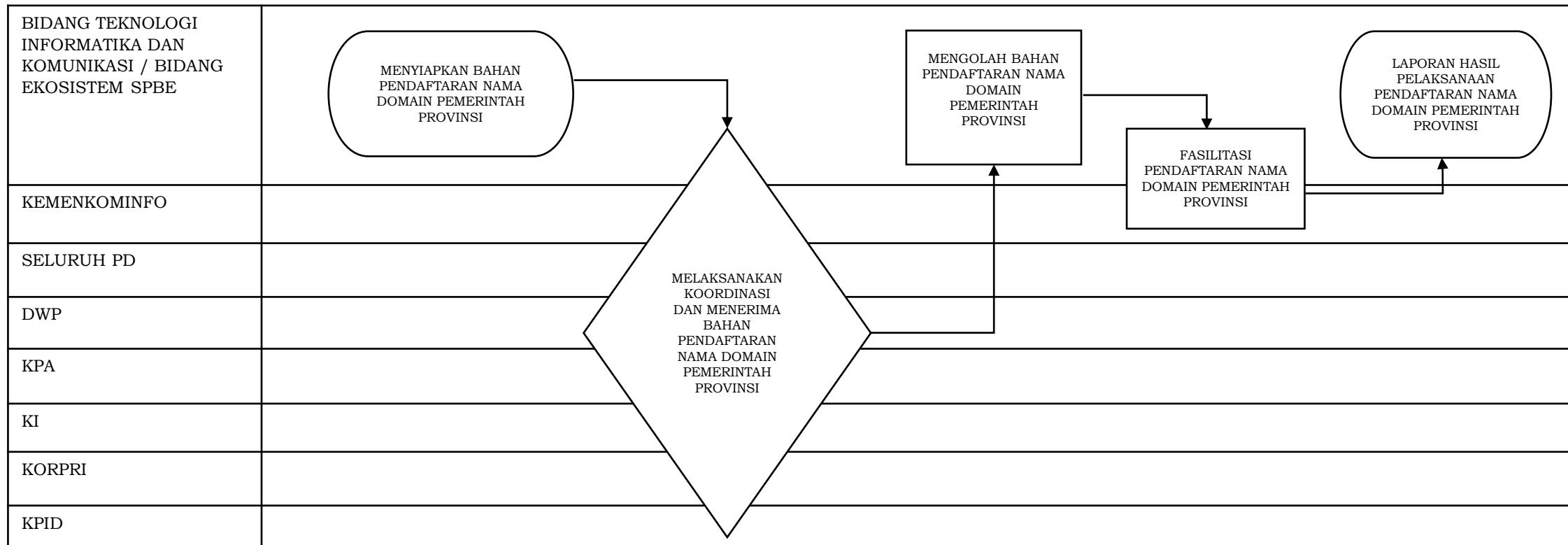


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.01.01.CFM.01

PROSES : BNT 03.2.16..03 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
SUB PROSES : BNT 03.2.16.03.1.01 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLRH PEMERINTAH PUSAT
LINTAS FUNSI : DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.03.1.01.01.CFM.01

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	1. KEMENKOMINFO 2. SELURUH PD 3. DWP 4. KPA 5. KI 6. KORPRI 7. KPID	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Bidang Teknologi Informatika Dan Komunikasi / Bidang Ekosistem SPBE

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.01.01.CFM.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi

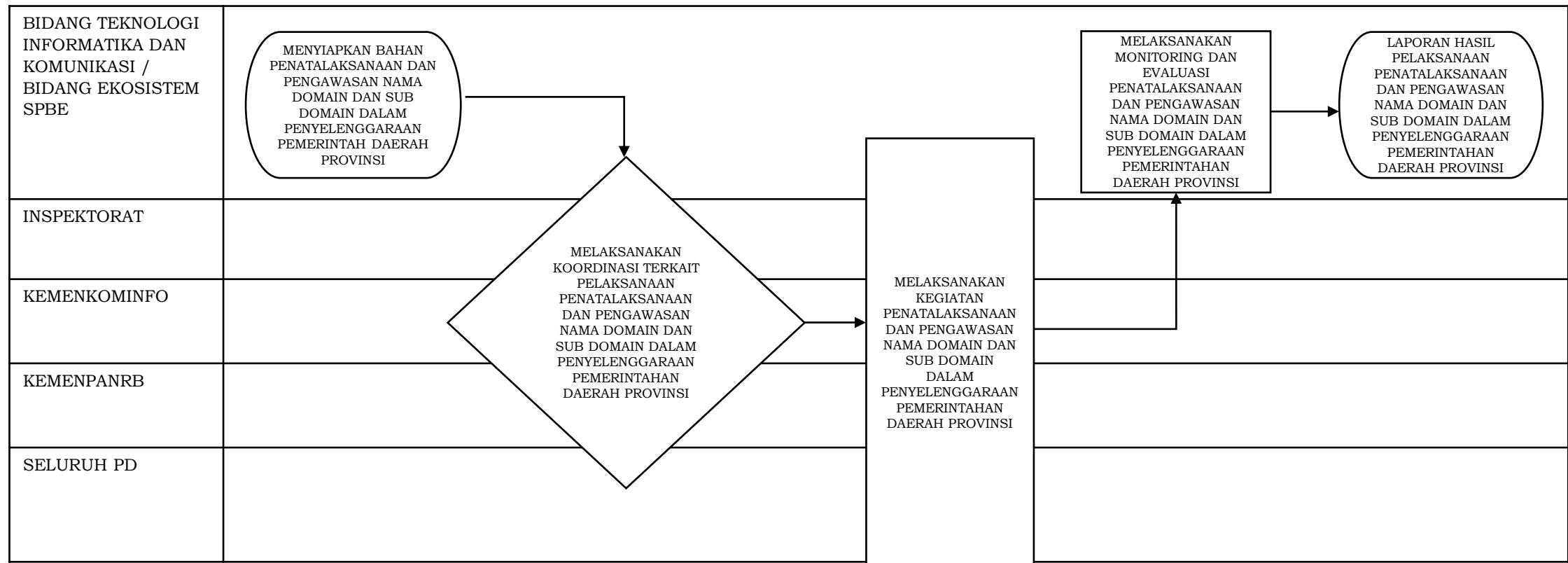


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.01.02.CFM.02

PROSES : BNT 03.2.16..03 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
SUB PROSES : BNT 03.2.16.03.1.01 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLRH PEMERINTAH PUSAT
DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.03.1.01.02.CFM.02

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. INSPEKTORAT 2. KEMENKOMINFO 3. KEMENPANRB 4. SELURUH PD	Terlaksananya Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Bidang Teknologi Informatika Dan Komunikasi / Bidang Ekosistem SPBE

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.01.02.CFM.02 Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

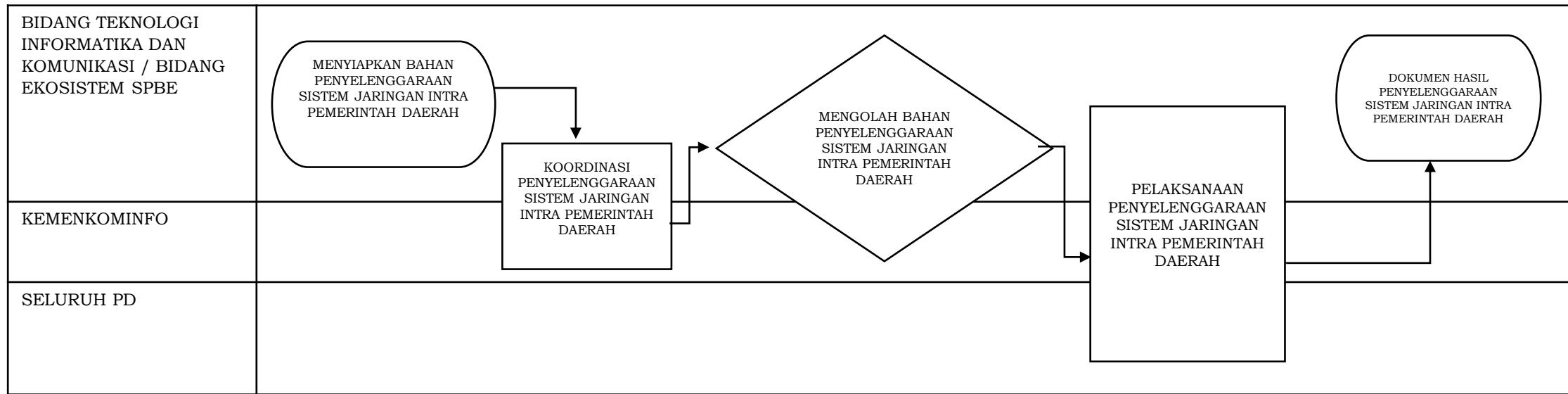


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.01.03.CFM.03

PROSES : BNT 03.2.16..03 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
SUB PROSES : BNT 03.2.16.03.1.01 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLRH PEMERINTAH PUSAT
DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.03.1.01.03.CFM.03

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1. KEMENKOMINFO 2. SELURUH PD	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Bidang Teknologi Informatika Dan Komunikasi / Bidang Ekosistem SPBE

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.01.03.CFM.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

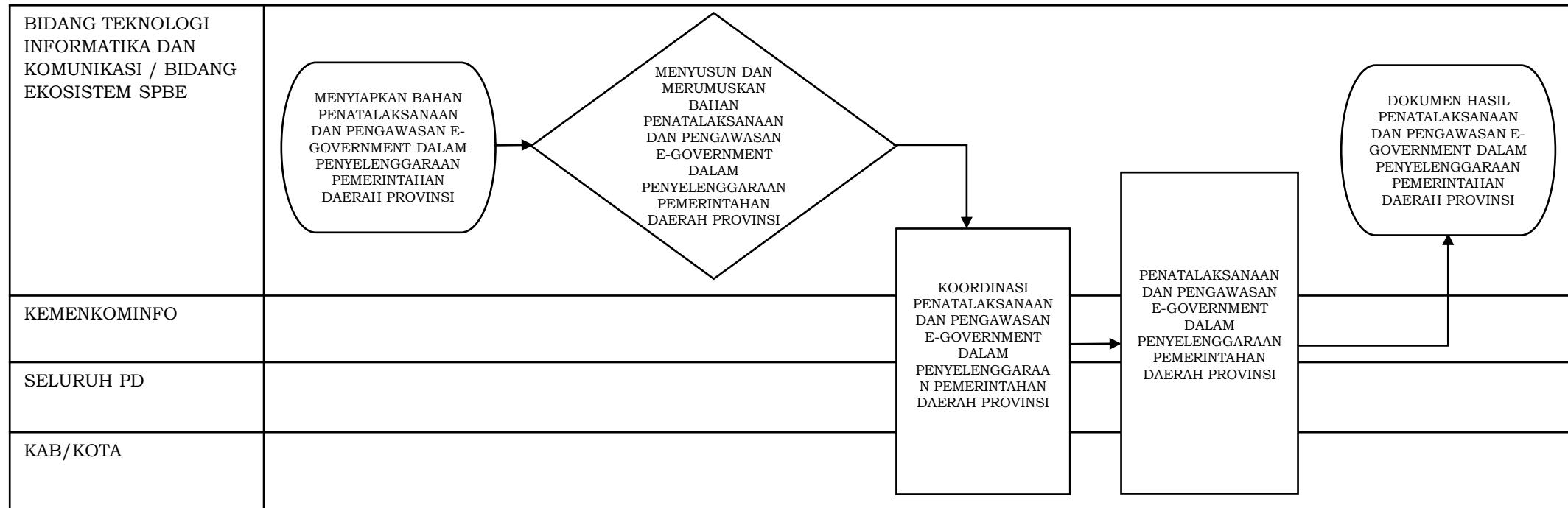


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.01.CFM.01

PROSES : BNT 03.2.16..03 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
SUB PROSES : BNT 03.2.16.03.1.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.03.1.02.01.CFM.01

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. KEMENKOMINFO 2. SELURUH PD 3. KAB/KOTA	Terlaksananya Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Bidang Teknologi Informatika Dan Komunikasi / Bidang Ekosistem SPBE

PETA LINTAS FUNGSI BNT BNT 03.2.16.03.1.02.01.CFM.01 Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

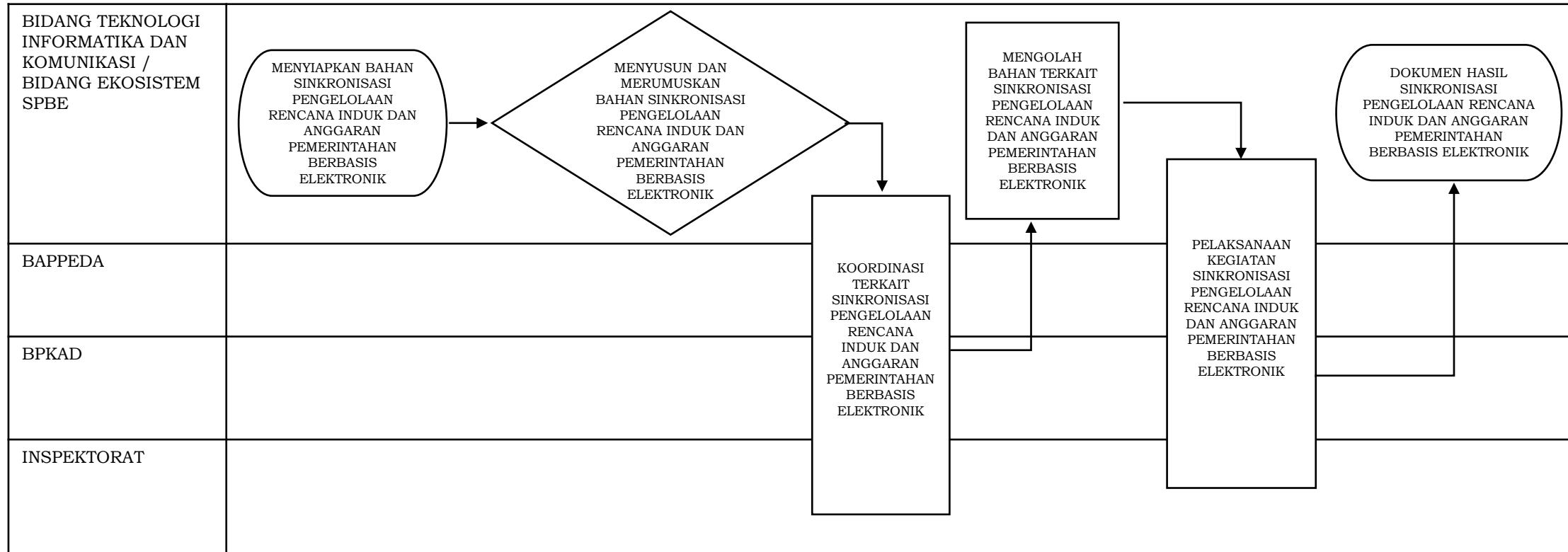


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.02.CFM.02

PROSES : **BNT 03.2.16..03 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**
SUB PROSES : **BNT 03.2.16.03.1.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
LINTAS FUNSI : **BNT 03.2.16.03.1.02.02.CFM.02**

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. BAPPEDA 2. BPKAD 3. INSPEKTORAT	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bidang Teknologi Informatika Dan Komunikasi / Bidang Ekosistem SPBE

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.02.CFM.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

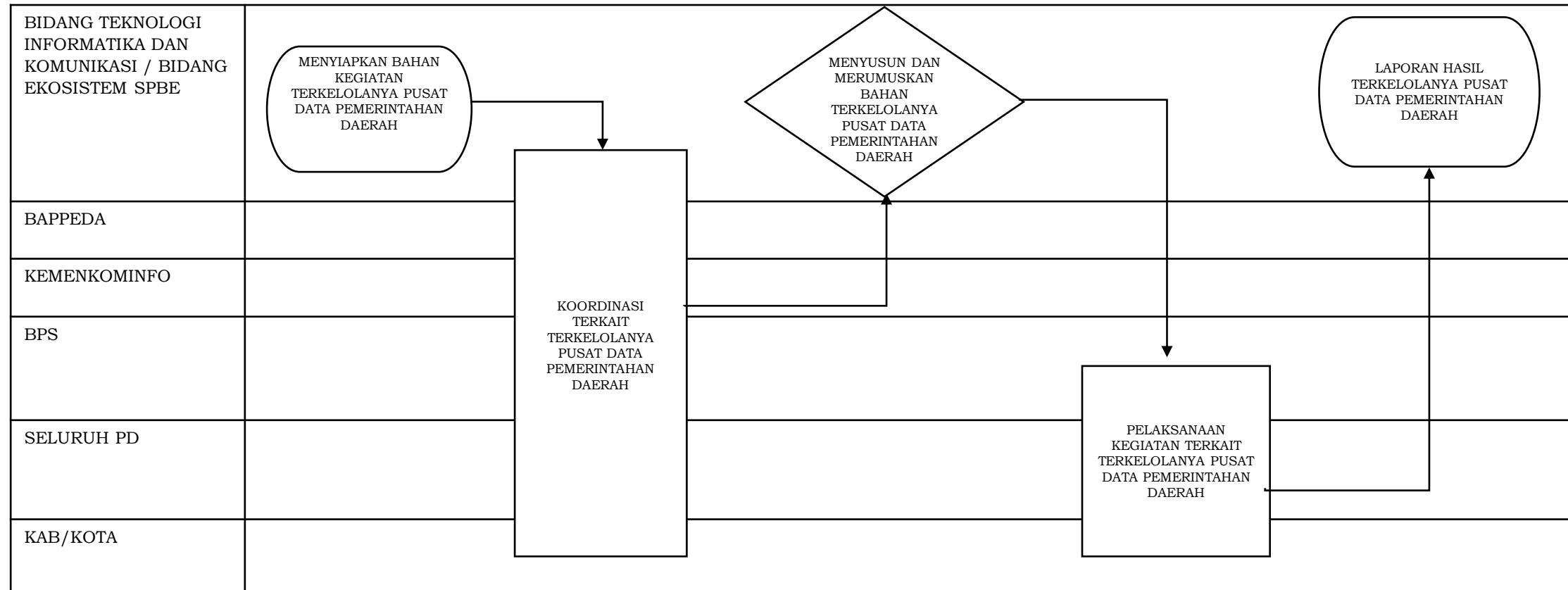


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.03.CFM.03

PROSES : **BNT 03.2.16..03 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**
SUB PROSES : **BNT 03.2.16.03.1.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
LINTAS FUNSI : **BNT 03.2.16.03.1.02.03.CFM.03**

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1. BAPPEDA 2. KEMENKOMINFO 3. BPS 4. SELURUH PD 5. KAB/KOTA	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Bidang Teknologi Informatika Dan Komunikasi / Bidang Ekosistem SPBE

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.03.CFM.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

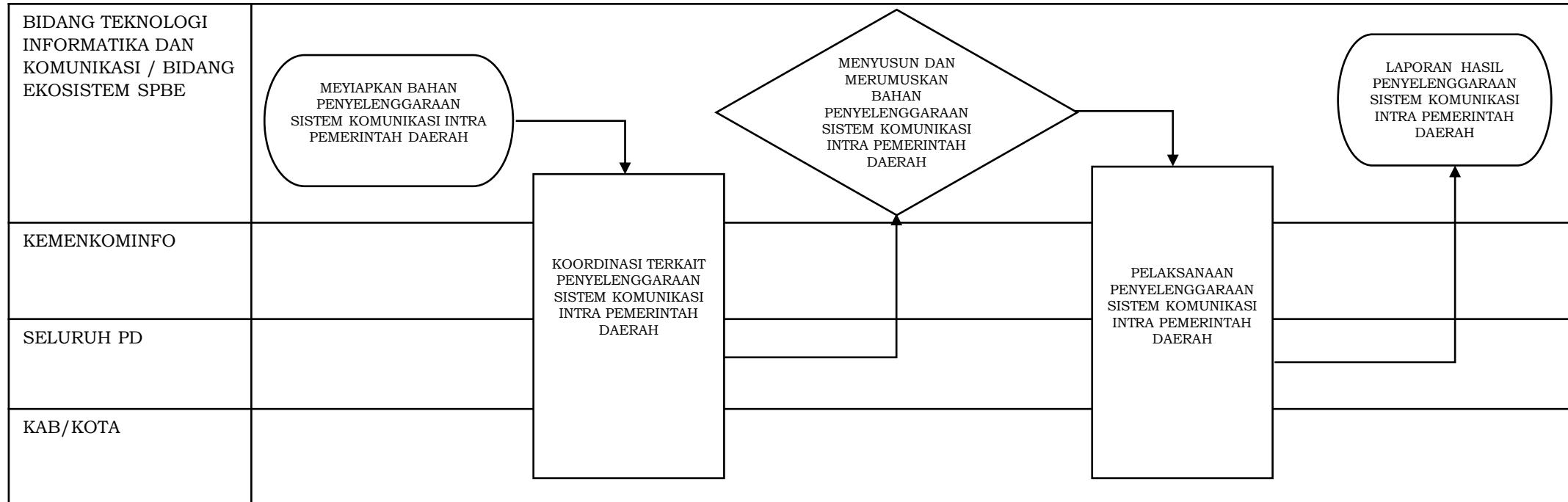


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.04.CFM.04

PROSES : BNT 03.2.16..03 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
SUB PROSES : BNT 03.2.16.03.1.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.03.1.02.04.CFM.04

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1. KEMENKOMINFO 2. SELURUH PD 3. KAB/KOTA	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Bidang Teknologi Informatika Dan Komunikasi / Bidang Ekosistem SPBE

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.04.CFM.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah



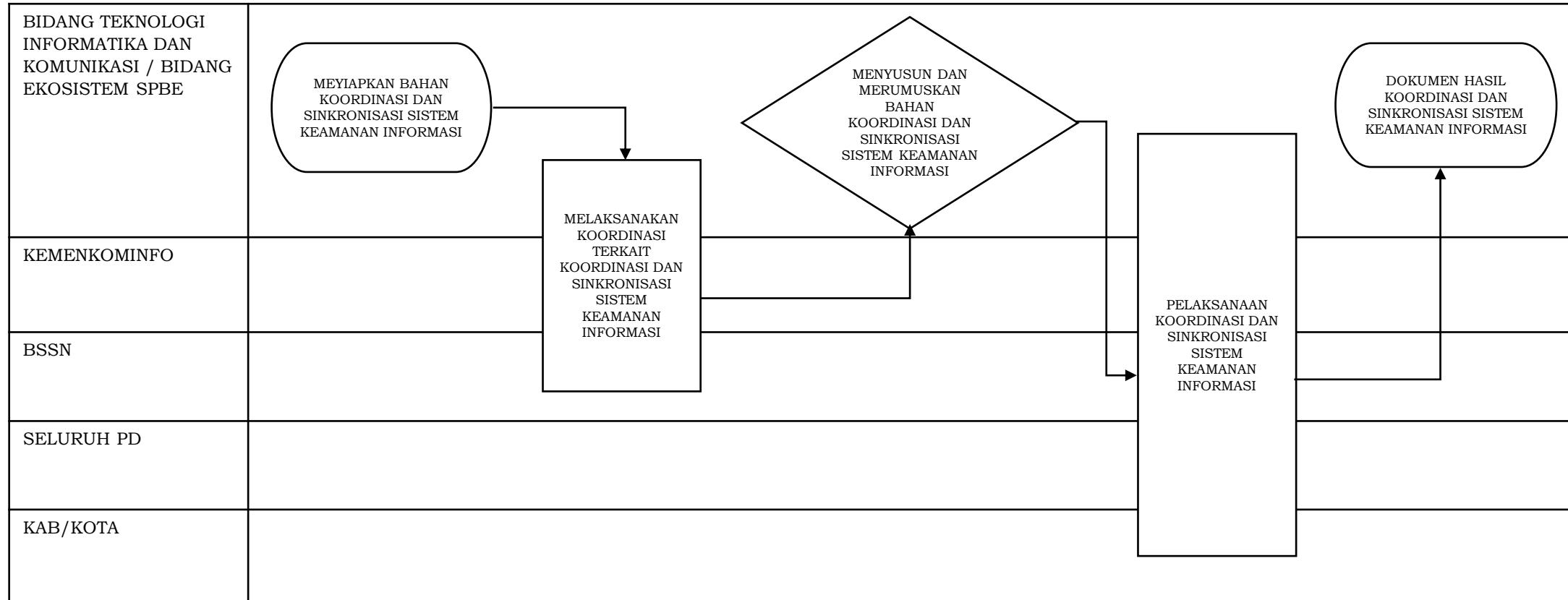
TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.05.CFM.05

PROSES
SUB PROSES
LINTAS FUNSI

: BNT 03.2.16..03 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
: BNT 03.2.16.03.1.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
: BNT 03.2.16.03.1.02.05.CFM.05

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1. KEMENKOMINFO 2. BSSN 3. SELURUH PD 4. KAB/KOTA	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Bidang Teknologi Informatika Dan Komunikasi / Bidang Ekosistem SPBE

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.05.CFM.05 Koordinasi Dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

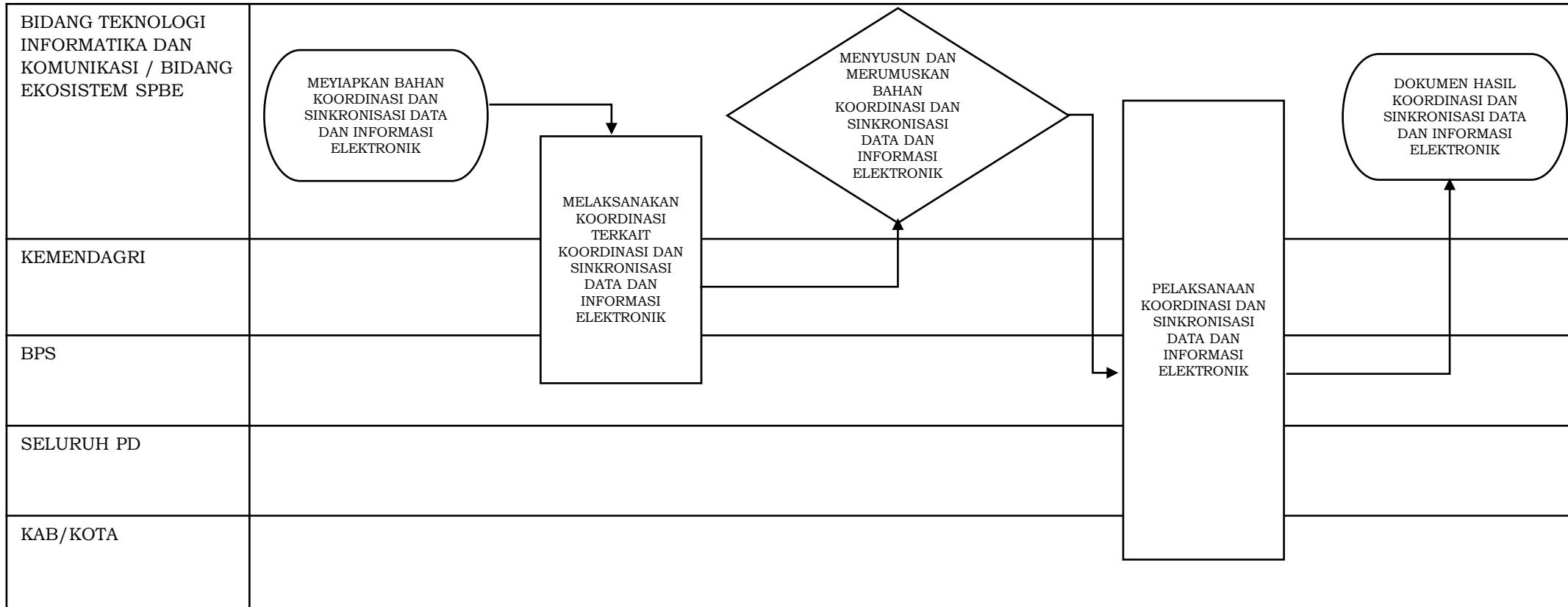


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.06.CFM.06

PROSES : BNT 03.2.16..03 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
SUB PROSES : BNT 03.2.16.03.1.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.03.1.02.06.CFM.06

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik	1. KEMENDAGRI 2. BPS 3. SELURUH PD 4. KAB/KOTA	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik	Bidang Teknologi Informatika Dan Komunikasi / Bidang Ekosistem SPBE

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.06.CFM.06 Koordinasi Dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik

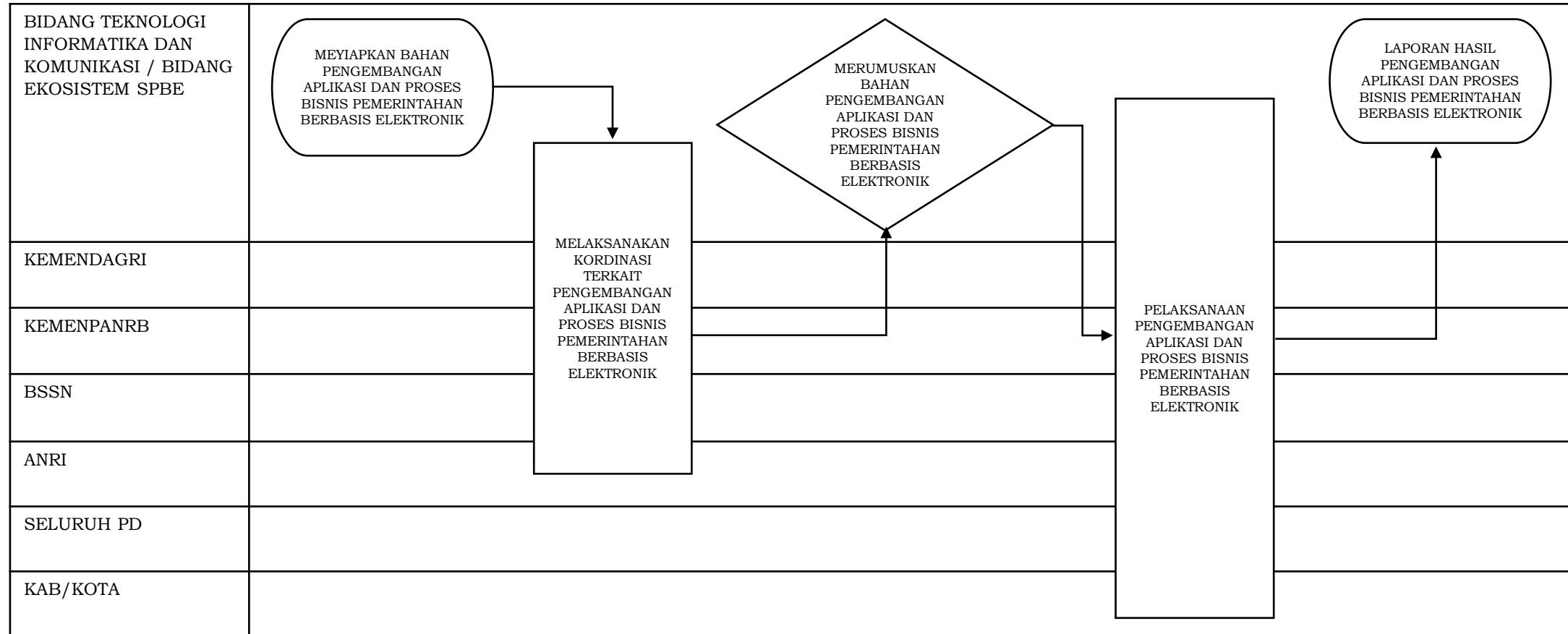


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.07.CFM.07

PROSES : BNT 03.2.16..03 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
SUB PROSES : BNT 03.2.16.03.1.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.03.1.02.07.CFM.07

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. KEMENDAGRI 2. KEMENPANRB 3. BSSN 4. ANRI 5. SELURUH PD 6. KAB/KOTA	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi / Bidang Ekosistem SPBE

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.07.CFM.07 Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

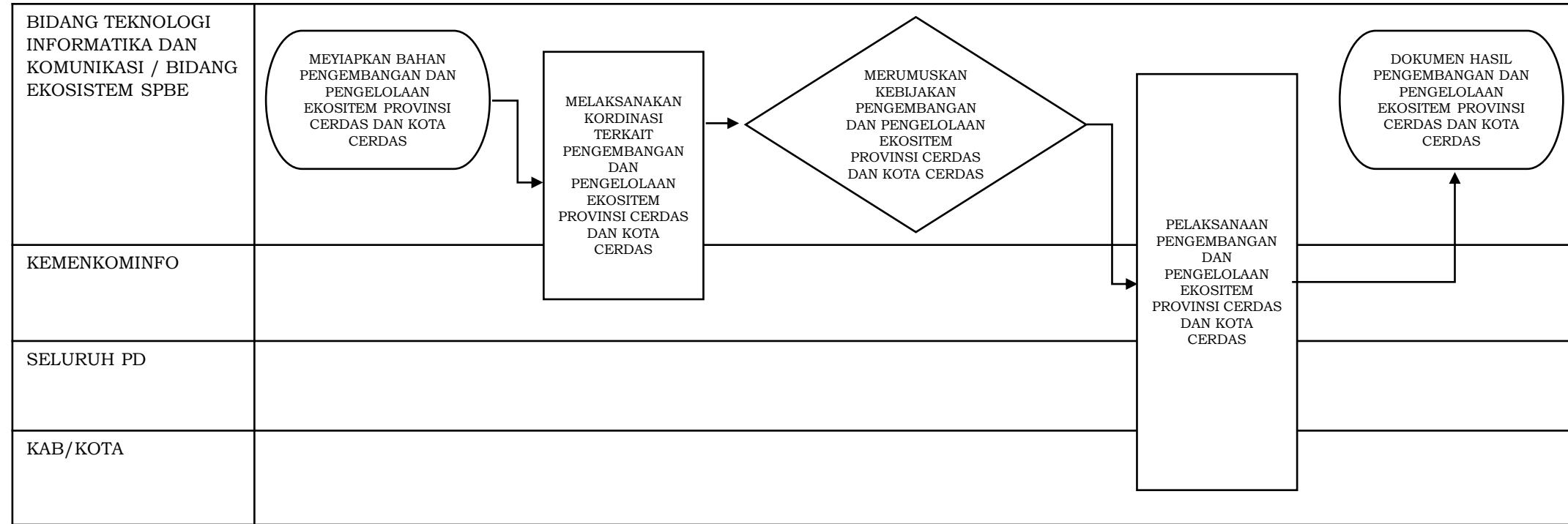


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.09.CFM.08

PROSES : BNT 03.2.16..03 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
SUB PROSES : BNT 03.2.16.03.1.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.03.1.02.09.CFM.08

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	1. KEMENKOMINFO 2. SELURUH PD 3. KAB/KOTA	Terlaksananya program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Bidang Teknologi Informatika Dan Komunikasi / Bidang Ekosistem SPBE

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.09.CFM.08 Pengembangan dan Pengelolaan Ekositem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas

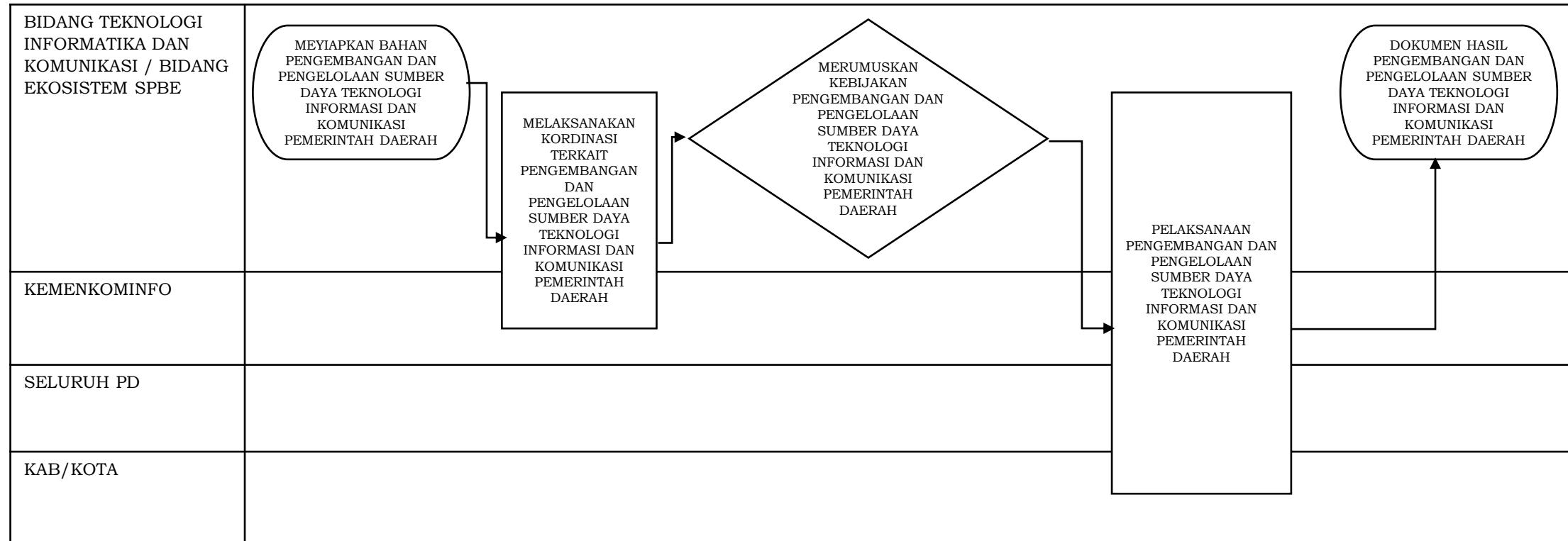


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.10.CFM.09

PROSES : BNT 03.2.16..03 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
SUB PROSES : BNT 03.2.16.03.1.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.03.1.02.10.CFM.09

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. KEMENKOMINFO 2. SELURUH PD 3. KAB/KOTA	Terlaksananya Program Inovasi Yang Diimplementasikan Sesuai Dengan Masterplan Smart City	Bidang Teknologi Informatika Dan Komunikasi / Bidang Ekosistem SPBE

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.10.CFM.09 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

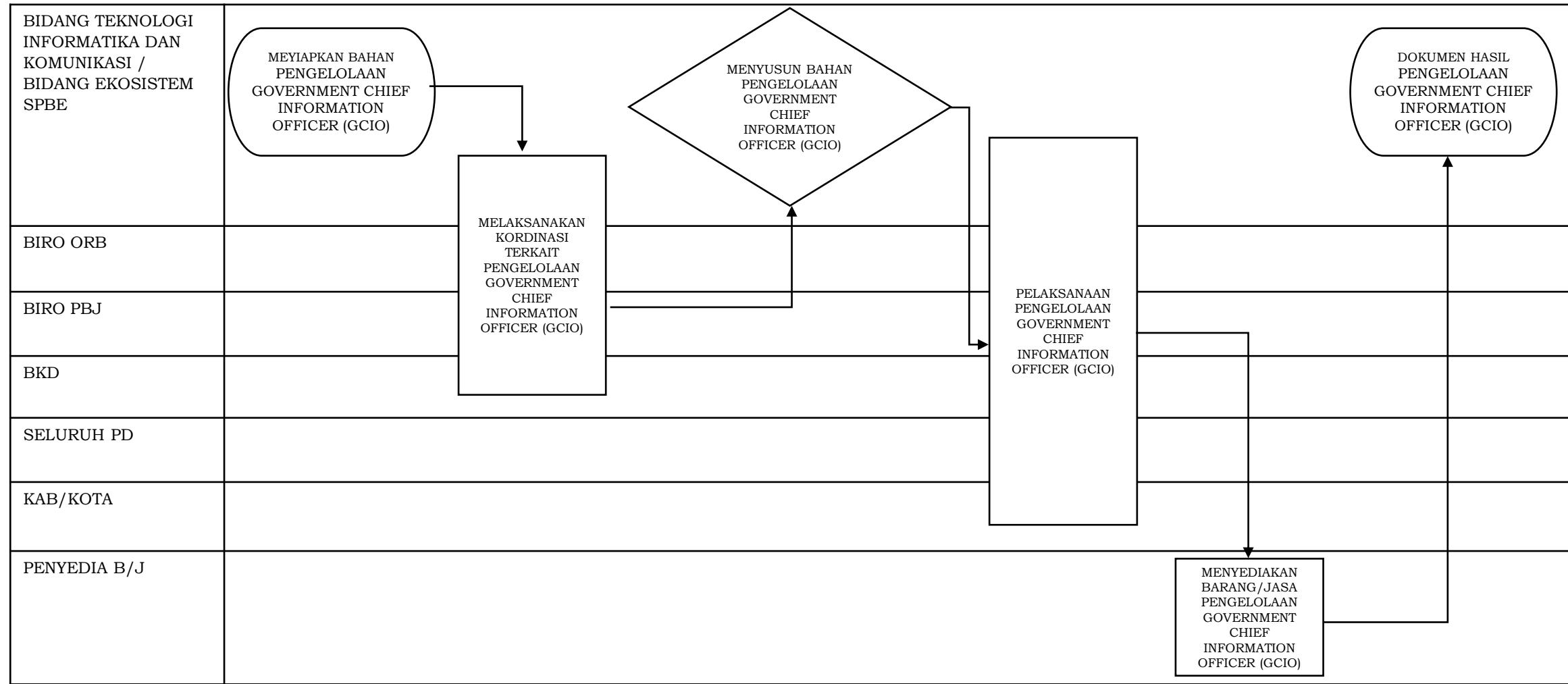


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.11.CFM.10

PROSES : BNT 03.2.16..03 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
SUB PROSES : BNT 03.2.16.03.1.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.03.1.02.11.CFM.10

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1. BIRO ORB 2. BIRO PBJ 3. BKD 4. SELURUH PD 5. KAB/KOTA 6. PENYEDIA B/J	Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Bidang Teknologi Informatika Dan Komunikasi / Bidang Ekosistem SPBE

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.11.CFM.10 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

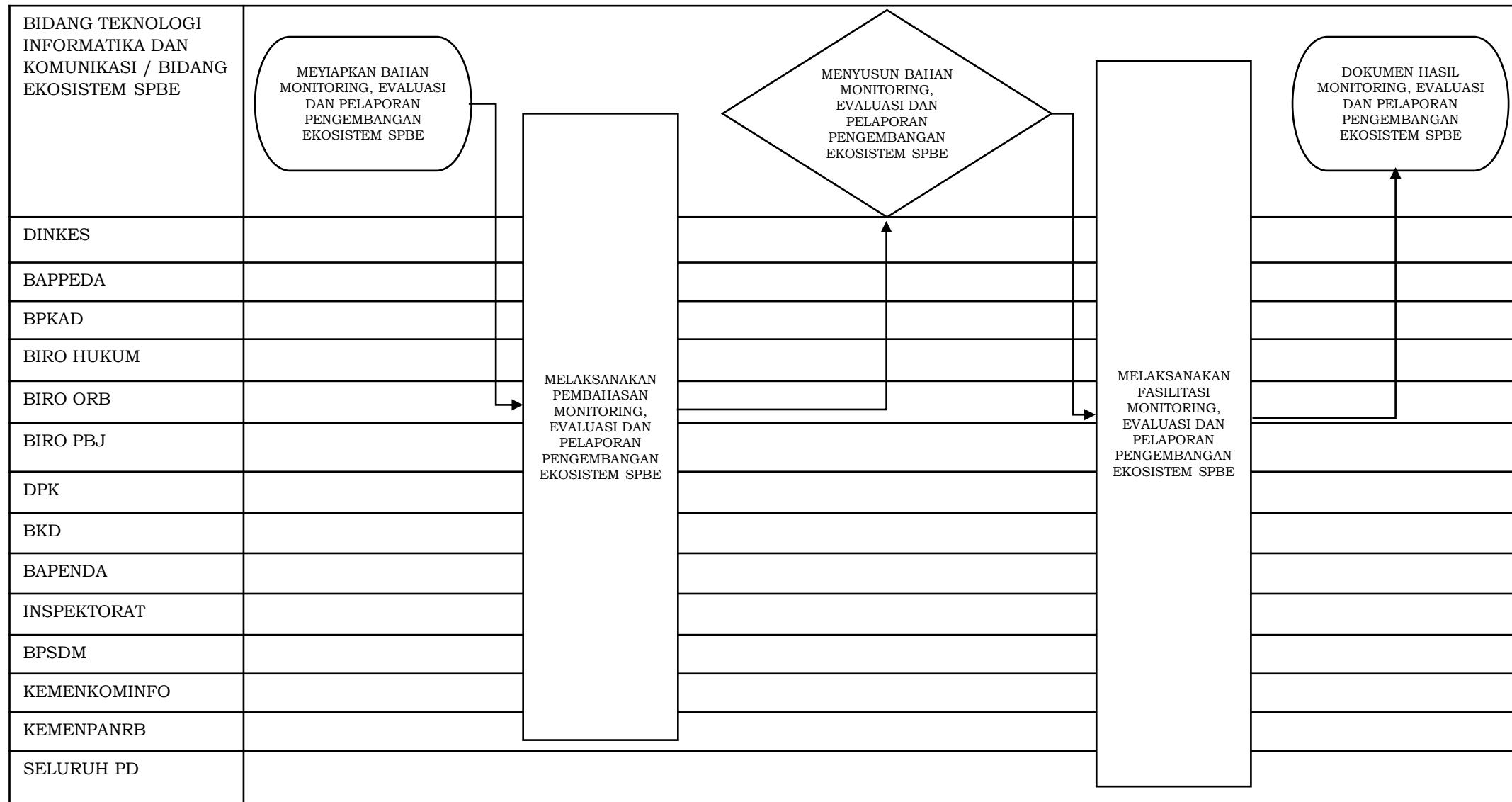


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.12.CFM.11

PROSES : BNT 03.2.16..03 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
SUB PROSES : BNT 03.2.16.03.1.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.16.03.1.02.12.CFM.11

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1. DINKES 2. BAPPEDA 3. BPKAD 4. BIRO HUKUM 5. BIRO ORB 6. BIRO PBJ 7. DPK 8. BKD 9. BAPENDA 10.INSPEKTORAT 11.BPSDM 12.KEMENKOMINFO 13.KEMENPANRB 14.SELURUH PD	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Bidang Teknologi Informatika Dan Komunikasi / Bidang Ekosistem SPBE

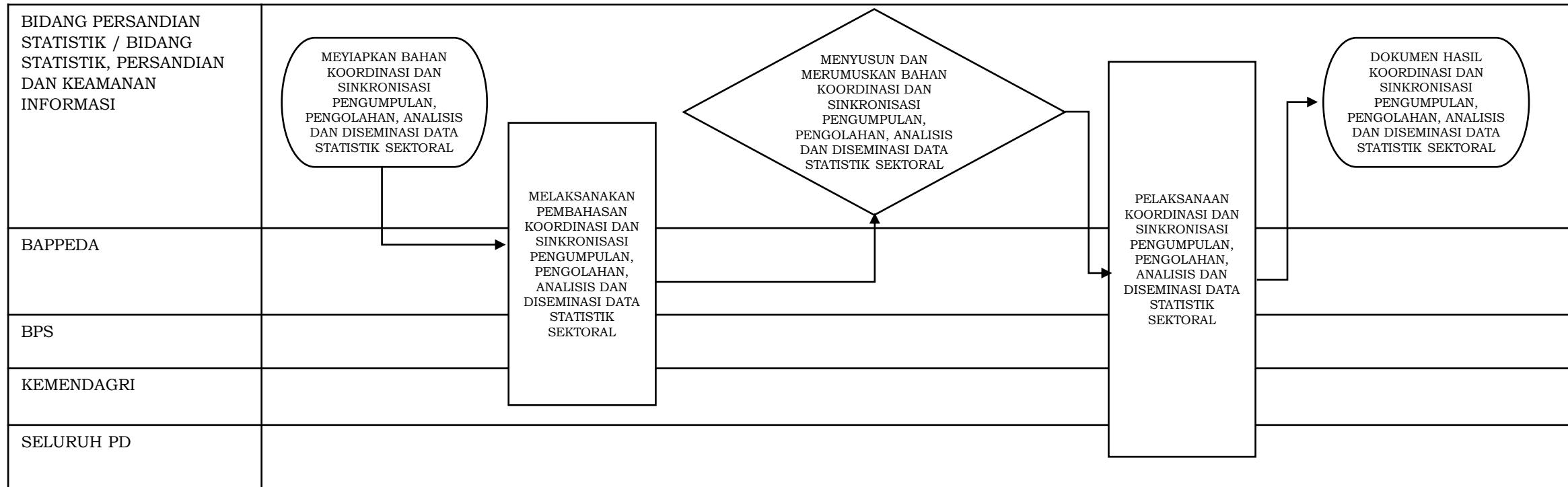
PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.16.03.1.02.12.CFM.11 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.20.02.1.01.01CFM.01

PROSES : BNT 03.2.20..02 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
SUB PROSES : BNT 03.2.20.02.1.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.20.02.1.01.01.CFM.01

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1. BAPPEDA 2. BPS 3. KEMENDAGRI 4. SELURUH PD	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Bidang Persandian Statistik/Bidang Statistik, Persandian Dan Keamanan Informasi

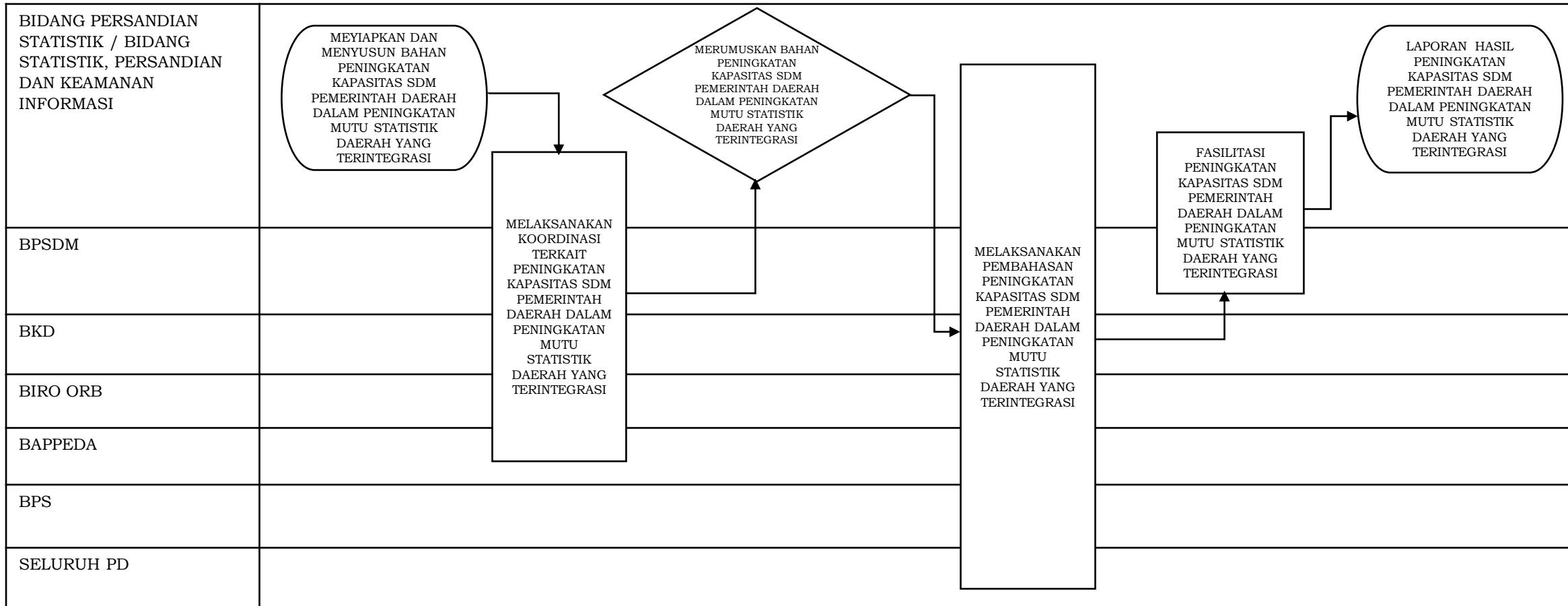


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.20.02.1.01.02CFM.02

PROSES : BNT 03.2.20..02 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
SUB PROSES : BNT 03.2.20.02.1.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.20.02.1.01.02.CFM.02

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	1. BPSDM 2. BKD 3. BIRO ORB 4. BAPPEDA 5. BPS 6. SELURUH PD	Meningkatnya Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Bidang Persandian Statistik/Bidang Statistik, Persandian Dan Keamanan Informasi

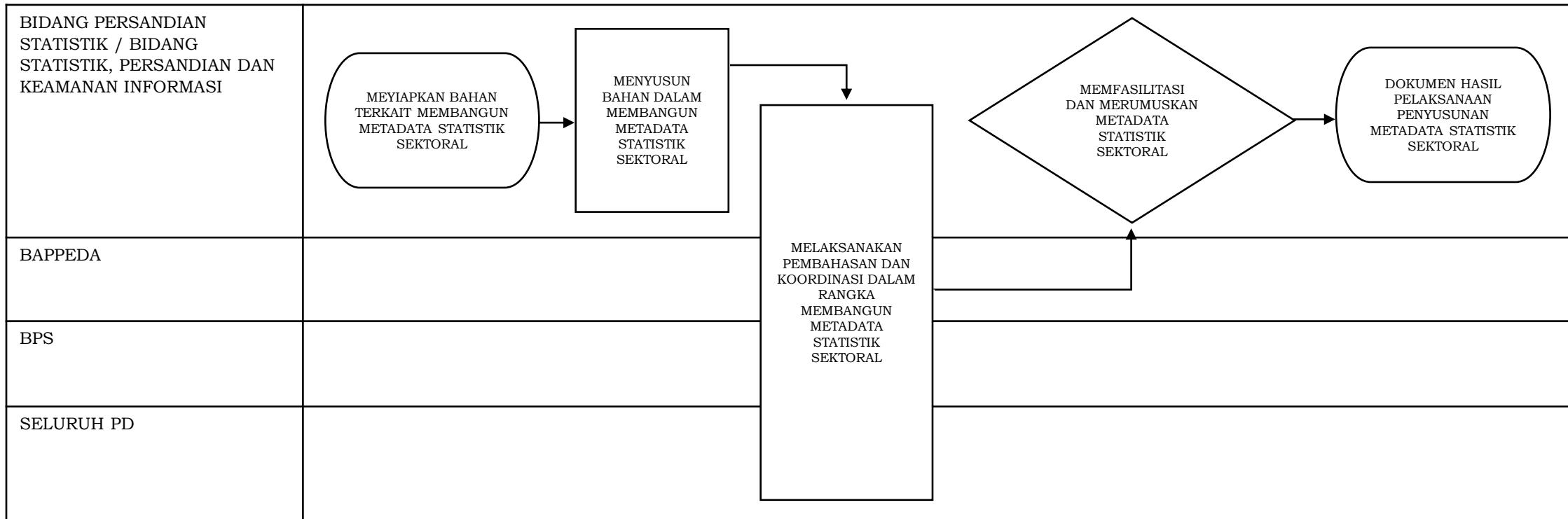
PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.20.02.1.01.02.CFM.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.20.02.1.01.03.CFM.03

PROSES : BNT 03.2.20..02 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
SUB PROSES : BNT 03.2.20.02.1.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.20.02.1.01.03.CFM.03

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Membangun Metadata Statistik Sektoral	1. BAPPEDA 2. BPS 3. SELURUH PD	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Bidang Persandian Statistik/Bidang Statistik, Persandian Dan Keamanan Informasi

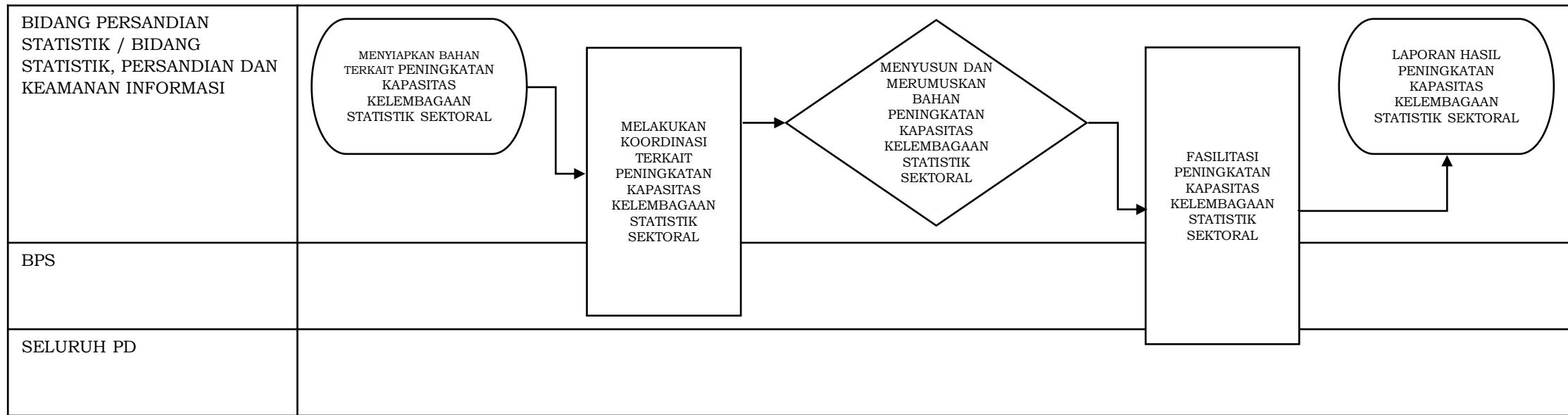


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.20.02.1.01.04.CFM.04

PROSES : BNT 03.2.20..02 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
SUB PROSES : BNT 03.2.20.02.1.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.20.02.1.01.04.CFM.04

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	1. BPS 2. SELURUH PD	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Bidang Persandian Statistik/Bidang Statistik, Persandian Dan Keamanan Informasi

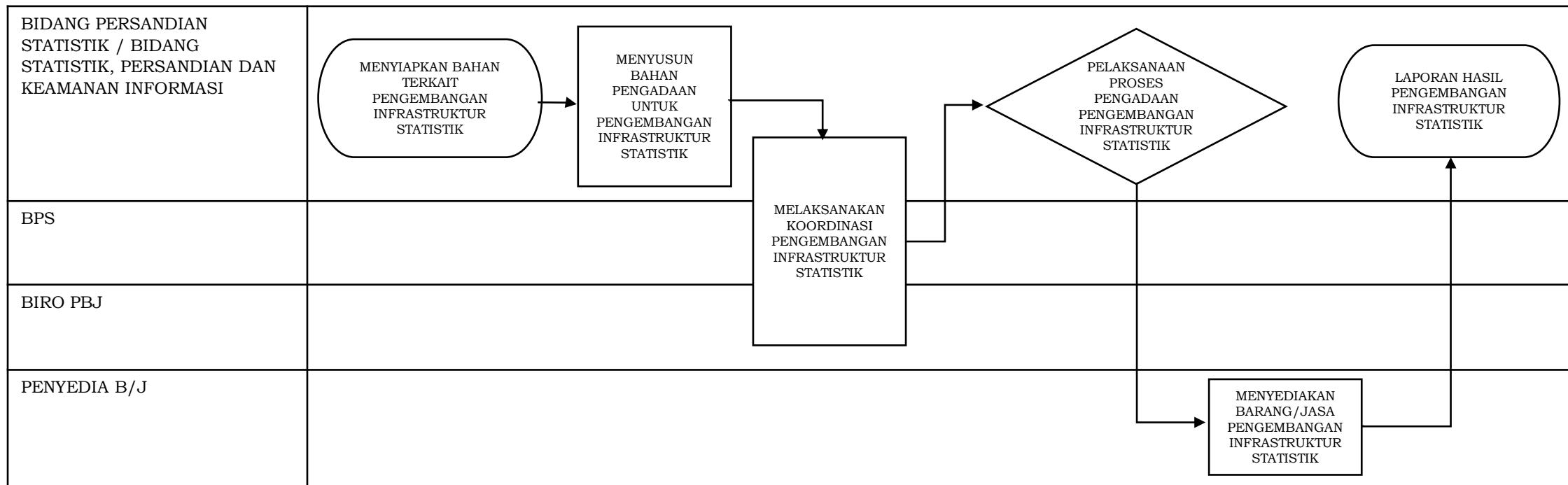
PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.20.02.1.01.04.CFM.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.20.02.1.01.05.CFM.05

PROSES : BNT 03.2.20..02 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
SUB PROSES : BNT 03.2.20.02.1.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.20.02.1.01.05.CFM.05

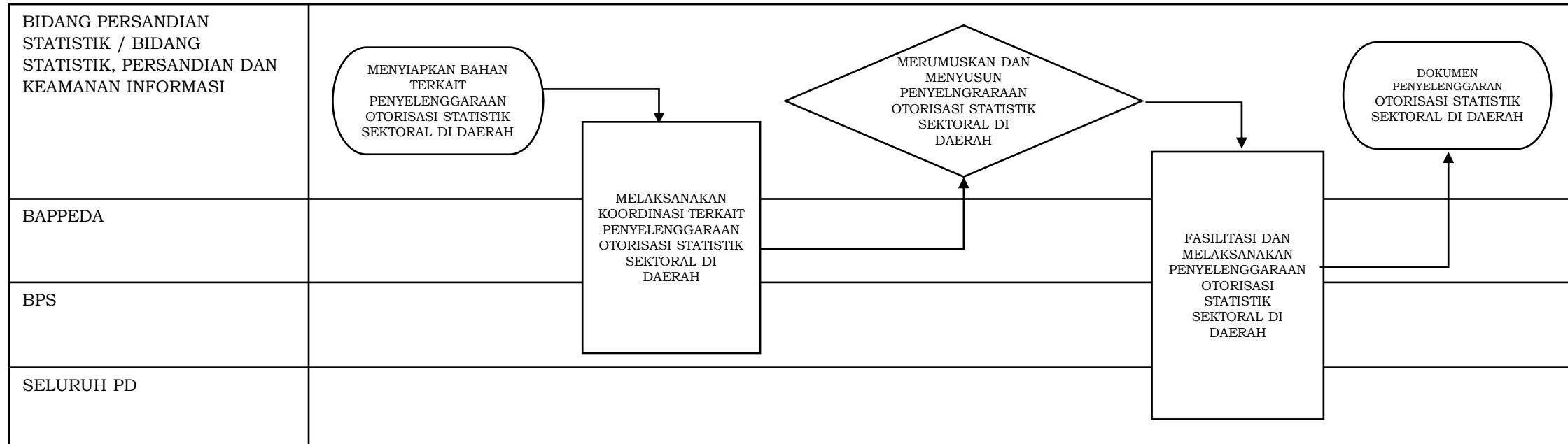
NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengembangan Infrastruktur	1. BPS 2. BIRO PBJ 3. PENYEDIA B/J	Berkembangnya Infrastruktur	Bidang Persandian Statistik/Bidang Statistik, Persandian Dan Keamanan Informasi



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.20.02.1.01.06.CFM.06

PROSES : BNT 03.2.20..02 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
SUB PROSES : BNT 03.2.20.02.1.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.20.02.1.01.06.CFM.06

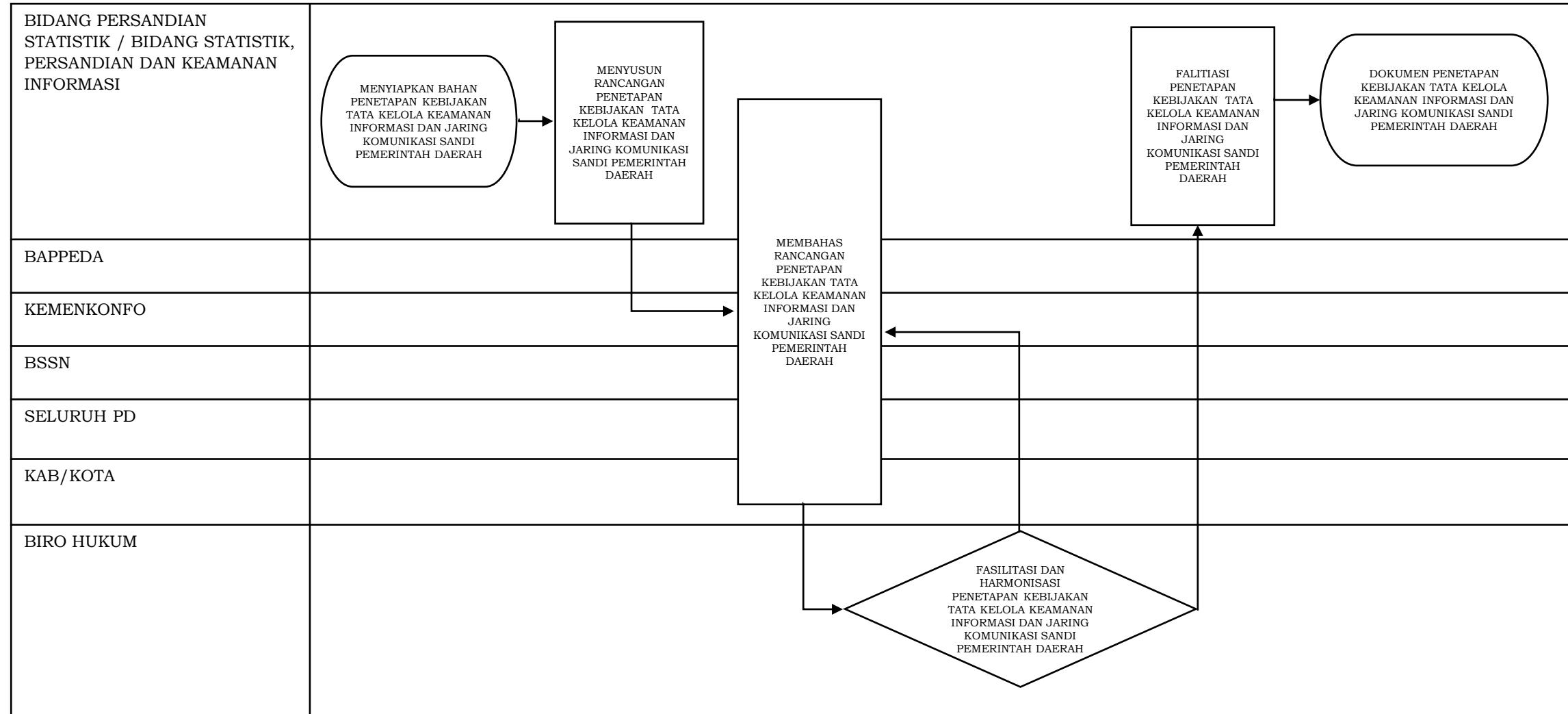
NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah	1. BAPPEDA 2. BPS 3. SELURUH PD	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah	Bidang Persandian Statistik/Bidang Statistik, Persandian Dan Keamanan Informasi



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.21.02.1.01.01.CFM.01

PROSES : BNT 03.2.21..02 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
SUB PROSES : BNT 03.2.21.02.1.01 PENYELENGGARAAN PERSANDAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.21.02.1.01.01.CFM.01

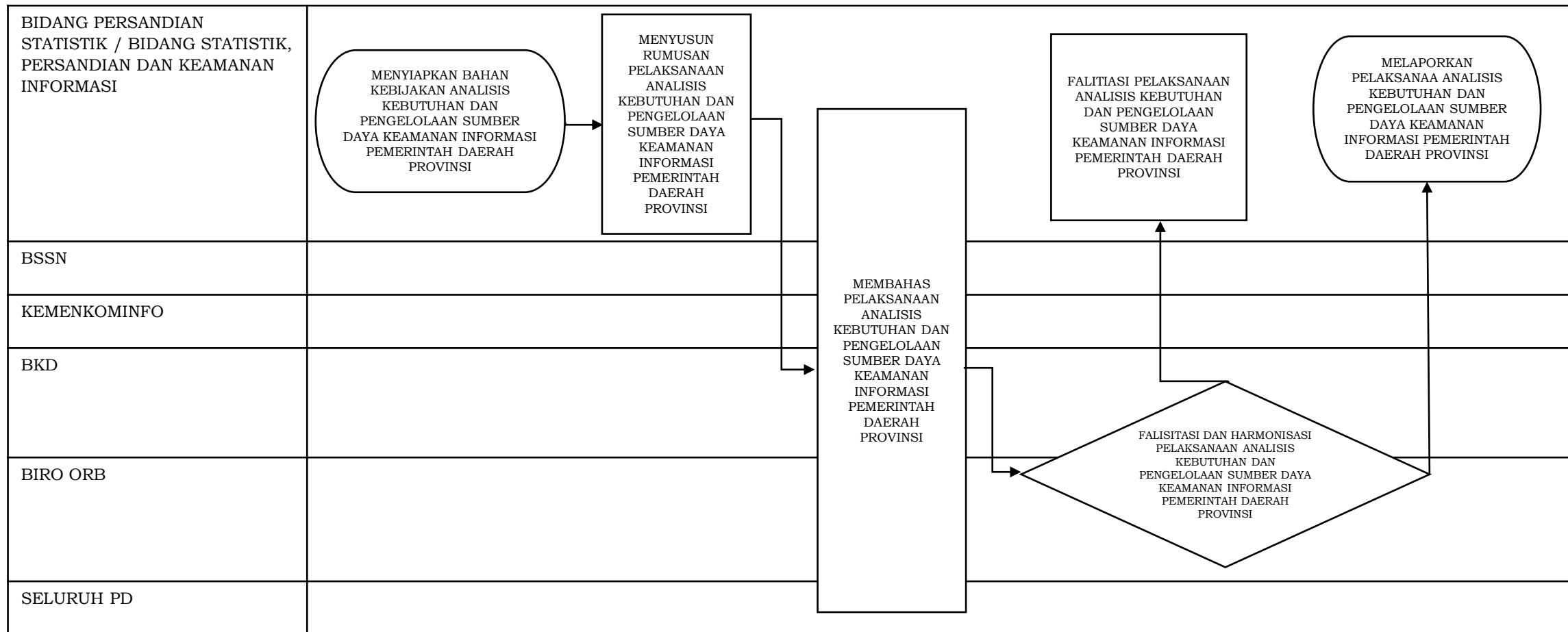
NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1. BAPPEDA 2. KEMENKOMINFO 3. BSSN 4. SELURUH PD 5. KAB/KOTA 6. BIRO HUKUM	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Bidang Persandian Statistik/Bidang Statistik, Persandian Dan Keamanan Informasi



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.21.02.1.01.02.CFM.02

PROSES : BNT 03.2.21..02 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
SUB PROSES : BNT 03.2.21.02.1.01 PENYELENGGARAAN PERSANDAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.21.02.1.01.02.CFM.02

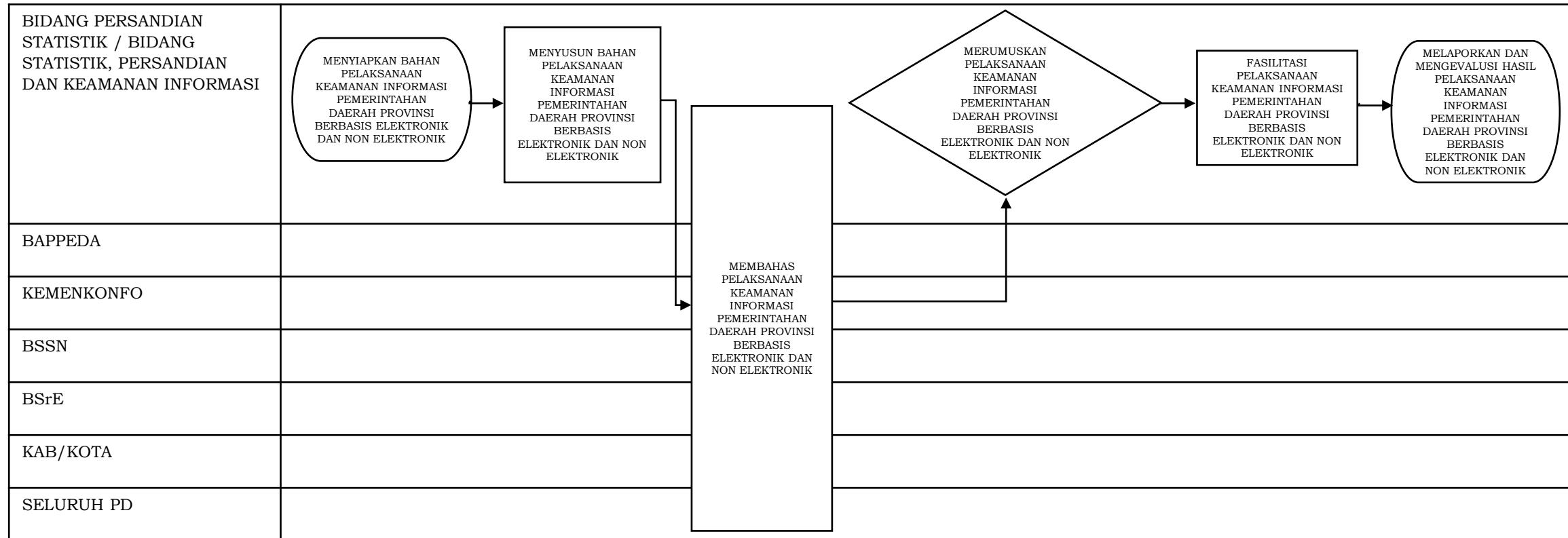
NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. BSSN 2. KEMENKOMINFO 3. BKD 4. BIRO ORB 5. SELURUH PD	Terlaksananya Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Bidang Persandian Statistik/Bidang Statistik, Persandian Dan Keamanan Informasi



TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.21.02.1.01.03.CFM.03

PROSES : BNT 03.2.21..02 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
SUB PROSES : BNT 03.2.21.02.1.01 PENYELENGGARAAN PERSANDAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.21.02.1.01.03.CFM.03

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	1. BAPPEDA 2. KEMENKOMINFO 3. BSSN 4. BSrE 5. KAB/KOTA 6. SELURUH PD	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Bidang Persandian Statistik/Bidang Statistik, Persandian Dan Keamanan Informasi

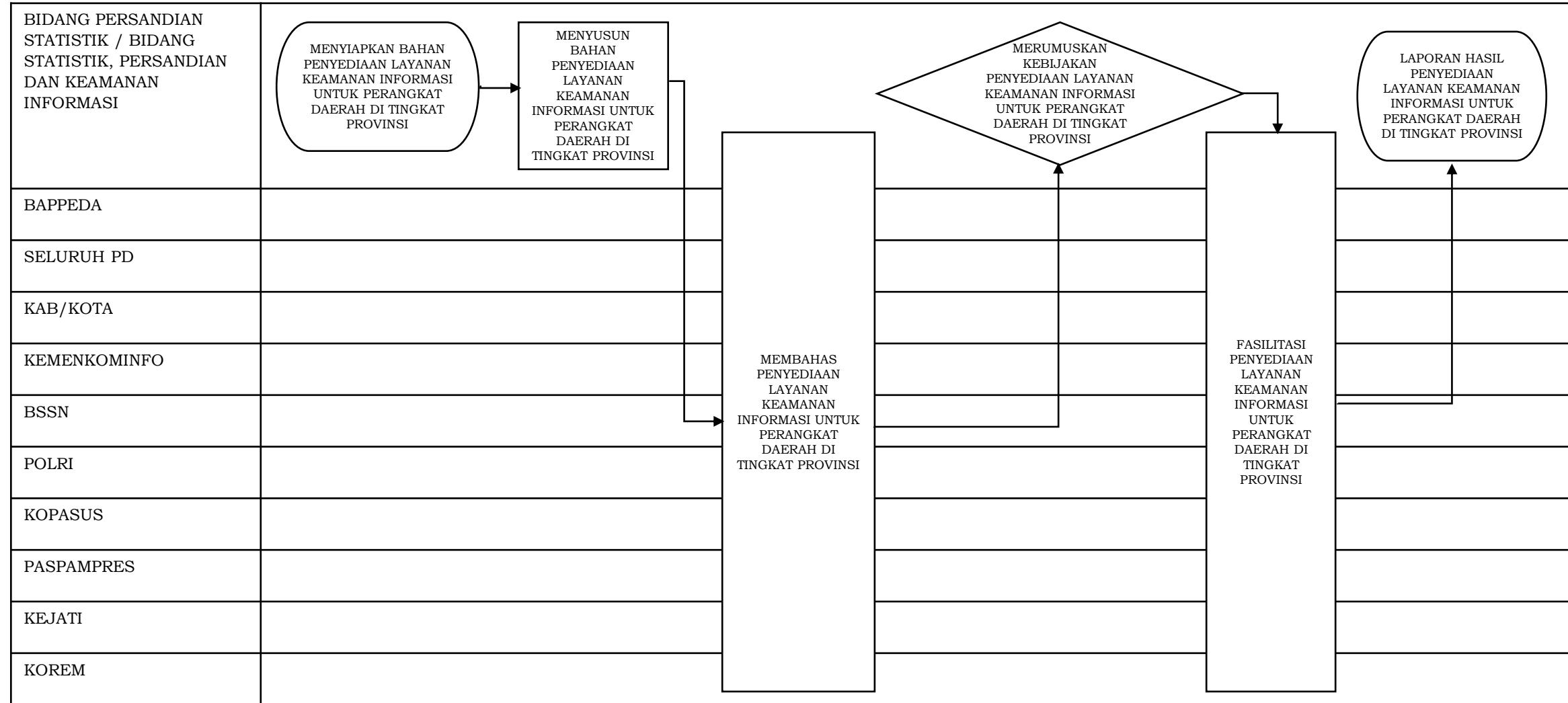


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.21.02.1.01.04.CFM.04

PROSES : **BNT 03.2.21..02 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**
SUB PROSES : **BNT 03.2.21.02.1.01 PENYELENGGARAAN PERSANDAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
LINTAS FUNSI : **BNT 03.2.21.02.1.01.04.CFM.04**

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. BAPPEDA 2. SELURUH PD 3. KAB/KOTA 4. KEMENKOMINFO 5. BSSN 6. POLRI 7. KOPASUS 8. PASPAMPRES 9. KEJATI 10. KOREM	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Untuk Perangkat Daerah Di Tingkat Provinsi	BIDANG PERSANDIAN STATISTIK/BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.21.02.1.01.04.CFM.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Untuk Perangkat Daerah Di Tingkat Provinsi

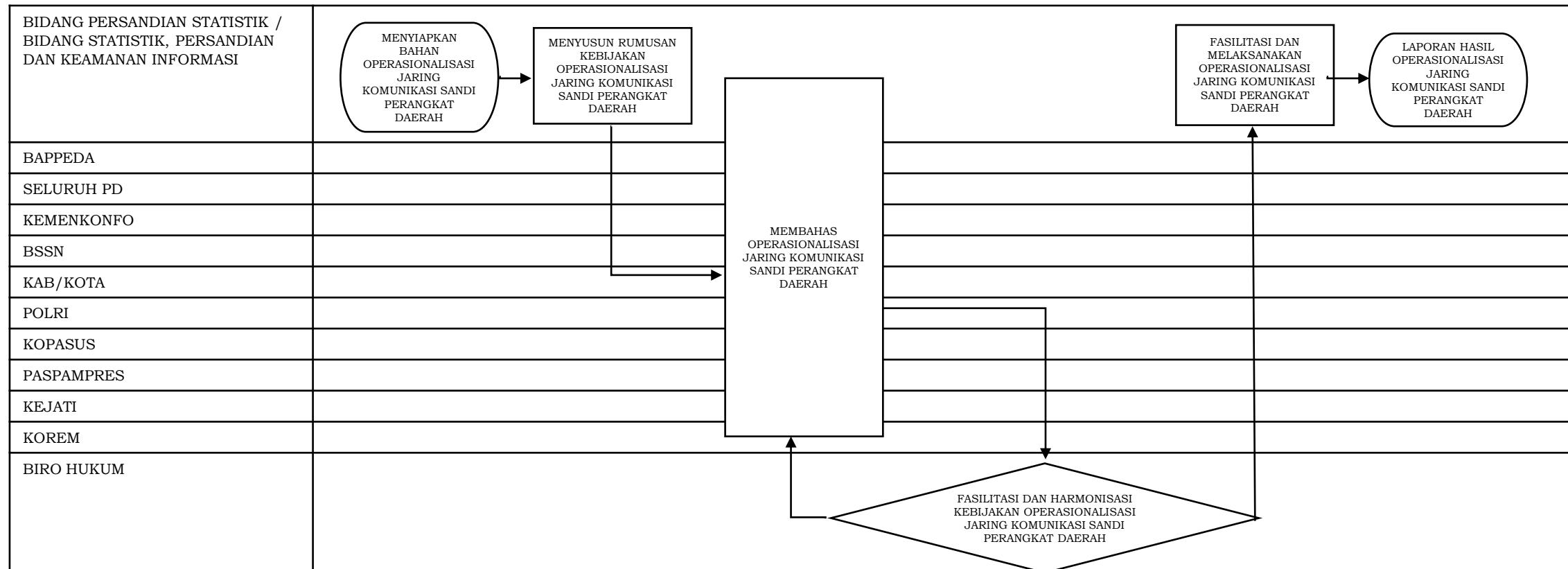


TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 03.2.21.02.1.02.01.CFM.01

PROSES : BNT 03.2.21..02 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
SUB PROSES : BNT 03.2.21.02.1.02 PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNSI : BNT 03.2.21.02.1.02.01.CFM.01

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1. BAPPEDA 2. SELURUH PD 3. KEMENKOMINFO 4. BSSN 5. KAB/KOTA 6. POLRI 7. KOPASUS 8. PASPAMPRES 9. KEJATI 10. KOREM 11. BIRO HUKUM	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah	Bidang Persandian Statistik/Bidang Statistik, Persandian Dan Keamanan Informasi

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.2.21.02.1.02.01.CFM.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah



KETERANGAN SINGKATAN

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	BNT	BANTEN
2	CFM	CROSS FUNCTIONAL MAP
3	PD	PERANGKAT DAERAH
4	SPBE	SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
5	BIRO ORB	BIRO ORGANISASI REFORMASI BIROKRASI
6	BIRO ADPIM	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
7	BIRO PBJ	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
8	BAPPEDA	BADAN PERENCANAAN DAERAH
9	BKD	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
10	BPKAD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
11	BPSDM	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
12	DPK	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
13	DWP	DHARMA WANITA PERSATUAN
14	KEMENKOMINFO	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	KEMENPANRB	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
16	KEMENDAGRI	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
17	KEMENAG	KEMENTERIAN AGAMA
18	ANRI	ARSIP NASIONAL REPUBLIC INDONESIA
19	BSSN	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
20	BSRE	BALAI SERTIFIKAT ELEKTRONIK
21	BPS	BADAN PUSAT STATISTIC
22	POLRI	KEPOLISIAN REPUBLIC INDONESIA
23	KOPASUS	KOMANDO PASUKAN KHUSUS
24	PASPAMPRES	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN
25	KEJATI	KEJAKSAAN TINGGI
26	KOREM	KOMANDO RESORT MILITER
27	KI	KOMISI INFORMASI
28	KPID	KOMISI INFORMASI PENYIARAN DAERAH
29	KPA	KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
30	IJTI	IKATAN JURNALISTIK TELEVISI INDONESIA
31	PRSSNI	PERSATUAN RADIO SIARAN SWASTA NASIONAL INDONESIA
32	PWI	PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
33	PENYEDIA B/J	PENYEDIA BARANG JASA



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B Blok F No. 1 Curug, Kota Serang – Provinsi Banten

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN**

Nomor : 188.4/Kep.063-Diskominfo/2023

TENTANG
**PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI BANTEN**
TAHUN 2023-2026

**KEPALA DINAS KOMUNKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN**

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perlu dibentuk Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencan Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas komunikasi, statistik dan persandian provinsi banten.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5587) sebagaimana telah diubah

- beberpaka terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
 8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah.

M E M U T U S K A N :

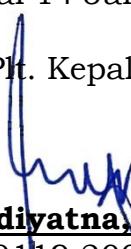
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang meruapakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas mempedomani hal-hal sebagai berikut :
1. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kerja Tahunan yang disusun;
 2. Mempedomani seluruh dokumen perencanaan terkait, diantaranya : RPJMD, RKPD, Renja dan Dokumen Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten ;
 3. Mempedomani analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats) dan menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
 4. Menganalisis Data/Informasi;
 5. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanaan pada tahun rencana kerja yang disusun. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (output dan outcomes);
 6. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
 7. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
 8. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang menjadi prioritas pada tahun rencana kerja yang disusun;

9. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
10. Melakukan evaluasi rancangan awal (ranwal) RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Ranwal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Ranwal RPJMD mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik, penjabaran visi dan misi kepala daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program dan Kegiatan.

- KETIGA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten bertanggungjawab secara administrasi maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 14 Januari 2022

Plt. Kepala


Didi Hadiyatna, SE, MM
NIP. 19770119 200801 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten
Nomor : 188.4/Kep.063 - Diskominfo/2023
Tanggal : 14 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023-2026
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN**

Penanggung Jawab	:	Didi Hadiyatna, SE, MM,	Plt. Kepala Dinas
Ketua	:	Ai Dewi Suzana, SE, M.Si	Sekretaris
Anggota	:	1. Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Kemitraan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten
		2. Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	Plt. Kepala Bidang Ekosistem Spbe Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten
		3. Sofyan Nuryaman, SH	Perencana Ahli Muda
		4. Eva Sulyana Aprilia, SE, MM	
		5. Eni Yuningsih, SH, MM	
		6. Niluh Jinggan Larasati	
		7. Erna Yuliana	

Plt. Kepala Dinas


Didi Hadiyatna, SE, MM
NIP. 19770119 200801 1 003



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN DAN INDIKATIF

Rencana program kegiatan dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian provinsi banten mengacu pada Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta keputusan menteri dalam negeri 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemukhtarihan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Rencana program tersebut adalah :

- 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.**
- 2. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.**
- 3. Program pengelolaan aplikasi informatika.**
- 4. Program penyelenggaraan statistik sektoral.**
- 5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.**

dari 5 program tersebut di atas mencakup 14 kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut :

➤ **Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi bidang urusan pemerintah fungsi penunjang;**

Indikator Kinerja :

1. Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi memiliki 8 kegiatan sebagai berikut :

I. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd;

3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd;
4. Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd;
5. Koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd;
6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd;
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah.

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
3. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd;
4. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd;
5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd;
6. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
7. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd;
8. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

III. Administrasi Barang Milik Daerah

1. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah skpd;
2. Pengamanan barang milik daerah skpd;
3. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd;

IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
2. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
3. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
4. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;

5. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;

V. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Penyediaan peralatan rumah tangga;
4. Penyediaan bahan logistik kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan bahan/material;
7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
8. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD;
9. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.

VI. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

1. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
2. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
3. Pengadaan mebel;
4. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

VII. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

VIII. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
3. Pemeliharaan mebel
4. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
5. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
6. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

➤ **Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**

Indikator Kinerja :

1. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah;
2. Persentase opd yg mencapai katagori informatif.

Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik memiliki 1 kegiatan sebagai berikut :

I. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi

1. Monitoring opini dan aspirasi publik;
2. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
3. Pengelolaan media komunikasi publik;
4. Pelayanan informasi publik;
5. Kemitraan dengan pemangku kepentingan;
6. Manajemen komunikasi krisis;
7. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

8. Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah;
9. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
10. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi.

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**

Indikator Kinerja :

1. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika memiliki 2 Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

1. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi;
2. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi;
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;

7. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas;
9. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
10. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

A. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Indikator Program :

1. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Program penyelenggaraan statistik sektoral memiliki 1 Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral;
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
5. Pengembangan Infrastruktur;
6. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

A. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Indikator Program :

1. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi memiliki 2 Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi.

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi.

1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel 6.1
Program Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

No	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan (output)
1	2	3	4	5
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Percentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
			Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100

			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
			Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

				Pemerintahan Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
2	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub Kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
		Persentase opd yg mencapai katagori informatif		

3	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub Kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub Kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
4	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah OPD selama kurun waktu yang sama dikali 100

5	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100
			Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100

Tabel 6.2
**Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026**

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI		
			2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RESTRA PERANGKAT DAERAH					
			TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARG ET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	Persen	100		100		100		100		100,00					
	Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF	Persen	39,39		48,48		57,58		66,67		66,67					
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100%	7.800.000.000	100%	7.500.000.000	100%	7.500.000.000	100%	7.600.000.000		7.600.000.000				
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persen	90,91	17.253.415.281	93,94	15.743.485.281	96,97	21.077.371.000	100	14.800.178.000	100	14.800.178.000				
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	100	5.197.137.719	100	4.547.137.719	100	5.200.000.000	100	5.100.000.000	100	5.100.000.000				
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100%	17.253.415.281	100%	15.743.485.281	100%	21.077.371.000	100%	14.800.178.000	100%	14.800.178.000				
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		100%	5.197.137.719	100%	4.547.137.719	100%	5.200.000.000	100%	5.100.000.000		5.100.000.000				
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektor dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persen	100%	1.400.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000				
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persen	100%	1.400.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000				

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	54,60	3.500.000.000	64,6	2.200.000.000	74,60	2.800.000.000	84,60	2.900.000.000	84,60	2.900.000.000
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100%	3.500.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.700.000.000	100%	2.800.000.000	100%	2.800.000.000
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persen	0	-	0	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (%)	Persen	100	22.669.874.000	100	21.816.268.000	100	22.606.831.000	100	23.531.923.000	100	23.531.923.000
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	13.980.301.000	100	14.676.316.000	100	15.407.132.000	100	16.179.489.000	100	16.179.489.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100	884.673.000	100	984.673.000	100	1.094.420.000	100	1.297.155.000	100	1.297.155.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	2.597.000.000	100	800.000.000	100	700.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	3.662.900.000	100	3.710.279.000	100	3.760.279.000	100	3.860.279.000	100	3.860.279.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000
			57.820.427.000		53.016.891.000		60.234.202.000		55.232.101.000		55.232.101.000	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii-iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1-3
1.2. Landasan Hukum.....	3-7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7-8
1.4. Sistematika Penulisan.....	8-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN	10
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	10
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	10-11
2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	11
2.1.3 Uraian Tugas.....	11-18
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	19
2.2.1 Sumber Daya manusia.....	19-20
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	21-25
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	25-39
2.4 Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2023 – 2026.....	39-42
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	43-45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN.....	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten.....	46-53
3.2 Telaahan Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025.....	54-55
3.3 Telaahan Renstra K/L.....	55-58
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	58

	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	58-60
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	61
	4.1 Tujuan dan Sasaran.....	60-63
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	63-67
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	68-81
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	82-86
BAB VIII	PENUTUP.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.2.1.1	Keadaan Jumlah Pegawai.....	19
2.2.2.1	Jumlah Aset.....	21-25
2.3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	26
2.3.2	Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021.....	27-28
2.4.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	41
2.4.2	Anggaran dan Realisasi Pelayanan.....	42
3.1.1	Identifikasi Permasalahan.....	46-47
3.1.2	Sistem Keamanan Informasi.....	47
3.1.3	Data Sektoral.....	47-50
3.1.4	Data Aspek Pelayanan Umum.....	50-52
3.3.1	Tabel Telaahan Renstra.....	56-57
4.1.1	Tujuan Dinas.....	61
4.1.2	Sasaran Dinas.....	62
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan.....	64-65
5.2	Arah Kebijakan Tahunan.....	65-66
6.1	Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	74-79
6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	80-81
7.1	Indikator Kinerja mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	84
7.2	Indikator Kinerja Program.....	85
7.3	Definisi Operasional, Rumus Perhitungan dan Meta Indikator.....	84-86

DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
2.2.1.1	Keadaan PNS berdasarkan Golongan	20
2.2.2.1	Keadaan PNS berdasarkan Jenis Kelamin.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Struktur Organisasi	11



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan adanya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang termasuk didalamnya dengan akan segera berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2017-2022 di bulan Mei 2022 dan belum akan dilakukan pemilihan kepala daerah sampai dengan tahun 2024 dikarenakan adanya istruksi PILKADA Serentak di Tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Satistik dan Persandian Provinsi Banten yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika, serta Bidang Persandian Statistik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional dan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pemerintah Daerah,

perlunya melakukan Perubahan Renstra Tahun 2023-2026 dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, pada poin 6 (enam) a menyatakan bahwa Gubernur menyusun RKPD Provinsi berpedoman pada RPJPD Provinsi 2005-2025, memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun 2023 serta tahun 2024.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi dapat tercapai. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 s/d 2026.

Ruang Lingkup

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra merupakan bagian dari suatu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan.

Penyusunan Perubahan Rencana Startegis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan visi, misi arah kebijakan dan prioritas pembangunan dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Starategic, dijabarkan rencana kerja tahunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD. Dokumen Renstra juga berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881)
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
20. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
 27. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025;
 28. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika;
 30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Banten;
 31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Banten;
 32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten;
34. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
35. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
37. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
38. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 MAKSDUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen perubahan renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian dalam mewujudkan optimalisasi kinerja
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (Empat) tahun kedepan;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

6. Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi internal antar seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian.

Tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2023-2026 adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan yang berada dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 4 (Empat) tahun ke depan, dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), sumber daya yang dimiliki, capaian yang telah dihasilkan dan tantangan yang masih dihadapi serta perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah Provinsi Banten.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan visi, misi dan

program RPJPD, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Banten, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi Banten.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Banten selama 4 tahun.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah. Dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten mengalami perubahan SOTK yang sebelumnya dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten termasuk Dinas Tipe B untuk mewadahi urusannya dengan beban kerja yang sedang dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunya fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- c. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;

- d. Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

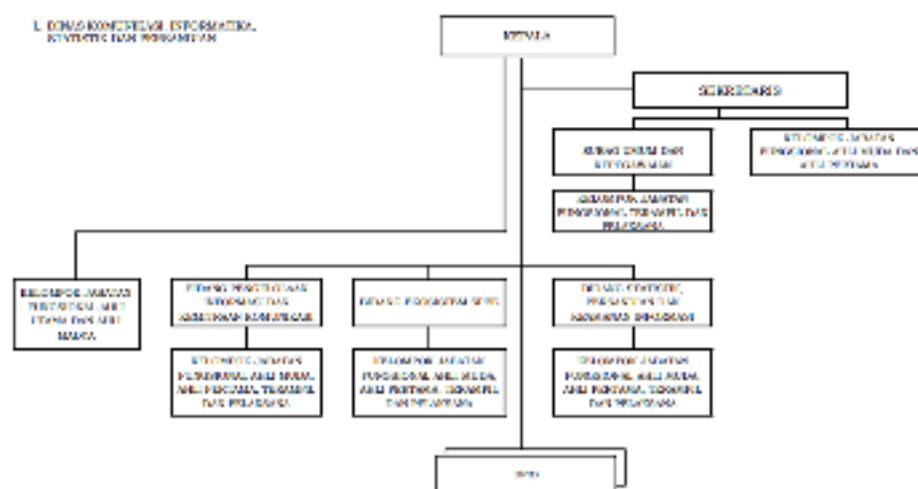
2.1.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah. dijabarkan sebagai berikut :

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi;
- d. Kepala Bidang Ekosistem SPBE;
- e. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi;
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi



2.1.3 Uraian Tugas

Berikut adalah rincian tugas pokok dan fungsi, seluruh komponen dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
- 2) Menetapkan rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan :
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. Pengelolaan Aplikasi Informatika;
 - c. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi; dan
 - d. Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; dan

- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris.
- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian;
 - 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas;
 - 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Dinas;
 - 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
 - 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas;

- 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan dinas;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelengaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 6) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - 7) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Dinas;
 - 8) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Dinas;
 - 9) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas;
 - 10) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
 - 11) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
 - 12) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 13) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 14) Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi
- a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Bidang Ekosistem SPBE

- a. Kepala Bidang Ekosistem SPBE mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Ekosistem SPBE mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a) Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b) Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi.

- a) Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi;
 - c. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

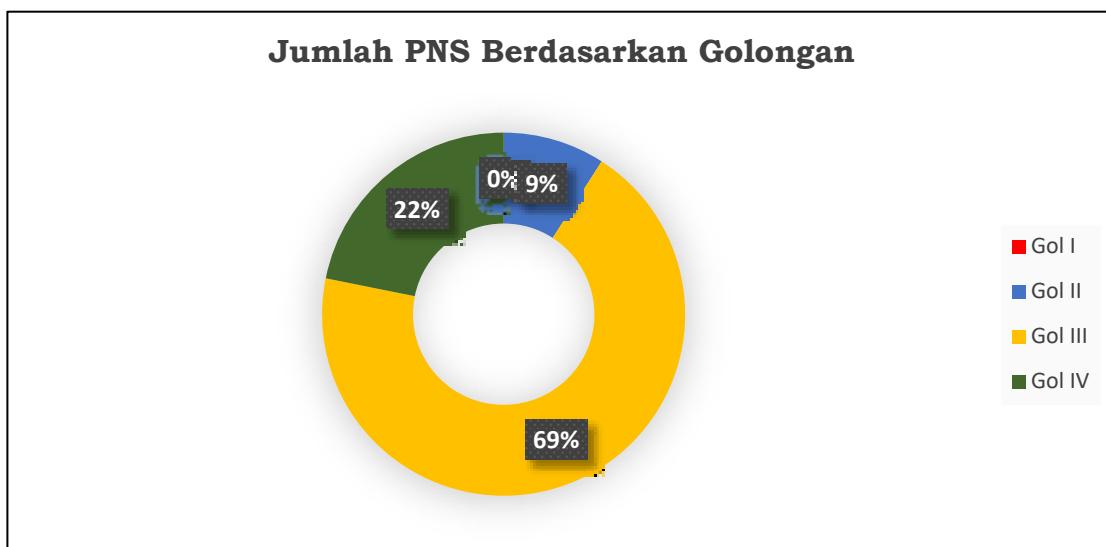
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didukung oleh 49 Orang ASN, 3 Orang CPNS, 79 Orang Non ASN, 27 Orang Tenaga Pendukung, 21 Orang Tenaga Ahli dan 9 Tenaga Operator.

Tabel 2.2.1.1
Keadaan Jumlah Pegawai berdasarkan Status dan Golongan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Periode Februari 2022

No	Status Pegawai	Golongan				Total	%
		I	II	III	IV		
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	5	35	12	49	26,06
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	0	0	3	0	3	1,60
3	Tenaga Honorer	0	0	0	0	79	42,02
4	Tenaga Ahli	0	0	0	0	21	11,17
5	Tenaga Pendukung	0	0	0	0	27	14,36
6	Operator	0	0	0	0	9	4,79
JUMLAH		0	5	38	12	188	100

Grafik 2.2.1.1

Keadaan PNS berdasarkan Golongan Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten



Grafik 2.2.1.2

Keadaan PNS berdasarkan Jenis Kelamin Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung berbentuk asset yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten terdiri dari sarana kantor dan sarana Informasi layanan dengan perincian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2.2.1 Jumlah Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten

No	Nama Barang	Keterangan
1	AC Sentral	14 unit
2	AC Split	68 Unit
3	Acces Point	49 Unit
4	Adaptor	9 Unit
5	Alat Pemadam/Portable	2 Unit
6	Alat Pembantu Kebakaran	5 Unit
7	Alat Penghancur Kertas	8 Unit
8	Amplifier	1 Unit
9	Audio Mixing	1 unit
10	Antena All Band	9 Unit
11	Antena SSB	10 Unit
12	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi (Dinding Partisi Kaca Riben Frame Aluminium)	1 Unit
13	Bangunan Gudung Kantor Permanen (Gedung Diskominfo Prov Banten)	1 Unit
14	Bangunan Gedung Pertemuan Pemanen (Pembangunan Command Center)	1 Unit
15	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen Pembuatan Tiang Baliho)	1 Unit
16	Bangunan Menara Televisi	1 Unit
17	Box Battery	13 Unit
18	Brandkas	3 Unit
19	Cable	51 Unit
20	Camera Electronic (Kamera Digital)	6 Unit
21	Camera Film (Kamera SLR)	5 Unit
22	Camera Vidio (Handycam)	9 Unit
23	Camera View Finder (Camera Indoor dan Outdoor)	16 Unit
24	Camera Photo Micrograph	1 Unit
25	Camera Video (film)	3 Unit
26	Card Reader (Peralatan Mainframe)	6 Unit

27	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	4 Unit
28	CCTV-Camera Control Television System	47 Unit
29	Console Unit (Peralatan Mainframe) Mouse Optical di LPSE)	10 Unit
30	Control Panel	4 Unit
31	Clip on	1 Unit
32	Controller Console PVC	6 Unit
33	CPU (Peralatan Persomal Komputer)	35 Unit
34	Data Patch Panel	8 Unit
35	Digital Camera (Monitoring Transportasi CCTV)	16 Unit
36	Digital Video Effect	1 Unit
37	Dispenser	9 Unit
38	DVD Writer	3 Unit
39	Escape Belt	5 Unit
40	Exhause Fan	2 Unit
41	External	8 Unit
42	External/Portable Hardisk	12 Unit
43	Facsimile	4 Unit
44	Filing Cabinet Besi	51 Unit
45	Filing Cabinet Kayu	1 Unit
46	Finger Printer Time And Attandance Acces Control System	1 Unit
47	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 Unit
48	Frequency Counter	2 Unit
49	Global Positioning System	2 Unit
50	GSM Jammer	2 Unit
51	Handy Cam	6 Unit
52	Handy Talky (HT)	23 Unit
53	Hard Disk	134 Unit
54	Hub	27 Unit
55	Hubbel UTP	22 Unit
56	Ilmu Pengetahuan Umum (Barang Perpustakaan)	284 Unit
57	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA (PJU)	392 Unit
58	jaringan satpas	1 Unit
59	Kabel UTP	27 Unit
60	Keyboard (Peralatan Mainframe)	2 Unit
61	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	10 Unit
62	Kitcen Set	1 Unit
63	Kompor Gas (Alat Dapur)	2 Unit
64	Kontrol Elektronik	10 Unit
65	Kursi Besi/Metal	9 Unit
66	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit
67	Kuri Meja Kerja Pegawai Non Struktural	173 Unit
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 Unit

69	Kursi Kerja Eselon IV	6 Unit
70	Kursi Kerja Eselon iv	10 Unit
71	Kursi Lipat	20 Unit
72	Kursi Rapat	21 Unit
73	Kursi Tamu	2 Unit
74	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon	2 Unit
75	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1 Unit
76	LAN Card	1 Unit
77	Lap Top	35 Unit
78	LCD Projector/Infocus	1 Unit
79	Lemari Besi/ Metal	15 Unit
80	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	26 Unit
81	Lemari Es	9 Unit
82	Lemari Kaca	25 Unit
83	Lemari Kayu	2 Unit
84	Lemari Sorok	1 Unit
85	Lensa Kamera	2 Unit
86	Local Area Network (LAN)	2 Unit
87	Loudspaker	4 Unit
88	Mainframe (Komputer Jaringan)	52 Unit
89	Meja 1/2 Biro	105 Unit
90	Meja Kerja	1 Unit
91	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	40 Unit
92	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 Uniit
93	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14 Unit
94	Meja Komputer	4 Unit
95	Meja Rapat	16 Unit
96	Meja Resepsionis	7 Unit
97	Mesin Bor Batu	1 Unit
98	Mesin Bor Beton	2 Unit
99	Mesin Fotocopy Electronic	2 Unit
100	Mesin Fotocopy Folio	1 Unit
101	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	2 Unit
102	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) (Sarana dan Prasarana Sekretariat KPID Banten)	1 Unit
103	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1 Unit
104	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	3 Unit
105	Mesin Penghitung Uang	1 Unit
106	Microphone Wireless	1 unit
107	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	15 Unit
108	Mobile Modem GSM/CDMA	2 Unit
109	Modem	10 Unit

110	Monitor	27 Unit
111	Multiscan Proyector	7 Unit
112	Note Book	24 Unit
113	Network Cable tester	5 Unit
114	Off Air TV Monitor (TV LED)	4 Unit
115	Overhead Projector	2 Unit
116	Papan Nama Instansi	7 Unit
117	Papan Panel	1 Unit
118	Papan Pengumuman	1 Unit
119	Papan Visual/Papan Nama	10 Unit
120	Partisi (Partisi Ruangan LPSE)	1 Unit
121	PC Unit	126 Unit
122	Peralatan Antena Penerima UHF	24 Unit
123	Personal Computer	17 Unit
124	PesawatbTelephone	1 Unit
125	Poertable Air Conditioner (Alat Pendingin)	22 Unit
126	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film) (DiLPSE)	1 Unit
127	Power Transmitter	6 Unit
128	Printer (Peralatan Personal Komputer)	83 Unit
129	Proteksi Petir Terpadu	13 Unit
130	Rak Besi	4 Unit
131	Rak Peralatan	1 Unit
132	Rak Server	18 Unit
133	Repeater and Transceiver	108 Unit
134	RF Cable	15 Unit
135	Router	276 Unit
136	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit
137	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 Unit
138	Scanner (Universal Tester)	1 Unit
139	Sedan	1 Unit
140	Sepeda Motor	11 Unit
141	Server	114 Unit
142	Storage modul disk (Peralatan Mainframe)	9 Unit
143	Sofa	7 Unit
144	Software	33 Unit
145	Software Conf Off-Line Computer	7 Unit
146	Solar Cell (Tiang Oktagonal)	5 Unit
147	Sound System	1 Unit
148	Stabilisator	1 Unit
149	Stabilizer	10 Unit
150	Station Wagon	2 Unit
151	Switch	12 Unit

152	Switcher Combination	31 Unit
153	Tablet Mechanie (Tablet Apple/Ipad)	2 Unit
154	Tablet PC	9 Unit
155	Tabung Gas	2 Unit
156	Tanah Bangunan Pos Jaga/ Menara Jaga (Tanah Gedung Tower Reapiter Gunung Kencana)	1 Unit
157	Tangga Aluminium	6 Unit
158	Taman Permanen	1 unit
159	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1 Unit
160	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use	72 Unit
161	Tas Laptop Kedap Air Untuk Membawa Laptop	10 Unit
162	Telephone (PABX)	11 Unit
163	Telephone Mobile	3 Unit
164	Televisi	19 Unit
165	Terminal	23 Unit
166	Tool Kit Set	3 Unit
167	Tripod	1 Unit
168	Tripod Camera	3 Unit
169	TV Monitor (Monitoring Transportasi)	4 Unit
170	Uninterruptible Power Supply (UPS)	55 Unit
171	Unit Pemancar UHF Portable	6 Unit
172	Unit Pemancar UHF Transportable	1 Unit
173	Unit Power Supply	1 Unit
174	Video Mixer	1 Unit
175	Video Monitor	5 Unit
176	Video Processor	1 Unit
177	Voice Recorder	3 Unit
178	White Board	6 Unit
179	Wireless	70 Unit
180	Wireless Access Point	305 Unit
181	Wireless Amplifier	1 Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengampu tiga (3) urusan yaitu, Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Bidang Statistik dan Urusan Bidang Persandian. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten pada

periode tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Provinsi Banten

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Nilai)	85	73,35	86,29
2.	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	90	91,70	101,89
		Persentase Sarana dan Prasarana Persandian (Persen)	100	100	100
3.	Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Maturitas Data Base Stratistik Sektoral (Nilai)	100	100	100
4.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nilai)	3,90	3,15	80,77

Tabel 2.3.2
Capaian Indikator Kinerja Program
Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Provinsi Banten

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan : %)	80	100	125
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Penyediaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Satuan: %)	85,08	100	117,54

		Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Satuan: %)	85,08	94,74	111,35
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Database Sektoral (Satuan : %)	75	100	133,33
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi (Satuan : %)	80	80,95	101,19

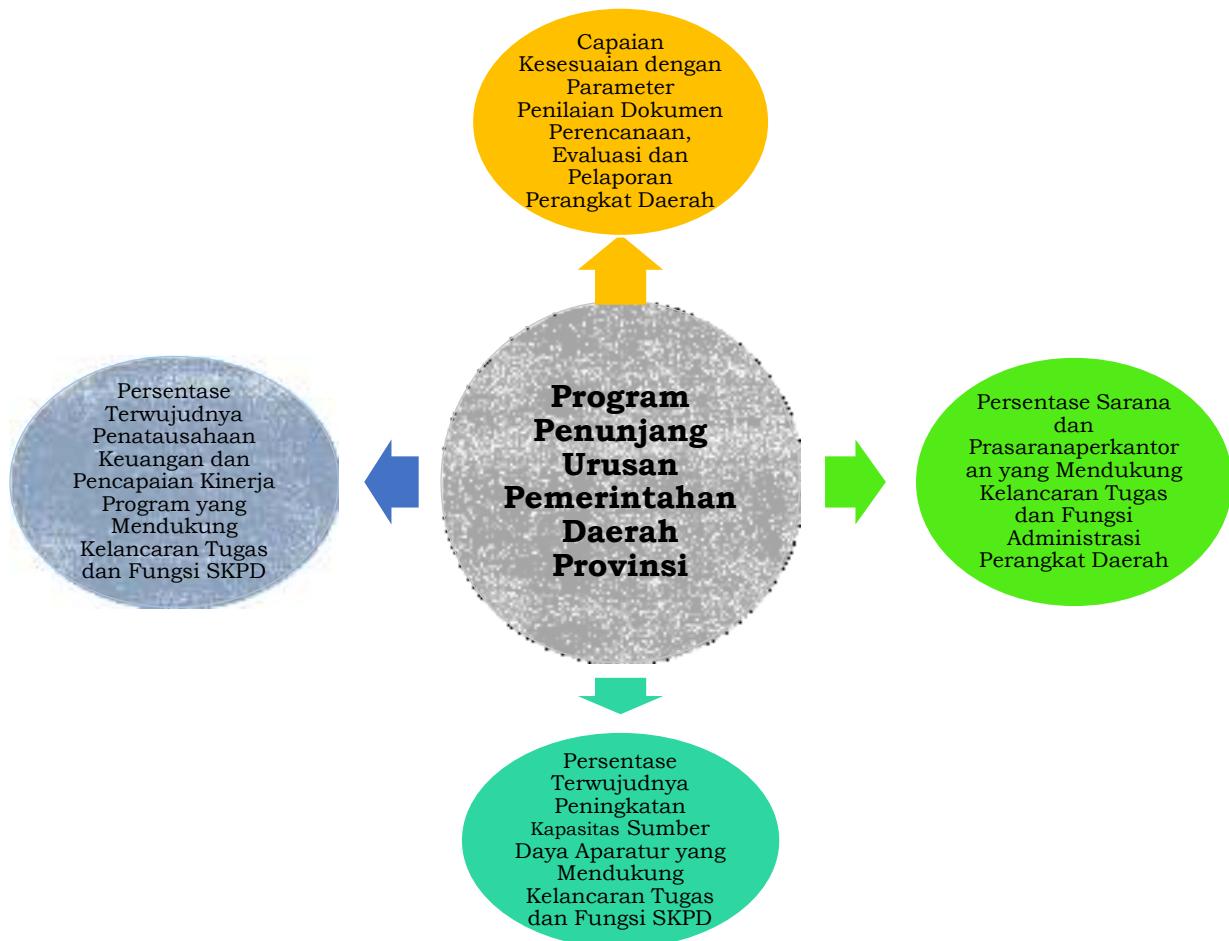
Berikut Penjelasan Capaian Indikator Kinerja

I. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Indikator Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD bertujuan untuk tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien. Untuk mencapai tujuan teraebut maka di tetapkan program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bertujuan untuk tercapainya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat 4 (Empat) Indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini



Penetapan beberapa indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bertujuan agar adanya interpretasi sejauh mana penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan indikator Kinerja Program yang mendukung capaian kinerja yaitu:

1) Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

Indikator Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD bertujuan untuk mengukur capaian pengelolaan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasioanl	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Capaian Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Jumlah Laporan yang Sesuai SAP / Jumlah Dokumen Laporan x 100	100	100	100

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

2) Capaian Kesesuaian Dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Perangkat Daerah

Indikator Capaian Kesesuaian Dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Perangkat bertujuan untuk mengukur Capaian Kesesuaian Dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Perangkat Daerah. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasioanl	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat Daerah yang sesuai parameter/Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat Daerah x 100	100	100	100

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

3) Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah

Indikator Capaian Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah bertujuan untuk mengukur Capaian Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah yang mendukung pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Capaian dukungan Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Jumlah Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran/Jumlah Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran yang tersedia x 100	100	100	100

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

4) Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

Indikator Capaian Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD bertujuan untuk mengukur Capaian Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD dan mendukung pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai:

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Capaian Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mendapat Sertifikat Pada Tahun N/Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan pada Tahun N X 100	100	100	100

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

II. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk Mewujudkan Layanan Informasi Publik yang Transparan dan Partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di tetapkan program yang mendukung capaian kinerja yaitu:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Program Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik terdapat 1 (Satu) Indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan indikator Kinerja Program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

1) Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Capaian Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bertujuan untuk mengukur Capaian Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dan mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase capaian pengelolaan komunikasi dan informasi public yang mendukung pencapaian nilai pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik terhadap capaian pengelolaan	Jumlah Pengelolaan Komunikasi dan informasi publik yang mendukung pencapaian nilai pemeringkatan / Capaian Pengelolaan	80	100	125

	komunikasi dan informasi.	Komunikasi dan Informasi x 100			
--	---------------------------	--------------------------------	--	--	--

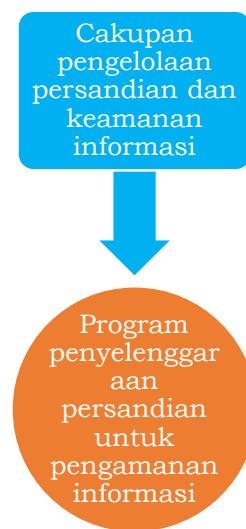
Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 125% melebihi dari target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

III. Persentase Sarana dan Prasarana Persandian

Indikator Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Persandian bertujuan untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di tetapkan program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi terdapat 1 (satu) indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka

ditetapkan indikator Kinerja Program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

1) Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi

Indikator capaian cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi bertujuan untuk mengukur capaian aplikasi di OPD yang memenuhi standar keamanan informasi dan mendukung pencapaian kinerja program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Aplikasi di OPD yang memenuhi standar keamanan informasi	Jumlah Aplikasi di OPD yang memenuhi Standar Keamanan / Jumlah Aplikasi yang Ada x 100	80	80,95	101,19

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 80,95% dengan capaian 101,19% melebihi dari target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

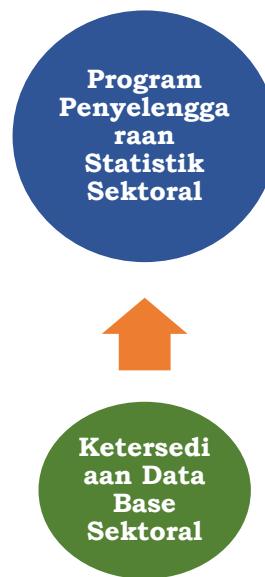
IV. Maturitas Data Base Statistik Sektoral

Indikator Capaian Maturitas Database Statistik Sektoral bertujuan untuk Mewujudkan ketersediaan data statistik sektoral. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di tetapkan program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program penyelenggaraan statistik sektoral bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data satistik sektoral. Program

penyelenggaraan statistik sektoral terdapat 1 (satu) indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan indikator kinerja program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

1) Ketersediaan Database Statistik Sektoral

Indikator capaian ketersediaan database statistik sektoral bertujuan untuk mengukur capaian data dan informasi sektoral yang dipublikasikan, ketersediaan database sektoral dan mendukung pencapaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Ketersediaan database statistik sektoral	Data dan informasi sektoral yang dipublikasikan dan ketersediaan database sektoral	Data dan informasi sektoral yang dipublikasikan / Data statistik sektoral yang ada x 100	75	100	133,33

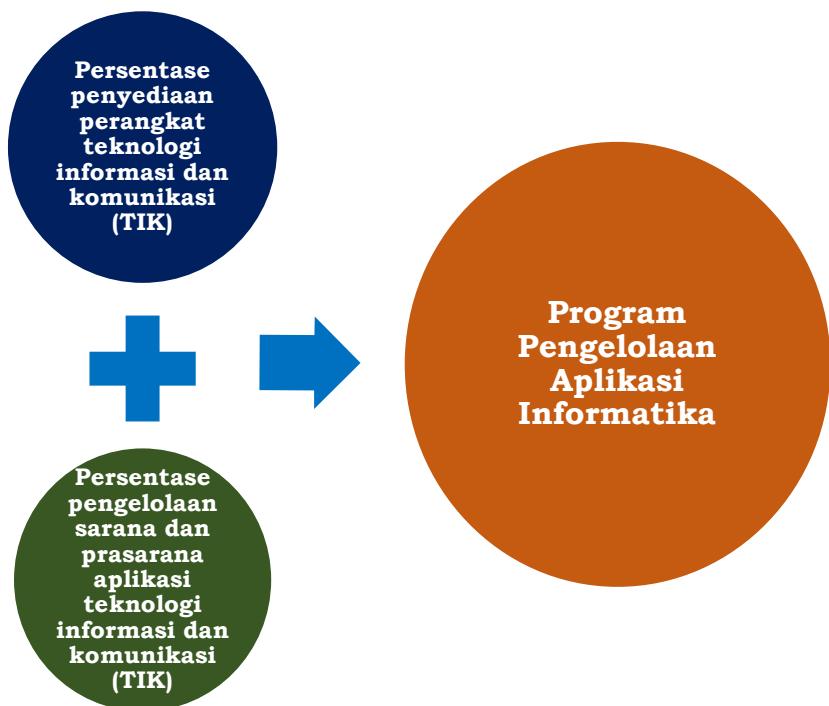
Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 133,33% melebihi dari target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

V. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Indikator Capaian Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di tetapkan program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program pengelolaan aplikasi informatika bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana TIK yang memadai dan berkualitas dan meningkatkan mutu pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program pengelolaan aplikasi informatika terdapat 2 (dua) indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral.

untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan indikator kinerja program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

1) Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Indikator capaian persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bertujuan untuk mengukur persentase jumlah ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mendukung pencapaian pelaksanaan SPBE di provinsi banten terhadap jumlah ketersediaan perangkat TI yang ada dan mendukung pencapaian kinerja program pengelolaan aplikasi informatika. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Persentase jumlah ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mendukung pencapaian pelaksanaan SPBE di provinsi banten terhadap jumlah ketersediaan perangkat TI yang ada	Jumlah perangkat teknologi informasi yang mendukung pencapaian SPBE/ketersediaan perangkat TI yang ada x 100	85,08	100	117,54

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 117,54% melebihi dari target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

2) Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Indikator capaian persentase pengelolaan sarana dan prasarana aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bertujuan untuk mengukur persentase capaian pengelolaan sarana dan prasarana aplikasi TIK yang mendukung pencapaian indeks penilaian SPBE terhadap capaian pengelolaan sarana dan

prasarana aplikasi TIK yang tersedia dan mendukung pencapaian kinerja program pengelolaan aplikasi informatika. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Persentase capaian pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi TIK yang mendukung pencapaian indeks penilaian SPBE terhadap capaian pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi TIK yang tersedia	Jumlah pengelolaan sarpras aplikasi yang mendukung pencapaian indeks SPBE/pengelolaan aplikasi yang ada x 100	85,08	94,74	111,35

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 94,74% dengan capaian 111,35% melebihi dari target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

2.4 PENCAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Pencapaian kinerja dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Provinsi Banten diukur berdasarkan tingkat pencapaian target indikator kinerja Sasaran Perangkat Daerah (IKU) berdasarkan target - target yang telah diamanatkan dalam dokumen Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran perangkat daerah/organisasi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang ditetapkan. Analisis dilakukan melalui

penelaahan terhadap ketercapaian/ketidaktercapaian masing-masing indikator Sasaran (IKU) serta indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) yang terkait atau menjadi instrument pelaksanaan dari indikator Sasaran (IKU) terkait tersebut. Pengukuran capaian kinerja ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan prioritas pembangunan daerah berdasarkan indikator kinerja Sasaran Perangkat daerah (IKU) yang diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten di periode perencanaan tahun 2017- 2022. Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tersebut, dilakukan dengan mengacu pula pada Definisi Operasional (DO) dari masing-masing indikator kinerja yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022.

Tabel berikut ini, menyajikan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program selama periode 2018- 2021 dengan membandingkan target dan capaian kinerja.

Tabel 2.4.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)				B	BB	BB			B	BB	BB			100	100	100		
Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten (%)				42,10	61,83	0	0	0	48,61	61,83				115,46	100			
Persentase Sarana dan Prasarana Persandian (%)				0	0	100	100	100	0	0	60,47			0	0	60,47		
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)				88,08	89	89,55	90	90	71,97	80,05	96,01	91,71		81,71	89,94	107,21	101,9	
Maturitas Data Base Statistik Sektoral (Nilai)				0	0	100	100	100	0	0	100	100		0	0	100	100	
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Nilai)				2,60	3,00	3,60	3,90	4,00	2,01	1,83	0	3,15		77,31	61	0	80,77	

Tabel 2.4.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan						
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	49.184.390.000	48.747.710.000	35.552.260.705	35.155.632.736		45.886.136.849	45.359.088.696	34.332.599.127	33.255.915.403	93,29	93,05	96,57	94,60			

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal merupakan hal penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan. Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yaitu dengan menerapkan Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Implementasi metode ini akan membantu organisasi untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Hal yang paling buruk akan terjadi, apabila organisasi mengembangkan kelemahannya karena ketidakmampuannya untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi. Identifikasi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan :

- a) Adanya Komitmen Pimpinan yang tinggi;
- b) Adanya regulasi pendukung bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c) Tersedianya sarana prasarana : Server, Infrastruktur jaringan Pemerintah Provinsi Banten (Jaringan Fiber Optik /kabel bawah tanah, Jaringan wireless) layanan internet 1000 Mbps;
- d) Adanya Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri di luar pemerintah yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik;

- e) Tersedianya aparatur pengelola multimedia, TIK, analis data, jurnalistik;
- f) Tersedianya Sumber Data yang otentik dan valid pada SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota;
- g) Tersedianya website www.bantenprov.go.id;
- h) Tersedianya aplikasi e-Mail Pemerintah Provinsi Banten, aplikasi perkantoran (e-office);
- i) Adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfo Provinsi Banten;
- j) Adanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyebarluasan informasi publik.

2. Kelemahan :

- a) Kurang optimalnya layanan informasi publik (personal, sarana dan konten);
- b) Kurang maksimalnya keamanan jaringan (network security), pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun, Akses jaringan internet hingga ke perdesaan;
- c) Rendahnya pengetahuan publik tentang Keberadaan Komisi Informasi;
- d) Kurangnya jumlah aparatur bidang komunikasi dan informatika

3. Ancaman dan Tantangan

- a. Persaingan global;
- b. SKPD yang menangani komunikasi dan informatika di tingkat Kabupaten/Kota tidak mempunyai nomenklatur yang sama;
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government;
- d. Adanya kesenjangan digital (tidak meratanya) sarana komunikasi dan informatika di daerah perdesaan dan perbatasan;

- e. Kurangnya Komitmen Pimpinan SKPD Prov. Banten, SKPD Kab/Kota terhadap Integrasi Data/Pertukaran Data serta Keterisian Data;
- f. Content digital yang kurang mendidik, sesat dan/atau merusak moral & tatanan sosial masyarakat;
- g. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang penyiaran dan keterbukaan informasi;
- h. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;
- i. Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI;
- j. Keterbatasan anggaran.

4. Peluang

Disamping tantangan tersebut diatas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Adapun beberapa peluang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kemajuan teknologi informasi;
- b. Keinginan masyarakat memperoleh data dan informasi;
- c. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kemkominfo RI);
- d. Adanya partisipasi dan Kemitraan Komunikasi Sosial antar Provinsi, Kab/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat;
- e. Media massa yang sangat berkembang;
- f. Peran strategis KI (Komisi Informasi) dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik;
- g. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain: keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan, sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi melalui pelayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat untuk meminimalisir kesenjangan tersebut.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 permasalahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Identifikasi Permasalahan Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kinerja pelayanan Publik belum optimal	Belum Optimalnya Capaian Penyelenggaraan SPBE	Rendahnya SDM di Bidang Informatika dan komunikasi Publik
		Belum Optimal Pelayanan informasi publik yang terinformasikan ke masyarakat	Rendahnya Kesadaran OPD atas hak masyarakat dalam mendapatkan informasi
			Belum Optimalnya Penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
			Belum Optimalnya Penerapan Manajemen SPBE
			Belum Optimalnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Belum Optimalnya Tata Kelola SPBE
			Belum Optimal Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas

			Belum Optimal Monitoring dan evaluasi SPBE
2.	Belum Optimalnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Belum Optimalnya Ketersediaan Database Statistik Sektoral	Belum Optimalnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral
3	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Persandian	Belum Optimalnya Cakupan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan informasi belum Optimal

**Tabel 3.1.2 SISTEM KEAMANAN INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN**

No	Keamanan	Produk Keamanan	Keterangan
1	Firewall	Fortigate	Fortigate sebagai perangkat yang menjamin keamanan jaringan secara keseluruhan sekaligus berfungsi sebagai gateway dan router
2	VPN (Virtual Private Network)	Pritunl	VPN adalah sebuah cara aman untuk mengakses local area network yang berada pada jangkauan dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi dengan enkripsi
3	Git Analyzer	Blackfire	Aplikasi untuk mencari celah pada coding di suatu program

**Tabel 3.1.3 DATA SEKTORAL
BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN**

No	Jenis Data/Barang	Jumlah	Lokasi	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jaringan FO	13.000 Meter	Area KP3B	-	-	-	-	13.000 Meter	-
2	Jaringan Wireless	292 Unit	Area KP3B	-	-	-	292 Unit	-	-

3	BTS (Base Transceiver Station) milik Diskominfo	3 Unit	Gunung Karang Kab. Pandeglang, Gunung Kencana Kab. Lebak, Diskominfo (KP3B)	3 Unit	-	-	-	-	-
4	BTS Umum (Base Transceiver Station)	4000 unit		-	-	-	-	-	4000 unit
5	Data Center	3 Unit	Diskominfo, Cyber Data Center International Cyber Building 1 Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. 12710 Indonesia, Batam Techno Park Jl. Tanjung Bemban Citra Lautan Teduh No. 18 Batu Besar	3 Unit	-	-	-	-	-
6	Server	25 Unit	Diskominfo, Cyber Data Center International Cyber Building 1 Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. 12710 Indonesia	-	1 unit	11 unit	-	-	-
7	NOC (Network Operations Center)	1 Ruangan	Diskominfo	-		1 unit	-	-	-
8	Command Center	3 Ruangan	Diskominfo, Ruang Rapat Gubernur (Setda Provinsi Banten), Ruang Rapat Wagub (Setda Provinsi Banten)	-	-	-	-	-	3 ruangan
9	Access Point	372 Unit	Access Point Ruang Rapat untuk di Lingkungan OPD Provinsi Banten	-	45	50	55	150	72
10	Firewall	7 unit	Diskominfo , Cyber Data Center International Cyber Building 1 Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. 12710 Indonesia	-	1 unit	-	3 Unit	1 Unit	2 Unit
11	Wireless Indoor	30 Unit	Area KP3B	-	-	-	20 Unit	-	10 unit
12	Switch	100 Unit	Area KP3B	-	-	-	4 unit	-	4 unit
13	NAS (Network Area Storage)	1 Unit	Data Center	-	-	-	-	-	1 Unit

14	CCTV	18 Unit	Pertigaan Setda, Gerbang 2 (Depan DPRD), Bunderan Depan Kominfo, Bunderan Depan PTSP, Gerbang 1 (Depan Setda), Depan BKKBN, Pakupatan, Gerbang 3 (Kemenag), Perempatan Boru, Patung, Alun-alun Serang, Gedung BPKAD, Gedung PUPR, Gedung PTSP, Gedung DPRD, Gedung DINDIK	-	3	-	1 unit	7	7
15	Bandwith	1.300 MBPS	OPD Luar dan Dalam KP3B, Banten Lama, Musium Banten, RSUD Banten, Komisi Informasi dan CCTV	-	-	-	-	-	1.300 MBPS
16	Nama Domain Resmi Pemerintah Prov. Banten	1 Domain 63 Sub Domain	Diskominfo	-	-	-	-	1 Domain 63 Sub Domain	-
17	Email	4.884 Email	Diskominfo		-	-	-	4.884 Email	-
18	Personal Komputer Lainnya	12 Unit	Diskominfo						12 Unit
19	PC Unit	23 Unit	Diskominfo						23 unit
20	Rooter	2 Unit	Diskominfo			2 unit	1 unit		2 unit
21	Peralatan computer Lainnya Dimencion	263 unit	Diskominfo		-	-	-	-	263 unit
22	Peralatan jaringan Lainnya Ubiquiti	91 unit	Diskominfo	-		-	-	-	91 unit
23	Peralatan jaringan Lainnya Ubiquiti 16 port rg	91 unit	Diskominfo	-		-	-	-	91 unit
24	Peralatan jaringan	5 unit	Diskominfo	-		-	-	-	5 unit

	Lainnya Tiang oktagonal								
25	Peralatan jaringan Lainnya ciscosuitch	4 Unit	Diskominfo	-	-	-	-	-	4 Unit
26	Peralatan jaringan Lainnya enclosure	4 Unit	Diskominfo	-	-	-	-	-	4 Unit
27	Penyimpanan Website	43 Hosting	Diskominfo	-	-	-	-	43 Hosting	-

Tabel 3.1.4 DATA ASPEK PELAYANAN UMUM

No	Kompomen data	Satuan	Time series						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Layanan telepon seluler*								
A.	Jumlah desa terlayani**								
-	Kab Pandeglang	Desa	-	-	-	-	338	336	-
-	Kab Lebak	Desa	-	-	-	-	341	341	-
-	Kab Tangerang	Desa	-	-	-	-	274	274	-
-	Kab Serang	Desa	-	-	-	-	325	326	-
-	Kota Tangerang	Desa	-	-	-	-	104	104	-
-	Kota Cilegon	Desa	-	-	-	-	43	43	-
-	Kota Serang	Desa	-	-	-	-	67	67	-
-	Kota Tangerang Selatan	Desa	-	-	-	-	54	54	-
B	Jumlah desa belum terlayani**								
-	Kab Pandeglang	Desa	-	-	-	-	1	2	-
-	Kab Lebak	Desa	-	-	-	-	-	2	-
-	Kab Tangerang	Desa	-	-	-	-	-	-	-
-	Kab Serang	Desa	-	-	-	-	1	-	-
-	Kota Tangerang	Desa	-	-	-	-	-	-	-
-	Kota Cilegon	Desa	-	-	-	-	-	-	-
-	Kota Serang	Desa	-	-	-	-	-	-	-
-	Kota Tangerang Selatan	Desa	-	-	-	-	-	-	-
C	Jumlah BTS**								
-	Kab Pandeglang	Unit	15	68	68	63	63	63	99
-	Kab Lebak	Unit	298	298	308	346	361	358	369
-	Kab Tangerang	Unit	401	401	769	770	1371	1371	1371
-	Kab Serang	Unit	12	2	11	25	26	15	158
-	Kota Tangerang	Unit	0	171	216	125	133	59	60
-	Kota Cilegon	Unit	1	11	6	8	24	16	21
-	Kota Serang	Unit	3	6	1	34	15	17	4
-	Kota Tangerang Selatan	Unit	117	41	7	0	18	42	121
2	Layanan telepon kabel*								
A	Jumlah desa terlayani**								
-	Kab Pandeglang	Desa	48	51	55	63	74	197	199
-	Kab Lebak	Desa	146	159	162	171	178	192	183
-	Kab Tangerang	Desa	84	90	95	106	115	223	97
-	Kab Serang	Desa	46	49	50	53	55	226	252
-	Kota Tangerang	Desa	-	-	-	-	-	99	-

-	Kota Cilegon	Desa	55	56	56	57	58	42	43
-	Kota Serang	Desa	18	19	20	20	22	60	65
-	Kota Tangerang Selatan	Desa						54	
B	Jumlah jaringan terpasang**								
-	Jumlah sambungan rumah tangga**	Sambungan	38.38	36.57	41.72	46.58	51.449	67.453	122.30
-		an	7	6	1	4			4
-	Jumlah sambungan perkantoran**	Sambungan	6.440	6.170	6.141	5.982	5.489	5.161	4.461
-	Jumlah sambungan swasta/dunia usaha**	Sambungan	6.855	6.915	6.907	6.821	7.462	7.510	13.809
3	Layanan internet*								
A	Jumlah desa terlayani								
-	Kab Pandeglang	Desa	48	51	55	63	74	197	199
-	Kab Lebak	Desa	146	159	162	171	178	192	183
-	Kab Tangerang	Desa	84	90	95	106	115	223	97
-	Kab Serang	Desa	46	49	50	53	55	226	252
-	Kota Tangerang	Desa	-	-	-	-	-	99	-
-	Kota Cilegon	Desa	55	56	56	57	58	42	43
-	Kota Serang	Desa	18	19	20	20	22	60	65
-	Kota Tangerang Selatan	Desa	-	-	-	-	-	54	-
B	Jumlah desa belum terlayani								
-	Kab Pandeglang	Desa	297	294	290	282	271	142	140
-	Kab Lebak	Desa	193	180	177	168	161	153	160
-	Kab Tangerang	Desa	241	235	230	219	210	51	9
-	Kab Serang	Desa	60	57	56	53	51	99	73
-	Kota Tangerang	Desa	-	-	-	-	-	5	-
-	Kota Cilegon	Desa	11	10	10	9	8	1	0
-	Kota Serang	Desa	25	24	23	23	21	6	1
-	Kota Tangerang Selatan	Desa	-	-	-	-	-	0	-
4	Pos*								
A	Jumlah kantor pos**								
-	Kab Pandeglang	Unit	1	1	1	1	1	1	1
-	Kab Lebak	Unit	1	1	1	1	1	1	1
-	Kab Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0	1
-	Kab Serang	Unit	0	0	0	0	0	0	0
-	Kota Tangerang	Unit	1	1	1	1	1	1	1
-	Kota Cilegon	Unit	1	1	1	1	1	1	1
-	Kota Serang	Unit	1	1	1	1	1	1	1
-	Kota Tangerang Selatan	Unit	1	1	1	1	1	1	1
B	Jumlah kantor pos pembantu**								
-	Kab Pandeglang	Unit	9	9	9	9	9	9	9
-	Kab Lebak	Unit	9	9	9	9	10	10	10
-	Kab Tangerang	Unit	24	25	25	23	22	22	14
-	Kab Serang	Unit	14	14	14	15	15	15	15
-	Kota Tangerang	Unit	23	23	21	19	17	17	14
-	Kota Cilegon	Unit	5	5	5	5	5	5	5
-	Kota Serang	Unit	3	3	3	3	3	2	2
-	Kota Tangerang Selatan	Unit	11	11	11	11	11	11	14
C	Jumlah desa terlayani pos keliling**								
-	Kab Pandeglang	Desa	339	339	339	339	339	339	766
-	Kab Lebak	Desa	345	345	345	345	345	345	741

-	Kab Tangerang	Desa	204	204	204	204	199	199	603
-	Kab Serang	Desa	268	268	268	268	268	268	537
-	Kota Tangerang	Desa	104	104	104	104	104	104	104
-	Kota Cilegon	Desa	43	43	43	43	43	43	201
-	Kota Serang	Desa	67	67	67	67	67	67	134
-	Kota Tangerang Selatan	Desa	54	54	54	54	54	54	107
5	Radio*								
A	Jumlah stasiun radio**								
-	Jumlah stasiun radio pemerintah	Stasiun	-	-	-	-	-	5	6
-	Jumlah stasiun radio swasta	Stasiun		-	-	-	-	47	48
B	Cakupan layanan*								
-	Jumlah kecamatan terlayani	Kecamatan	-	-	-	-	-	137	137
-	Jumlah kecamatan belum terlayani	Kecamatan	-	-	-	-	-	18	18
6	Televisi*								
A	Jumlah stasiun televisi**								
-	Jumlah stasiun televisi pemerintah	Stasiun	-	-	-	-	-	0	0
-	Jumlah stasiun televisi swasta	Stasiun	-	-	-	-	-	13	16
B	Cakupan layanan*								
-	Jumlah kecamatan terlayani	Kecamatan	-	-	-	-	-	150	150
-	Jumlah kecamatan belum terlayani	Kecamatan	-	-	-	-	-	5	5
7	Media cetak*								
A	Surat kabar nasional*								
-	Jumlah kecamatan terlayani	Kecamatan	-	-	0	126	126	126	-
-	Jumlah kecamatan belum terlayani	Kecamatan	-	-	0	0	0	0	-
B	Surat kabar lokal*								
-	Jumlah kecamatan terlayani	Kecamatan	-	-	0	126	126	126	-
-	Jumlah kecamatan belum terlayani	Kecamatan	-	-	0	0	0	0	-
8	Jumlah data statistik yang tersedia	Jenis data	-	-	183	183	183	183	-
9	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	Jenis data	-	-	183	183	183	183	-
10	Jumlah data statistik sektoral yang di publikasikan	Jenis data	-	-	183	183	183	183	-
11	Jumlah aplikasi provinsi yang dalam kategori aman	Applikasi	-	-	-	-	-	63	-
12	Jumlah aplikasi provinsi yang dalam kategori tidak aman	Applikasi	-	-	-	-	-	12	-

3.2 Telahaan Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program startegis tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2023-2026. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 adalah:

**“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA,
BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA”**

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi, dan misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi adalah Misi Ke-Empat Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa, dengan tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya Layanan informasi Publik yang Transparan dan Partisipatif;
3. Meningkatnya Penerapan SPBE;
4. Meningkatnya kualitas ketersediaan data statistik sektoral;
5. Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi.

Mengacu pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten melaksanakan :

1. Urusan Pemerintahan dengan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - a) Urusan Komunikasi dan Informatika dengan program :
 1. **Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.**
 2. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.**
 - b) Urusan Statistik dengan Program **Penyelenggaraan Statistik Sektoral.**
 - c) Urusan Persandian dengan **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.**

3.3 Telahaan RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika empat tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020-2024 akan berfokus

membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan Pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumberdaya manusia yang memiliki kmpetensi digital;
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan diatas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatkan cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatkan konektivitas layanan POS;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang POS, telekomunikasi dan Informatika;
6. Meningkatkannya pemanfaatan TIK disektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;

9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kemenkominfo, yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, berikut ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat, tantangan ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 Telaahan Renstra

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten /Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional - Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database OPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo - Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan - Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan muatan SPBE
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimal Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada aturan baku yang mengatur urusan bidang Komunikasi, 	

			<p>Informatika, Statistik dan Persandian seperti website, hosting dan colocation dll</p> <p>- Belum optimalnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi</p>	
--	--	--	---	--

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Banten telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pearaturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Banten.

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Rencana implementasi program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Banten selama 4 tahun yang akan datang (2023 - 2026) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Banten.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2023-2026 antara

lain :

1. Implementasi SPBE

Implementasi SPBE yang mulai berkembang di Provinsi Banten dalam lima tahun terakhir dinilai oleh pihak pusat sebagai provinsi yang berhasil dengan baik. Namun secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi SPBE semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia

2. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (source), saluran (channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang top-down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi

yang bottom-up adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Paradigma baru komunikasi sosial ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi sosial yang tersebar di masyarakat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten pada tahun 2023-2026 sebagai perumusan fokus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja tiap tahunnya. Adapun tujuan daerah dari RPD 2023-2026 yaitu :

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Untuk mewujudkan tujuan daerah pada RPD 2023-2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023 – 2026 melalui pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan yang akan dicapai.

Adapun tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023-2026 yaitu:

1. Mewujudkan Layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif serta Mewujudkan Peningkatan dan Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan;
2. Mewujudkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Perangkat Daerah;

Adapun keterkaitan antara tujuan daerah dengan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1.1 Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Misi : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

TUJUAN DAERAH / TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		
		(1)	(2)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi		
Mewujudkan Layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif serta Mewujudkan Peningkatan dan Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan;			
Mewujudkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral;			
Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi;			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Perangkat Daerah.			

4.2 SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah sebagai berikut

✚ Meningkatnya Penyelenggaraan reformasi birokrasi

Sedangkan sasaran RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

2. Meningkatnya layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif.
3. Meningkatnya penerapan SPBE.
4. Meningkatnya kualitas ketersediaan data statistik sektoral.
5. Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi.

Adapun sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1.2 berikut :

Tabel 4.1.2 Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Misi : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

NO.	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP perangkat daerah (Nilai)	74	76	78	80
		Meningkatnya layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif	Indeks keterbukaan informasi publik (Nilai)	91.80	91.90	92.10	92.15
		Meningkatnya penerapan SPBE	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (Nilai)	3.25	3.35	3.45	3.55
		Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Maturitas data base statistik sektoral (%)	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi	Indeks keamanan informasi (KAMI) (Score)	273	450	456	583



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Strategi pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

▢ Meningkatkan Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan misi ke 4 (Empat) RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa” maka dilakukan berlandaskan 4 (Empat) Strategi pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Optimalisasi keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TIK Guna Mendukung Layanan SPBE
3. Meningkatkan Koordinasi Penyediaan data statistik sektoral
4. Optimalisasi Manajemen Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi
5. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dari satu strategi pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 dan ke empat strategi Renstra Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 di atas menjadi rumusan untuk mencapai

keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan.

Arah Kebijakan pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengelola Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
2. Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana TIK Untuk Mendukung Pencapaian SPBE;
3. Melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan Mempedomani Prinsip SDI;
4. Melaksanakan Peningkatan Manajemen Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi;
5. Melaksanakan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar OPD;
6. Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Visi : Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa				
Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Bersih dan Berwibawa				
Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif serta Peningkatan dan Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan	Meningkatnya Layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif	Indeks keterbukaan informasi publik	Optimalisasi keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Mengelola Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Penerapan SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TIK Guna Mendukung Layanan SPBE	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana TIK Untuk Mendukung Pencapaian SPBE
Mewujudkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data base statistik sektoral	Meningkatkan Koordinasi Penyediaan data statistik sektoral	Melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan

				Mempedomani Prinsip SDI
Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Optimalisasi Manajemen Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi	Melaksanakan Peningkatan Manajemen Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi
				Melaksanakan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar OPD
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 5.2 Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Provinsi Banten 2023 – 2026

Arah Kebijakan				
Tahun 2023	Tahun 2024	2025	2026	
Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi SPBE.	Peningkatan kualitas layanan SPBE.	Optimalisasi Penerapan SPBE		
Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi	Melaksanakan peningkatan pelayanan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik	Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	
Melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan serta Penyebarluasan	Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya	Melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan serta Penyebarluasan data statistik sektoral	Penyediaan data dan informasi berkualitas.	

data statistik sektoral			
Melaksanakan Peningkatkan Manajemen Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi	Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Banten	Melaksanakan Peningkatkan Manajemen Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi	Melaksanakan Peningkatkan Manajemen Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 2005 – 2026 Pemerintah Provinsi Banten. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan adanya perubahan SOTK sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor : 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak/ prioritas serta kebijakan pimpinan Pemerintah Provinsi Banten. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi **"Banten Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"**.

Serang, Maret 2023

Plt. Kepala

Didi Hadiyatna, SE, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19770119 200801 1 003



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai corong semua informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah Provinsi Banten dalam 4 tahun ke depan memiliki posisi yang strategis. Indikator kinerja Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023-2026.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	91,70	91,75	91,80	91,90	92,10	93,05	93,05	
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,15	3,20	3,25	3,35	3,45	3,55	3,55	
3.	Persentase ketersediaan data base statistik sektoral	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Score	0	0	273	450	456	583	583	

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
1.1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	NA	0	100	100	100	100	100	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
2.1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100
2.2	Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF	%	0	0	39,39	48,48	57,58	66,67	66,67	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									
3.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	%	0	0	90,91	93,94	96,97	100	100	100
3.2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	0	0	100	100	100	100	100	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
4.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
4.1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	0	0	54,60	64,60	74,60	84,60	84,60	

7.3 DEFINISI OPERASIONAL, RUMUS PERHITUNGAN DAN META INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	META DATA INDIKATOR (DO)	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	Jumlah masyarakat yang memahami pesan informasi publik yang disebarluaskan dibagi dengan jumlah masyarakat yang menjadi target sasaran penyebarluasan informasi publik selama kurun waktu yang sama dikali 100	jumlah masyarakat yang memahami pesan informasi publik yang disebarluaskan/jumlah masyarakat yang menjadi target sasaran penyebarluasan informasi publik x 100
	Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF	Jumlah OPD yg mencapai katagori INFORMATIF berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Banten dibagi dengan Jumlah OPD selama kurun waktu yang sama dikali 100	Jumlah OPD yg mencapai katagori INFORMATIF berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Banten / Jumlah OPD x 100
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub Kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= $(\sum \% \text{ Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi} / \sum \text{ Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dibagi dengan jumlah seluruh OPD selama kurun waktu yang sama dikali 100	$\sum (\text{OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian} / \text{Jumlah OPD}) \times 100$
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi dengan jumlah layanan publik yang harus ada selama kurun waktu yang sama dikali 100	$(\sum (\text{Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}) / \sum (\text{Layanan Publik yang harus ada})) \times 100$
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub Kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	$= \sum \% \text{ Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi} / \sum \text{ Subkegiatan yang diampu} \times 100$

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub Kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= \sum % Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi / \sum Subkegiatan yang diampu) x 100
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibagi dengan Jumlah OPD selama kurun waktu yang sama dikali 100	\sum OPD yg menggunakan Data Statistik Sektoral / \sum OPD x 100
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah OPD selama kurun waktu yang sama dikali 100	= \sum % Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi / \sum Subkegiatan yang diampu) x 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah nilai per area informasi dibagi dengan Jumlah area penilaian selama kurun waktu yang sama dikali 100	\sum Nilai per area informasi / jumlah area penilaian x 100
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= \sum % Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi / \sum Sub kegiatan yang diampu) x 100
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah persentase Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= \sum % Ketercapaian dari seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi / \sum Sub kegiatan yang diampu) x 100
Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (%)	Jumlah Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi dengan Jumlah Kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= (\sum Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi / \sum Kegiatan yang diampu) x 100
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= (\sum Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah / \sum Sub kegiatan yang diampu) x 100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= $(\sum \text{Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= $(\sum \text{Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= $(\sum \text{Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= $(\sum \text{Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= $(\sum \text{Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= $(\sum \text{Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi dengan Jumlah Sub kegiatan yang diampu selama kurun waktu yang sama dikali 100	= $(\sum \text{Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah} / \sum \text{Sub kegiatan yang diampu}) \times 100$



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023-2026 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu empat tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebagus apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten menjadi OPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya good governance guna menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan beretika.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



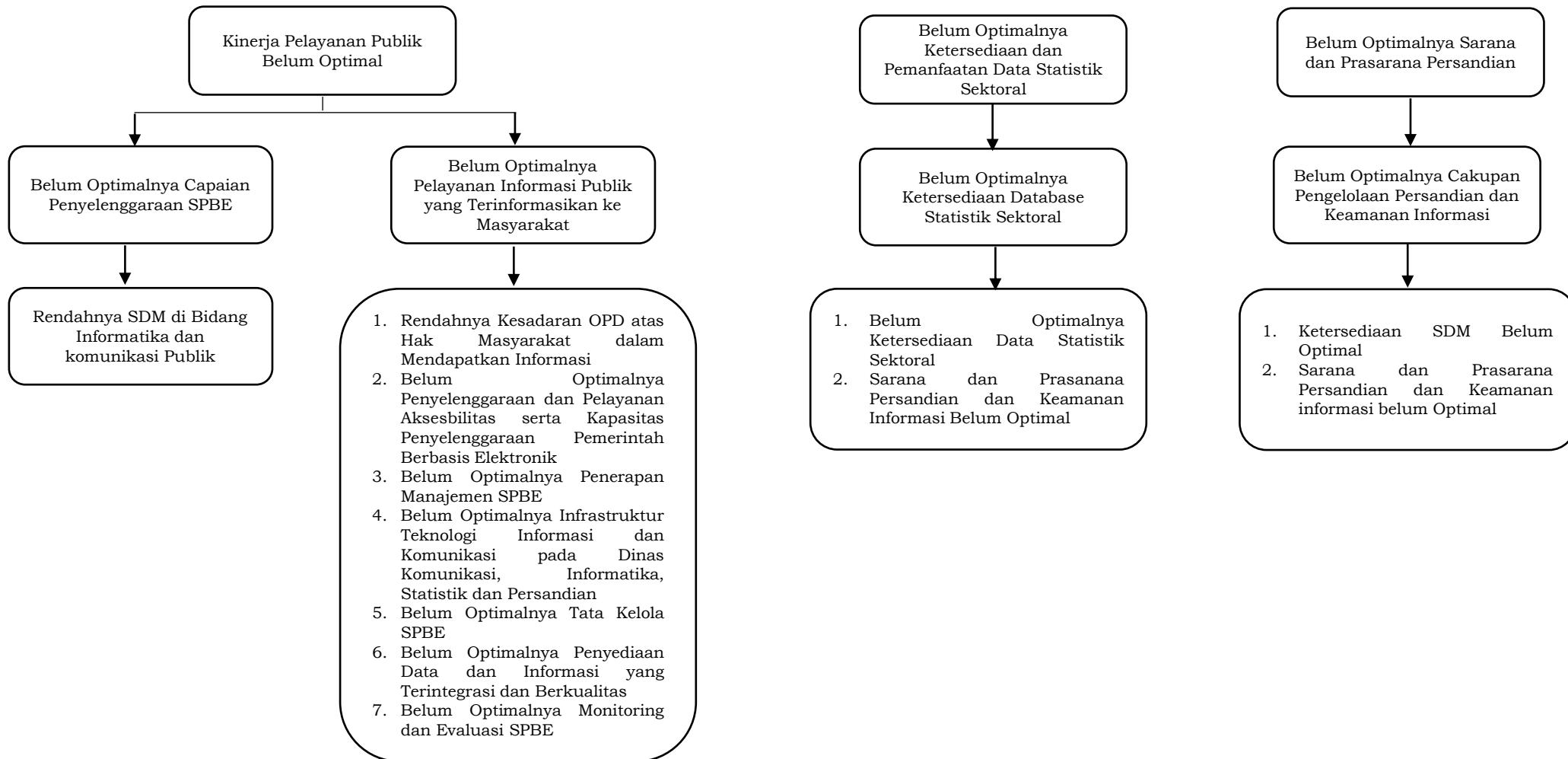
POHON MASALAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

2023-2026



1. POHON MASALAH





CASCADING KINERJA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

2023-2026



3. CASCADING KINERJA



VISI
Banten Yang Maju, Mandiri, Sejahtera berdasarkan Iman dan Taqwa
MISI
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa
TUJUAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa
INDIKATOR KINERJA
Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN STRATEGIS DAERAH
Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
INDIKATOR KINERJA
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik
SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya Layanan Informasi Publik yang Transparan dan Partisipatif
Meningkatnya Penerapan SPBE
Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Data Statistik Sektoral
Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi
INDIKATOR KINERJA
Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Persentase Ketersediaan Database Statistik Sektoral
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

KEPALA BIDANG

Program	Program	Program	Program
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (BNT 03.2.16.02)	Pengelolaan Aplikasi Informatika (BNT 03.2.16.03)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral (BNT 03.2.20.02)	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (BNT 03.2.21.02)
Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program
Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektoral	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program
<ol style="list-style-type: none"> Persentase tingkat kepuasan terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah Persentase OPD yang mencapai Kategori informatif 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Persentase layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi 	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah
Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Terkelolanya Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkelolanya Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 2. Terkelolanya E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2. Terselenggaranya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan
Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 2. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2. Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

KEPALA SEKSI

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pelayanan Informasi Publik	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Infrastruktur	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berkembangnya Infrastruktur	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Infrastruktur Statistik	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Manajemen Komunikasi Krisis	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
Output	Output	Output
Terlaksananya Manajemen Komunikasi Krisis	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	
Output	Output	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	
Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	
Output	Output	
Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Output	Output
Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Output	Output
Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
	Output
	Terlaksananya program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City
Indikator Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City

Sub Kegiatan
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
Output
Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
Sub Kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
Output
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan / data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Opini dan Aspirasi Publik 3. Jumlah bahan / data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi / penginputan terkait Opini dan Aspirasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait pendaftaran nama domain pemerintah provinsi 2. Jumlah bahan/data hasil Pengelolaan data terkait pendaftaran nama domain pemerintah provinsi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi/penginputan terkait Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 2. Jumlah bahan/data hasil Pengelolaan data terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi/penginputan terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 2. Jumlah bahan/data hasil Pengelolaan data terkait Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi/penginputan terkait Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi terkait Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data Jumlah bahan/data penyusunan penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi terkait Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi terkait Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi terkait Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Jumlah bahan/data penelaahan data terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Metadata Statistik Sektoral 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Metadata Statistik Sektoral 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Metadata Statistik Sektoral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pelayanan Informasi Publik	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Tersedianya bahan/data dalam rangka Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi
Indikator Kinerja Individu		Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Pelayanan Informasi Publik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Pelayanan Informasi Publik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Pelayanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 3. Jumlah pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Infrastruktur	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya data /bahan dalam rangka pengembangan infrastruktur	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 3. Jumlah pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait pengembangan infrastruktur STATISTIK 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait pengembangan infrastruktur STATISTIK 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait pengembangan infrastruktur STATISTIK	1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Manajemen Komunikasi Krisis	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Manajemen Komunikasi Krisis
Output	Output	Output	Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Manajemen Komunikasi Krisis	Tersedianya bahan/data dalam rangka Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Manajemen Komunikasi Krisis
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Manajemen Komunikasi Krisis 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Manajemen Komunikasi Krisis 3. Jumlah pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Manajemen Komunikasi Krisis	1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Pusat Data Pemerintahan Daerah 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Pusat Data Pemerintahan Daerah 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Pusat Data Pemerintahan Daerah	1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Manajemen Komunikasi Krisis 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Manajemen Komunikasi Krisis 3. Jumlah pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Manajemen Komunikasi Krisis

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Output	Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi/penginputan terkait Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi/penginputan terkait Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
Output	Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi/penginputan terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasi/penginputan terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Output	Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian dan analisis terkait Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian dan analisis terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Output	Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya bahan/data dalam rangka Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian dan analisis terkait Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasian dan analisis terkait Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sub Kegiatan
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
Output
Terlaksananya bahan/data dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
Sub Kegiatan
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan, pengklasifikasi dan analisis terkait Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 2. Jumlah bahan/data hasil pengolahan data terkait Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 3. Jumlah bahan/data pengumpulan, penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian/penginputan terkait Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

PERHITUNGAN RUMUS DEFINISI OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM/KEGIATAN AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI		
			2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RESTRA PERANGKAT DAERAH					
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	Persen	100		100		100		100		100,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN	PROVINSI BANTEN		
	Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF	Persen	39,39		48,48		57,58		66,67		66,67					
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100%	7.800.000.000	100%	7.500.000.000	100%	7.500.000.000	100%	7.600.000.000		7.600.000.000				
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persen	90,91	17.253.415.281	93,94	15.743.485.281	96,97	21.077.371.000	100	14.800.178.000	100	14.800.178.000				
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	100	5.197.137.719	100	4.547.137.719	100	5.200.000.000	100	5.100.000.000	100	5.100.000.000				
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100%	17.253.415.281	100%	15.743.485.281	100%	21.077.371.000	100%	14.800.178.000	100%	14.800.178.000				
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		100%	5.197.137.719	100%	4.547.137.719	100%	5.200.000.000	100%	5.100.000.000		5.100.000.000				
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persen	100%	1.400.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000				
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persen	100%	1.400.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	54,60	3.500.000.000	64,6	2.200.000.000	74,60	2.800.000.000	84,60	2.900.000.000	84,60	2.900.000.000				
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100%	3.500.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.700.000.000	100%	2.800.000.000	100%	2.800.000.000				
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persen	0	-	0	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000				
Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (%)	Persen	100	22.669.874.000	100	21.816.268.000	100	22.606.831.000	100	23.531.923.000	100	23.531.923.000				
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	13.980.301.000	100	14.676.316.000	100	15.407.132.000	100	16.179.489.000	100	16.179.489.000				

PROGRAM/KEGIATAN AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI		
			2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RESTRA PERANGKAT DAERAH					
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100	884.673.000	100	984.673.000	100	1.094.420.000	100	1.297.155.000	100	1.297.155.000				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	2.597.000.000	100	800.000.000	100	700.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	3.662.900.000	100	3.710.279.000	100	3.760.279.000	100	3.860.279.000	100	3.860.279.000				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000				
				57.820.427.000		53.016.891.000		60.234.202.000		55.232.101.000		55.232.101.000				